



PROGRAM
peduli

MENYEMAI INKLUSI SOSIAL

BUKU PRAKTIK CERDAS
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT



The Asia Foundation



Australian Government



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM
peduli

MENYEMAI INKLUSI SOSIAL

BUKU PRAKTIK CERDAS
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT



The Asia Foundation

Menyemai Inklusi Sosial

Buku Praktik Cerdas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Tim Penulis

Abdul Salim, Annisa Inayah, Anwar Sholihin, Bambang Y Sundayana, Dewi Astri Sudirman, Dayalwan Riswan, Edi Ariadi, Imelda Sulis Seda, Machrus, Nora Evriani, Odi Shalahuddin, Rachmat Taufik Oemar, Rambu W. Lodang, Sirot Fajar, Sisillia Velayati, Suharti, Tatang, Veronica Purwaningsih, Yudi Supriadi, Yuliyanti Anggraeni, Zuhro Rosyidah, Zulkarnain

Kontributor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Valentina Gintings
Santi Herlina Zaenab
Anisa
Amirika
Agung Budi

Editor

Dani Wahyu Munggoro
Siti Maemunah
Budhita Kismadi

Ilustrasi

Deni Rodendo

Desain Grafis

Galih Gerryaldy

Foto Isi

Dody Aries Kusumawidada
Dwi Prasetyo Budi Santosa
Iwan Joyo Suprpto
Roni Purnawan Supardal
Dokumen organisasi

Foto Sampul

Yusuf Ahmad

Publikasi ini diterbitkan oleh The Asia Foundation melalui Program Peduli dengan dukungan dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pandangan yang ada dalam publikasi ini adalah pandangan penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Australia.

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	iv	Pendahuluan	4
Kata Pengantar	ix	Wilayah Cakupan Program Peduli	18

ANAK PEKERJA MIGRAN

Dari Kader ke <i>Leader</i>	22
Laskar Peduli Lai Hau	36
Wahana Belajar Anak Umma Pande	46
Pola Pengasuhan APM di Desa Purwodadi	56
Mereka Yang Tergugah	64
Bergerak Bersama Melindungi APM	76



ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Rumahku Tempatku Kembali	88
Menjaga Mimpi di Jalan Bali	99
LPKA Ramah Anak	108
Jalan Panjang Gapai Dukungan Bagi Anak di Lapas	118
Melangkah Pasti	128

ANAK YANG DILACURKAN

Di Depan Pintu Puskesmas, Tangannya Mendadak Dingin	143
Berdaya Bersama Dana Desa	155
Pendampingan Anak Rentan dan Korban Berbasis Sekolah	164
KPM dan Harapan Perlindungan Anak	172
Melintasi Lorong, Memanusiakan AYLA	184



DAFTAR SINGKATAN

A	ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
	ADD	Alokasi Dana Desa
	APBDes	Anggaran Pendapatan Belanja Desa
	AMPP	Anak yang Menjalani Pidana Penjara
	APM	Anak Pekerja Migran
	AYLA	Anak yang Dilacurkan
B	Bhabinkamtibmas	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	BK	Bimbingan Konseling
	BKKBD	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
	BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
	BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
	BPS	Badan Pusat Statistik
C	BPU	Balai Pertemuan Umum
	CCC	<i>Children Crisis Centre</i>
	CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
D	Dapil	Daerah Pemilihan
	DO	<i>Drop Out</i> (sekolah)
	DP3APKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	DP3APPKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E	Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	E-KTP	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
	ESA	Eksplotasi Seksual Anak
F	FKG	Fakultas Kedokteran Gigi
	FKPABH	Forum Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
	FKPM	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
	Fota	Forum Orang Tua Asuh

G	Genre	Generasi Berencana	
H	HAM	Hak Asasi Manusia	
	HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>	
I	IMS	Infeksi Menular Seksual	
K	KDR	Kelas <i>Disciples</i> Remaja	
	KIA	Kartu Identitas Anak	
	KIP	Kartu Indonesia Pintar	
	KIS	Kartu Indonesia Sehat	
	KLA	Kota/Kabupaten Layak Anak	
	KPLP	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	
	KPM	Komite Pendidikan Masyarakat	
	KPMD	Komite Pendidikan Masyarakat Desa	
	KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	KTB	Kelas Tumbuh Kembang	
	KTP	Kartu Tanda Penduduk	
	L	Lapas	Lembaga Pemasarakatan
		LPA	Lembaga Perlindungan Anak
LPKP		Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan	
LSM		Lembaga Swadaya Masyarakat	
M	MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> atau Nota Kesepahaman	
	MUI	Majelis Ulama Indonesia	
	Musrenbang	Musyawah Perencanaan Pembangunan	
	Musrenbangdes	Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa	
N	Napza	Narkotika dan obat/ bahan berbahaya, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	
	NTB	Nusa Tenggara Barat	
	NTT	Nusa Tenggara Timur	
O	OPD	Organisasi Perangkat Daerah	
P	P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
	PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	
	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	
	PERDES	Peraturan Desa	
	PERSIT	Persatuan Istri Tentara	
	PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	
	PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	
	PKH	Program Keluarga Harapan	
	PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
	PLN	Perusahaan Listrik Negara	
	Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu	
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i> atau Pengkajian Desa secara Partisipatif		

P	PSK	Pekerja Seks Komersial	
	Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat	
R	RAFA	Rencana Aksi Forum Anak	
	RAM	Rencana Aksi Masyarakat	
	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah	
	RKPD	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
S	SANTAI	Yayasan Tunas Alam Indonesia	
	SD	Sekolah Dasar	
	SDN	Sekolah Dasar Negeri	
	SE	Surat Edaran	
	SEMAK	Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak	
	SK	Surat Keputusan	
	SMA	Sekolah Menengah Atas	
	SMAN	Sekolah Menengah Atas Negeri	
	SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	
	SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	
	SMP	Sekolah Menengah Pertama	
	SMPN	Sekolah Menengah Pertama Negeri	
	STAIN	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	
	T	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
		TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TKW		Tenaga Kerja Wanita	
TNI-AD		Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	
TPA		Taman Pendidikan Alquran	
TPQ		Taman Pendidikan Quran	
U	UPN	Universitas Pembangunan Nasional	
	UU	Undang-Undang	
W	WPS	Wanita Pekerja Seks	
Y	Yasalti	Yayasan Wali Ati	
	YHS	Yayasan Hotline Surabaya	
	YKPM	Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat	

Glosarium

Aja	Saja
Blok	Bangunan yang berisi kamar-kamar di Lapas
Burn Out	Mengalami kejenuhan atas yang dilakukan selama ini dan tidak tahu cara penyelesaiannya
Cennel	Jaringan, pelanggan, pengguna, konsumen
Dikeong	Sebutan untuk anak-anak yang dikurung dalam kamar LPKA atau di LPKA itu sendiri
Eksplotasi	Pemanfaatan tubuh untuk tujuan seksual yang merugikan anak
Hayu	Mari/ayu
Identifikasi	Menentukan atau menetapkan
Kasi	Kepala Seksi
Kekerasan Fisik	Perlakuan dengan cara memukul atau mencubit yang dapat melukai anak secara fisik
Kekerasan Verbal	Kekerasan yang dilakukan dengan cara membentak dan menghardik anak dan lain-lain sejenisnya
Klinik	Tempat layanan kesehatan
Komersial	Pencarian keuntungan atas tubuh anak
Konseling	Upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. (Schertzer dan Stone, 1980).
Konselor	Orang yang melakukan konseling
Korban	Anak korban dilacurkan
Madya/Nindya	Tingkatan dalam Kabupaten Layan Anak
Monitoring	Proses rutin untuk melihat perubahan yang dialami anak
Narkoba	Narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif
Ngeles	Mengalihkan perhatian
Perkumpulan Inisiatif	Organisasi yang peduli terhadap penganggaran dan pemerintahan
Self Confidence	Rasa percaya diri
Sok	Silahkan
Stigma	Melakukan cap negatif pada anak
User	Pengguna seks anak
Warem	Warung remang-remang



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR**

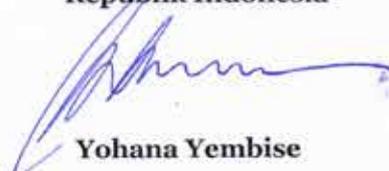
Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut baik dan apresiasi kepada Program Peduli dengan diterbitkannya buku “**Praktik Cerdas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat: Menyemai Inklusi Sosial**” yang merupakan kumpulan karya dan kasus-kasus nyata yang diambil dari lapangan dalam praktek pola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Harapan dari buku ini dapat mengajak semua unsur di tingkat nasional dan daerah sampai tingkat pemerintah terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat dengan berbagai isu dan situasi lokal dan menjadi inspirasi bagi dalam menentukan kebijakan perlindungan anak.

Terima kasih dan penghargaan atas kerja keras seluruh pihak dalam penulisan buku ini. Semoga dengan hadirnya buku ini berkontribusi terwujudnya pemenuhan hak perlindungan anak di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2018

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia**



Yohana Yembise

KATA PENGANTAR

Anak-anak adalah masa depan. Mereka adalah titipan Allah pada 'kita' (kita mencakup ayah, ibu, keluarga dekat, guru-guru, dan manusia-manusia lain yang memiliki kedekatan dengan sang anak), untuk diasuh sehingga mampu menemukan jati dirinya, mengasah potensi-potensinya, serta memperluas pilihan-pilihan terbaik atas masa depannya. Pada mereka, kita bisa berharap tentang kebaikan umat manusia dalam membangun kehidupan dan mengelola sumber-sumber daya bumi yang amat terbatas ini.

Berpijak pada persepsi di atas, kecakapan kita memberi perlindungan dan pengasuhan pada anak-anak, disertai dengan penyediaan arena-arena pengembangan diri yang tepat agar anak-anak memiliki banyak pilihan untuk mengasah dirinya menjadi amat penting. Kita melihat, cukup banyak anak yang meraih prestasi dan mampu mengembangkan diri, karena mereka memiliki keluarga yang menyediakan rasa aman, nyaman, serta kesempatan yang cukup bagi anak-anak itu untuk memperkuat potensi dirinya.

Sayangnya, tidak semua anak Indonesia memiliki 'keberuntungan' itu. Dalam perjalanan, kita menemukan bahwa cukup banyak anak-anak yang terabaikan, disisihkan, bahkan di stigma sehingga mendapat perlakuan kekerasan dari orang-orang dewasa maupun sebayanya.

Data Kementerian Sosial (2016) menyatakan bahwa ada 4,1 juta anak telantar dan sebagian dari mereka adalah anak-anak yang membutuhkan

perlindungan khusus, mencakup: (1) anak dalam situasi darurat; (2) anak yang berhadapan dengan hukum; (3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual; (5) anak yang diperdagangkan; (6) anak korban penyalahgunaan napza; (7) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; (8) anak korban kekerasan fisik dan mental; (9) anak disabilitas; dan (10) anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Data anak telantar tersebut didapatkan belum melalui sensus yang akurat. Anak-anak yang dieksplotasi masih menjadi populasi tersembunyi yang tidak tersentuh oleh banyak pihak.

Buku Praktik Cerdas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini berusaha menangkap berbagai pengalaman organisasi masyarakat sipil dan komunitas kecil masyarakat di 16 daerah untuk memberikan sentuhan bermakna bagi anak-anak yang tersisih. Kegiatan tersebut didukung melalui Program Peduli.

Program Peduli dirancang untuk mengembangkan pembangunan yang lebih inklusif, dengan memberdayakan sejumlah kelompok terpinggirkan yang sering terlupakan dari sentuhan berbagai program pembangunan, melalui tiga strategi, yaitu peningkatan akses pada layanan publik

dan bantuan sosial, penguatan penerimaan sosial, dan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Anak, menjadi salah satu pilar di Program Peduli, terutama dengan mengembangkan program untuk anak-anak rentan yang menjadi populasi tersembunyi, yaitu anak yang dilacurkan, anak yang menjalani pidana penjara, dan anak buruh migran.

Berbagai cerita yang tertuang dalam buku ini menggambarkan situasi yang dihadapi anak-anak rentan tersebut. Bagaimana anak-anak rentan menjadi korban, dipaksa menjalani hidup yang amat keras, terhimpit dalam jeratan eksploitasi di berbagai sisi, mendapat stigma dari berbagai kalangan bahkan sebaya mereka. Himpitan itu bisa bermula di rumah mereka sendiri, maupun di lingkungan di mana mereka tinggal, sampai ke ranah sekolah.

Rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak, berubah menjadi 'ruang yang berbahaya'. Ketika anak-anak itu berupaya mencari ruang yang (ny)aman bersama teman sebaya di jalan dan di tempat 'nongkrong', mereka justru menghadapi risiko lebih besar, terperangkap dalam eksploitasi atau melakukan tindakan melawan hukum.

Dari sini cerita bergulir. Organisasi masyarakat sipil di lingkungan anak seperti itu mulai melakukan ‘intervensi’. Intervensi inilah yang kita sebut sebagai praktik cerdas.

Dalam buku ini, Anda akan diajak untuk melihat variasi pendekatan yang dilakukan berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas dalam membuka dan mengembangkan ‘ruang-ruang aman’ bagi anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak rentan. Bentuknya bisa beragam, berupa sanggar khusus atau rumah tokoh masyarakat/kader yang dijadikan tempat bertemu anak-anak, dengan kegiatan yang bervariasi seperti pelatihan, mengaji, berbagi cerita sambil bermain, dan seterusnya.

Hasilnya, anak-anak belajar berinteraksi dan mulai membangun relasi sosial dengan orang-orang lain, termasuk orang-orang yang selama ini mengucilkan mereka. Pada gilirannya, pengucilan semakin berkurang dan semakin banyak orang di sekitar mereka yang memberikan perlindungan, terutama setelah mengenal dan sadar tentang situasi yang melingkupi anak-anak tersebut.

Kenapa intervensi tersebut dinamakan praktik cerdas? Karena bekerja dengan anak-anak rentan memang butuh kecerdasan. Kecerdasan melakukan pengamatan dan membaca situasi, kecerdasan menetapkan titik masuk dan berimprovisasi mengingat begitu kompleksnya masalah yang dihadapi sang anak, serta kecerdasan menganalisis perkembangan dan memanfaatkannya untuk membuka pilihan-pilihan kehidupan lebih baik bagi sang anak.

Sesuai dengan ‘bacaan’ atas situasi wilayah yang juga beragam, titik masuk pun banyak ragamnya. Ada yang memulai dengan melakukan pendekatan dan kesadaran pada beberapa tokoh dan kader-kader desa/kelurahan, ada yang memulai dengan mendekati pembuat kebijakan (pendekatan struktural), ada pula yang memulainya dengan bekerja dan berdialog dengan anak-anak rentan untuk mengembangkan rasa percaya diri mereka.

Yang menjadi benang merah adalah semua bentuk intervensi dimulai dengan pengamatan yang jeli atas situasi guna menemukan titik masuk yang tepat dan kemudian diikuti dengan

kemampuan mengembangkan imajinasi, cara-cara kreatif dalam melakukan perlindungan kepada anak yang rentan. Kunci dari semua kreativitas adalah ‘pengakuan’ terhadap anak yang dieksploitasi dan/atau dikucilkan. Wujudnya adalah identitas mereka diakui dan didata secara resmi, sehingga mereka ‘hadir’, tak lagi menjadi populasi tersembunyi.

Enam belas praktik cerdas ini bermaksud pula memberi gambaran bahwa tidak ada satu pakem pendekatan yang bisa berhasil untuk berbagai isu yang dihadapi, seperti halnya tak ada obat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Cara-cara kreatif melakukan perlindungan kepada anak rentan sesuai dengan situasi yang berbeda di tiap lokasi, merupakan resep sukses dari keberhasilan intervensi yang tergambar di buku ini.

Yang dibutuhkan, justru kebijakan dan implementasi kebijakan yang ‘akomodatif’, yang mampu memberi peluang untuk Pemerintah Daerah dan para-pihak berkreasi dalam mengembangkan program-program pemenuhan kebutuhan anak rentan atas perlindungan yang tepat sasaran, sekaligus memungkinkan apresiasi untuk berbagai pihak yang mampu mengembangkan inovasi-inovasi bermanfaat langsung bagi anak-anak rentan ini.

Proses penulisan praktik-praktik cerdas ini tidak sederhana, dan memakan waktu yang cukup panjang, setengah tahun. Ini dikarenakan penulis-penulis memang bukan orang yang berprofesi sebagai penulis, namun berasal dari para praktisi yang secara langsung berinteraksi dengan anak-anak rentan.

Dimulai dari gagasan yang dibahas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dimatangkan pada Desember 2017; kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pertama dengan beberapa wakil dari mitra payung Program Peduli di pertengahan Februari 2018 untuk memperoleh gambaran tentang apa saja inti sari yang akan dan perlu ditulis sekaligus menyepakati untuk apa penulisan ini ditujukan; kemudian pertemuan pertama dengan seluruh tim penulis dari 16 daerah dalam rangka mematangkan gagasan tentang apa-apa saja yang akan dituangkan dalam tulisan, seperti apa bentuk penulisannya, sekaligus praktik penulisan draf

pertama pada Maret 2018; proses-proses penulisan draf kedua, draf ketiga, disertai dengan asistensi *via online* dan tatap muka oleh tim INSPIRIT-Inspirasi Tanpa Batas; dan akhirnya pertemuan ketiga seluruh tim penulis di penghujung Juni 2018 dalam rangka memfinalkan tulisan sampai proses *layout*-nya.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami untuk 22 orang tim penulis: Abdul Salim, Annisa Inayah, Anwar Sholihin, Bambang Y. Sundayana, Dewi Astri Sudirman, Edi Ariadi, Imelda Sulis Seda, Iwan Riswan, Machrus, Nora Evriani, Odi Shalahuddin, Rachmat Taufik Oemar, Rambu W. Lodang, Sirot Fajar, Sisilia, Suharti, Tatang, Veronica Purwaningsih, Yudi Supriadi, Yuliyanti Anggraeni, Zuhro Rosyidah, dan Zulkarnain; yang telah berjibaku selama berbulan-bulan menuangkan pengalamannya bekerja bersama anak-anak rentan yang disamakan namanya dalam tulisan, dan memberikan analisis atas kekhasan program untuk anak yang diluncurkan, anak menjalani pidana penjara, dan anak buruh migran.

Kami bangga bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil ini, yang telah menunjukkan kepiawaiannya untuk bekerja bersama anak-anak rentan, sehingga menghasilkan manfaat nyata, baik untuk anak-anak sendiri, maupun lingkungan sekitar anak tersebut.

Terima kasih pula untuk tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), khususnya dari Deputi Bidang Perlindungan Anak, yang turut memberi inspirasi untuk mengaitkan kerja-kerja Program Peduli sebagai contoh-contoh konkret Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta memberi masukan-masukan dalam tiap tahapan penulisan.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas dampingannya untuk Program Peduli.

Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk tim INSPIRIT, yang mengasuh seluruh proses penulisan praktik cerdas dengan sabar, telaten, dan bernas.

Tak kalah penting, terima kasih untuk masyarakat Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang memberikan dukungan pendanaan untuk keseluruhan proses kerja pengembangan program-program perlindungan dan pemberdayaan anak rentan di berbagai wilayah serta pendokumentasian dari praktik-praktik cerdas yang berkembang di wilayah-wilayah itu.

Menjadi harapan, bahwa variasi praktik cerdas ini mampu memberikan inspirasi kepada pemerintah dari berbagai level, tokoh-tokoh masyarakat, komunitas-komunitas di wilayah lain, dan berbagai institusi yang memiliki kepedulian terhadap anak rentan, untuk mengembangkan pola pengasuhan dan perlindungan anak berbasis komunitas yang tepat sasaran serta memberikan kemanfaatan langsung untuk masa depan anak-anak rentan.

Mari jadikan anak-anak ini 'hadir', mampu melepas jeratan masalah dan eksploitasi, melepas keterkungungannya dari situasi 'bahaya' yang secara terus menerus mereka hadapi, dan pada gilirannya, memberi keberdayaan sehingga mereka mampu mengembangkan pilihan-pilihan terbaik untuk kehidupan dan penghidupan mereka ke depan.

Abdi Suryaningati
Team Leader Program Peduli
The Asia Foundation

PENDAHULUAN

MENYEMAI

INKLUSI SOSIAL

Oleh Anwar Solihin, Nora Evriani, Odi Shalahuddin,
Rachmat Taufik Oemar, Veronica Purwaningsih,
Yudi Supriadi

Buku ini ditulis untuk berbagi pengalaman menafsirkan, mengembangkan dan melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di berbagai wilayah di Indonesia. Enam belas lembaga nonpemerintah menceritakan bagaimana mereka memulai, mengelola, berkolaborasi dan belajar melindungi anak-anak dan remaja yang rentan.

Apa itu Perlindungan Anak? Perlindungan Anak adalah segala upaya untuk mengurangi risiko terhadap kesejahteraan anak secara holistik, menjadikan hak-hak anak nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka, membangun kembali kehidupan yang bermartabat dan berpengharapan di mana kekerasan pernah terjadi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang positif.

Perlindungan Anak bertujuan mencegah dan merespon kekerasan, eksploitasi dan pelecehan pada anak-anak — seperti eksploitasi seksual komersial, perdagangan orang, buruh anak dan pernikahan dini. Selain itu perlindungan anak



menjangkau anak-anak yang rentan seperti yang hidup tanpa pengasuhan orang tua, yang menghadapi masalah dengan hukum dan hidup di daerah konflik.

Pelanggaran hak-hak anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan berlangsung secara masif, kurang diakui, dan kurang dilaporkan serta menjadi rintangan bagi keberlangsungan dan tumbuh kembang anak, disamping juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Buku ini menceritakan kegiatan perlindungan anak yang berkaitan dengan: (1) anak pekerja migran yang hidup tanpa pengasuhan orang tua; (2) anak yang berhadapan dengan hukum; dan (3) anak yang dilacurkan. Ketiganya menjadi fokus utama Program Peduli Pilar Anak dan Remaja Rentan.

Program Peduli bertujuan mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Proses pembangunan yang memastikan setiap

warga negara — termasuk anak-anak dan remaja — merasa terlayani, terlibat dan terlindungi. Setiap warga — tanpa terkecuali, seperti anak dan remaja rentan, anak dan remaja berkebutuhan khusus, anak dan remaja yang diperdagangkan, anak dan remaja yang telantar serta berbagai situasi yang tidak menguntungkan anak dan remaja — harus merasa bernilai dan dianggap penting.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Selaras dengan jaminan negara di muka, Program Peduli bekerja untuk memastikan kelompok-kelompok anak yang ‘tak terlihat’ memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Anak Pekerja Migran

Isu perlindungan anak pekerja migran (APM) di Indonesia belum menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. APM dianggap memiliki taraf hidup yang lebih baik karena kiriman uang dari orang tua mereka yang bekerja di luar daerah atau luar negeri.

Kenyataannya, APM menghadapi banyak masalah seperti masalah pengasuhan, masalah pelayanan dasar, masalah kekerasan pada anak dan masalah eksploitasi sebagai pekerja anak, serta masalah pernikahan dini. Sebagai pekerja anak, banyak APM bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkan orang tua mereka.

Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi pekerja migran biasanya diasuh dan dititipkan kepada keluarga pengganti (kakek, nenek, paman, bibi, atau salah satu orang tua ayah atau ibunya, bahkan tetangganya yang juga punya anak). Keluarga pengganti umumnya keluarga miskin dan tidak mampu memberikan perlindungan anak yang memadai.

APM juga banyak mengalami perundungan. Mereka sering dirundung sebagai *anak oleh-oleh*, *anak gendongan*, *anak unta*, *anak rerumputan*, *anak Pakistan*, *anak Arab* dan *anak Hongkong*. Perundungan pada APM menjadikan banyak APM tidak percaya diri, terasing, terabaikan dan sulit mengakses pelayanan dasar seperti akta kelahiran, pendidikan dan kesehatan.

Sampai saat ini, pemerintah dan pemerintah daerah belum memiliki kebijakan dan regulasi untuk melindungi APM. Walaupun Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi belum ada pasal-pasal yang memuat tentang perlindungan bagi APM.

Kondisi-kondisi di muka tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur sebagai mitra payung Program



Kebanyakan anak pekerja migran yang diasuh oleh orang tua pengganti sangat sulit memperoleh pelayanan dasar.

Peduli Pilar Anak dan Remaja Rentan berinisiatif mengembangkan Program Perlindungan APM bersama berbagai mitra di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, LPKP telah bekerja dengan 6 mitra (Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Malang, Tanoker Jember, Yakin Tasikmalaya, Santai Lombok, YPK Donders Sumba Barat Daya, Yasalti Sumba Timur) dan telah menjangkau 3.336 APM, bekerja di 22 desa dan kelurahan, 7 kabupaten dan 4 provinsi.

Sampai Desember 2017, LPKP menemukan 872 APM membutuhkan layanan identitas, 1.032 APM membutuhkan akses pada bantuan sosial dan

layanan publik, 1.623 APM hidup dalam pengasuhan ibunya, 584 APM dalam pengasuhan ayah dan 605 APM hidup dalam pengasuhan neneknya. APM yang diasuh oleh orang tua pengganti sangat sulit memperoleh pelayanan dasar. LPKP juga menemukan lebih kurang 16 APM menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan data-data APM di setiap daerah, maka mitra melakukan proses intervensi program yang berbeda-beda. Pada buku ini, setiap mitra menuliskan satu pengalaman yang mewakili apa yang sedang dikerjakan di wilayah mereka.

TANOKER Jember menulis pengalaman bagaimana pengasuhan bersama yang berkualitas menjamin tumbuh kembang APM yang positif. Kader-kader APM berhasil menjadi *leader* bagi anak dan remaja di desanya.

SANTAI Lombok menceritakan bagaimana pendekatan yang berbasis data tentang kondisi APM berhasil menggugah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan regulasi agar semua kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk perlindungan APM.

LP3TP2A Malang menceritakan keresahan pengurus pemerintah desa pada perlindungan APM di desanya. Pengurus pemerintah desa bersama tokoh masyarakat lainnya bahu-membahu mendampingi dan membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi APM.

YAKIN Tasikmalaya menulis bagaimana bekerja di desa-desa yang dominan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Semula tokoh agama setempat menolak dan tidak peduli dengan APM, setelah memperoleh data dan kondisi APM, secara sukarela seorang tokoh agama berjuang memenuhi hak-hak APM serta memastikan pemerintah desa membantu mengurus akta kelahiran APM.

YASALTI Sumba Timur menulis

pengalaman bagaimana memperkuat Laskar Peduli APM di tingkat desa. Laskar ini menjadi lembaga koordinasi di tingkat desa yang berjuang melindungi dan memenuhi hak-hak APM.

DONDERS bercerita tentang partisipasi masyarakat yang cukup besar untuk membangun “Umma Pande”. “Umma Pande” adalah arena bagi anak-

SAMPAI SAAT INI, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BELUM MEMILIKI KEBIJAKAN DAN REGULASI UNTUK MELINDUNGI ANAK PEKERJA MIGRAN

anak dan warga desa untuk belajar, berdiskusi dan membicarakan masalah-masalah desa-termasuk penanganan APM. “Umma Pande” melahirkan banyak gagasan cemerlang seperti perlindungan APM, pemenuhan hak APM, pelatihan keterampilan dan pengembangan pertanian organik.

Selama dua tahun terakhir, berbagai kegiatan yang dilakukan 6 mitra membuahkan hasil yang menggembirakan. Hasil-hasil yang telah dirasakan sampai saat ini (1) meningkatnya kesadaran keluarga tentang pentingnya pengasuhan dan perlindungan bagi APM (2) tumbuhnya kesadaran tokoh masyarakat dan warga desa untuk peduli pada hak APM dan (3) meningkatnya partisipasi pemerintah daerah melindungi dan memenuhi hak APM melalui regulasi daerah.

Keberhasilan melindungi dan memenuhi hak APM di muka, memberikan harapan bagaimana praktik cerdas ini direplikasi di berbagai desa dan kabupaten di Indonesia.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah salah satu kelompok paling rentan dan paling sering menjadi korban dari lingkungan sekitar yang tidak ramah anak. Pada saat anak melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, maka disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Menurut Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, jumlah ABH di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000, terdapat 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan. Dari data Balai Pemasarakatan (Bapas), tahun 2004- 2005 sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan, sekitar 13.242 anak berusia 16-18 tahun dipenjara.

Selanjutnya, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga bulan Juli 2010, jumlah anak yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 orang anak, sedangkan, 3.197 anak di antaranya telah berstatus narapidana.

Kebijakan memasukan anak ke penjara otomatis menciptakan stigma ABH sebagai anak nakal dan jahat. ABH dipandang sebagai anak-anak berbahaya yang bisa menciptakan hal-hal buruk di lingkungan masyarakat.

Cara berpikir ini memberikan peluang yang besar bagi penegak hukum untuk menangkap, menahan dan menghukum penjara terhadap anak. Tindakan ini bukan kabar baik buat masa depan ABH. Penting diingat, anak itu berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak masih belum matang baik secara pikiran, hati dan jiwa.

Untuk mengatasi kerentanan di muka, pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA menganut pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini tidak lagi

berpikir penghukuman melainkan pemulihan pada kondisi semula.

Pijakan dari UU SPPA adalah Konvensi Hak Anak secara khusus diatur dalam pasal 37 dan pasal 40. Pasal 37 terkait dengan isu pencabutan kebebasan. Upaya pencabutan kebebasan harus dijadikan upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin, sedangkan Pasal 40 KHA terkait dengan persoalan administrasi peradilan anak.

Secara garis besar Pasal 37 menjelaskan tentang ABH sebagai pelaku harus diperlakukan secara manusiawi. Penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, tidak dapat diterapkan kepada anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak, atau belum tersedia fasilitas LPKA. Namun demikian, penempatan anak di

SETIAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU TINDAK PIDANA BERHAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DAN BANTUAN LAINNYA

LP Dewasa tetap harus menjamin hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;



b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sementara itu pada pasal 18 dinyatakan bahwa, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Sebagai langkah lanjutan, pada bulan Juli 2012, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum sinkron dengan Konvensi

PBB tentang Hak- hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*, UNCRC) atau Konvensi Hak Anak. dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU no 11 tentang SPPA 2012 UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: (1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana; (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada UU SPPA, pertanggung jawaban pidana direvisi menjadi berusia 12-18 tahun tanpa tambahan frasa “dan belum menikah”. Sebutan Rutan dan Lapas Anak pun diganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Undang-undang

baru ini juga mensyaratkan pelatihan terpadu bagi para penyelenggara SPPA. Undang-undang juga mengatur sanksi pidana dan administratif bagi penyelenggara SPPA yang tidak mengikuti aturan, misalnya lalai memberikan bantuan hukum bagi ABH pelaku.

UU ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 75 tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat strategi untuk pemenuhan HAM bagi ABH.

Sebelum penerbitan UU SPPA pada 2012, situasi Lapas Anak tidak berbeda dengan Lapas Dewasa. Anak-anak dimasukkan ke dalam Lapas berdasarkan jenis kelamin tapi tidak orientasi seksualnya. Akibatnya kekerasan dan pelecehan seksual pada ABH sering terjadi.

Anak Lapas pasti dikeluarkan dari sekolah asal. Tidak semua Lapas memberikan layanan pendidikan yang memadai baik berupa ketrampilan vokasional maupun pendidikan paket A/B/C.

Pelayan kesehatan Lapas Anak sangat terbatas, sulit memperoleh obat sesuai dengan resep dokter, tenaga medis tidak selalu berada di Lapas dan mekanisme layanan rujukan pada situasi darurat juga belum ada.

Program layanan reintegrasi sosial tidak ada. Persiapan reintegrasi tidak memadai sehingga ABH sulit beradaptasi saat bebas dari hukuman.

Pada sisi pemenuhan hak anak, ABH mengalami penyiksaan bagi yang dinilai bersalah. Untuk menimbulkan efek jera, Lapas lebih cenderung mengedepankan keamanan dibandingkan pembinaan.

Banyak keluarga juga mengabaikan hak-hak ABH, karena ABH dianggap aib keluarga. Jam kunjungan yang relatif singkat juga mengakibatkan hubungan ABH dan keluarga juga tidak sempurna.

Pada sisi kebijakan, batas usia pertanggung jawaban pidana 8 tahun mengakibatkan kebanyakan hakim cenderung memilih memberikan keputusan penjara dibandingkan keputusan lain.

Pada tahap awal Program Perlindungan ABH, PKBI melakukan kunjungan ke mitra-mitra kerja di seluruh lokasi program. Kunjungan dilakukan untuk mendiskusikan bagaimana melaksanakan SPPA di Lapas Anak.

Pertemuan menggunakan pendekatan TOC (*Theory of Change*) dan dalam bentuk lokakarya sehari serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan Program Perlindungan ABH dalam kerangka SPPA.

ORIENTASI PROGRAM ANAK YANG MENGALAMI PIDANA PENJARA DI LAPAS DAN LPKA MENITIKBERATKAN PADA PENERIMAAN SOSIAL KELUARGA, KELOMPOK MASYARAKAT DAN PARAPIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Pertemuan pertama ini bertujuan menemukenali masalah-masalah di lapangan, merumuskan strategi intervensi dan membuat data dasar situasi yang ada (ABH, Lapas dan pemangku kepentingan lainnya).

Pertemuan TOC di berbagai kota pada 2014 menghasilkan beberapa hal penting seperti: (1) mitra dan para pihak optimis mencapai perubahan yang disepakati; (2) perubahan bisa dimulai dari aktor yang sudah terpetakan, baik dari pihak pemerintah atau pihak lain; (3) perubahan terjadi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat; dan (4) perubahan bisa diukur baik pada proses maupun hasil akhir.

PKBI bersama mitra kerja mengembangkan beberapa strategi program implementasi UU SPPA sebagai berikut: (1) pembentukan jaringan kerja nasional; (2) penguatan kapasitas mitra; (3) pengembangan profil ABH; (4) pengembangan



Seorang anak yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup Bengkulu

kerangka kerja advokasi; (5) pengembangan kerangka kerja forum di tingkat daerah; dan (6) pengembangan sistem dukungan dan manajemen.

Setelah tiga tahun bekerja berkolaborasi, berikut adalah beberapa perubahan penting yang telah dihasilkan.

Orientasi Program AMPP (Anak yang Menjalani Pidana Penjara) di Lapas dan LPKA menitikberatkan pada penerimaan sosial keluarga, kelompok masyarakat dan parapihak yang berkepentingan. AMPP dipersiapkan kembali ke masyarakat melalui berbagai kegiatan di luar LPKA/Lapas/Rutan. Semisal, AMPP LPKA Palembang mengikuti pertandingan pencak silat Abas Akbar Cup di SMA Muhammadiyah Palembang. AMPP memperoleh medali dari kegiatan ini.

AMPP mengikuti berbagai kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang sesuai minat dan bakat. Kegiatan ini menciptakan rasa percaya diri dan keberanian berbicara dengan banyak pihak.

AMPP terlibat dalam kegiatan Forum Anak dan berkontribusi pada perumusan kebijakan perlindungan anak di daerah mereka masing-masing.

PKBI dan mitra fokus pada empat perubahan penting yakni penerimaan sosial dan partisipasi masyarakat, akses pelayanan publik, penegakan hak asasi manusia dan peningkatan peran pemerintah. Fokus pada empat perubahan penting menghasilkan perubahan di tingkat individu, tingkat organisasi dan di tingkat kebijakan serta regulasi.

Penguatan jejaring kerja menciptakan kerja-kerja kolaborasi untuk mengoptimalkan penanganan AMPP di lima LPKA. Penguatan ini memastikan dukungan yang lebih sistemik berkenaan dengan sumber daya manusia dan anggaran.

Dalam buku ini, dipaparkan bagaimana hasil-hasil di muka bisa terjadi.

LPKA Kelas II Jakarta. PKBI Jakarta melakukan pendekatan sebaya untuk melakukan kegiatan bersama

untuk memberikan dukungan psikososial, konseling dan bakat minat AMPP di LPKA. Semua kegiatan melibatkan relawan sebaya yang sudah mendapatkan pelatihan. Saat ini anak-anak di LPKA Jakarta bisa kembali menata hidupnya, merencanakan apa yang dicita-citakan setelah lulus dari LPKA.

LPKA Kelas I Blitar. LPA Jawa Timur menjaga semangat dan harapan AMPP di LPKA. Dengan berbagai bentuk kegiatan kreatif, AMPP dibangkitkan harapan dan impiannya melalui pembentukan Forum Anak LPKA.

LPKA Kelas II A Bandung. PKBI Jawa Barat mengembangkan model Forum Keluarga untuk mempererat hubungan antara anak dengan keluarga. Kunjungan keluarga yang lebih sering menguatkan kepercayaan diri anak. Forum Keluarga mempercepat proses reintegrasi di tengah masyarakat. Selain itu PKBI Jawa Barat melakukan advokasi ke berbagai dinas untuk pemenuhan hak AMPP.

LPKA Kelas I Palembang. Penjara berkesan keras, tertutup dan hanya urusan Kementerian Hukum dan HAM. PKBI Sumatera Selatan bersama LPKA Palembang mengubah penjara yang menyeramkan menjadi arena ramah anak. Konsep LPKA Ramah Anak menjadi semua pihak yang berkepentingan terlibat aktif sesuai tugas pokok masing-masing. Pada 2017, LPKA Palembang terpilih menjadi LPKA Ramah Anak Terbaik di tingkat Nasional.

Lapas Kelas IIA Curup, Bengkulu. PKBI Bengkulu membangun keterlibatan semua pihak mulai dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha dan media untuk merumuskan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perlindungan AMPP di Lapas. Kolaborasi berbagai pihak ini akhirnya memperoleh pengesahan dari pemerintah daerah dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Lima praktik cerdas berkenaan dengan penanganan dan perlindungan bagi ABH bisa menjadi inspirasi untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.



Anak yang Dilacurkan

Anak yang dilacurkan adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Keberadaannya diyakini telah menyebar di berbagai wilayah, tidak terbatas di daerah perkotaan namun juga sudah ditemukan di daerah pedesaan. Keberadaannya diketahui, kendati bersifat tersembunyi. Seberapa besar jumlah anak-anak yang dilacurkan, tampaknya belum tersedia data dan informasi yang memadai.

Anak yang dilacurkan dikelompokkan sebagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (Konvensi ILO 182) yang harus dihapuskan. Konvensi Hak Anak memberikan jaminan agar anak-anak terlindungi dari semua bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seks, di antaranya penggunaan anak-anak dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah (pasal 34). Instrumen penting adalah diadopsinya Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak



tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012.

Isu pelacuran anak mulai mendapat perhatian serius di tingkat internasional sejak awal tahun 1990-an dengan adanya kampanye dari ECPAT, khususnya yang terkait dengan pariwisata seks. Gerakan global dimulai pada tahun 1996 dengan diselenggarakannya Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (ESKA) yang menghasilkan deklarasi dan agenda aksi. Pelacuran anak menjadi salah satu bentuk ESKA, dan bentuk lainnya adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Kongres Dunia I yang berlangsung di Stockholm disusul dengan Kongres Dunia ke II (2001) di Yokohama dan Kongres Dunia ke III (2008) di Rio de Janeiro. Pada Kongres Dunia III, istilah ESKA diubah

menjadi ESA (Eksploitasi Seksual Anak). Ada lima bentuk ESA, selain tiga bentuk yang disebutkan di atas, bertambah dengan pariwisata seks anak dan perkawinan anak.

Salah satu dari agenda aksi Kongres Dunia I adalah setiap negara harus memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN). Indonesia sebagai salah satu peserta yang aktif mengikuti kongres tersebut telah berhasil memenuhi ketentuan ini melalui Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang

KONVENSI HAK ANAK MEMBERIKAN JAMINAN AGAR ANAK-ANAK TERLINDUNGI DARI SEMUA BENTUK EKSPLOITASI DAN PENYALAHGUNAAN SEKS

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak. Pada periode berikutnya, RAN ini digabungkan dengan RAN Trafficking, yakni melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014. Periode berikutnya hanya tersedia RAN PTPPO periode 2015-2019.

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, tampaknya intervensi untuk pencegahan dan penanganan anak yang dilacurkan sebagai salah satu bentuk ESA, sangat minim; baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Sedangkan, kendati belum diketahui besaran perkiraan jumlahnya, diyakini jumlah anak yang dilacurkan semakin

meningkat. Terlebih dengan tingginya penggunaan gawai yang membuka ruang atau pola baru yang disebut “prostitusi *online*”.

Dari minimnya intervensi, salah satu upaya telah dilakukan oleh Program Peduli dengan tajuk “Inklusi Sosial bagi Kelompok Rentan”, yang memasukkan anak yang dilacurkan sebagai salah satu penerima manfaat utama. Program yang secara efektif telah dimulai sejak Januari 2015 dan masih berlangsung hingga saat ini terdapat di lima wilayah yang melibatkan lima Organisasi Non Pemerintah, yakni di Bandar Lampung (CCC), Makassar

KOMUNITAS ATAU MASYARAKAT DI SEPUTAR TEMPAT TINGGAL ANAK DAPAT MENJADI BENTENG YANG KUAT UNTUK MENGHINDARI ANAK-ANAK MENJADI KORBAN BERBAGAI BENTUK KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

(YKPM), Surabaya (YHS), Bandung (KAP) dan Garut (SEMAK), yang dikoordinasikan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Program ini diarahkan sebagai upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi anak-anak yang dilacurkan, mendorong tersedianya akses layanan dan bantuan sosial dan mendorong adanya kebijakan baik di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat kota/kabupaten guna mewujudkan ‘inklusi sosial’.

Pengasuhan menjadi fokus dalam pelaksanaan program ini. Penyesuaian tanggung jawab pengasuhan tidak terbatas pada orang tua/keluarga melainkan juga bagi orang dewasa di mana anak berada, seperti di komunitas, sekolah, dan lembaga layanan. Identifikasi aktor-aktor yang diharapkan dapat berperan dalam perlindungan anak merupakan tahapan penting untuk mengembangkan strategi dan pendekatan yang tepat.

Isu anak yang dilacurkan secara umum masih dinilai sebagai sesuatu yang dapat memperlakukan suatu wilayah. Dalam pengalaman SEMAK, seorang tokoh desa melakukan penolakan atas rencana program yang akan dilakukan di wilayahnya dan meminta SEMAK mencari wilayah lain.

Saat lima lembaga menjelaskan persoalan anak yang dilacurkan, masyarakat segera menanggapi bahwa di wilayahnya tidak ada anak seperti itu. Identifikasi persoalan anak baik yang dilakukan dalam pertemuan ataupun melibatkan masyarakat dalam melakukan pengamatan di wilayahnya, membuka kesadaran bahwa persoalan tersebut memang dihadapi oleh mereka.

Melalui pendekatan dan dialog-dialog dengan masyarakat, mulai tumbuh perhatian yang diwujudkan dengan keterlibatan dalam perlindungan anak. Komunitas atau masyarakat di seputar tempat tinggal anak dapat menjadi benteng yang kuat untuk menghindari anak-anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Mereka juga dapat berperan merespon kasus-kasus yang muncul dan terlibat dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Lima lembaga mengorganisir masyarakat ke dalam organisasi perlindungan anak dengan nama Komite Perlindungan Masyarakat (KPM), yang sejalan dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Melalui organisasi-organisasi ini bertumbuhan kader-kader atau tokoh pembaharu yang memainkan peranan penting dalam mempromosikan perlindungan anak di wilayahnya.

Program ini juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, seperti Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga-lembaga layanan, yang dikoordinasikan melalui pertemuan-pertemuan rutin kelompok kerja untuk memperbarui situasi dan pembahasan berbagai persoalan yang muncul terutama dalam membuka akses layanan anak. Salin itu, didorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kebebasan masing-masing organisasi untuk mengembangkan strategi dan pendekatan yang didasarkan pada situasi dan kondisi masing-



masing wilayah telah memperkaya praktik pelaksanaan program. Hal ini tergambarkan dalam tulisan yang terhimpun dalam bagian ini.

Children Crisis Centre (CCC) Bandar Lampung memusatkan kegiatannya di dua lokalisasi. Sebelum Program Peduli, organisasi ini pernah berkegiatan di dua tempat tersebut. Keberhasilan yang diangkat dalam tulisannya adalah cara mengorganisir masyarakat ke dalam satu wadah yang berperan aktif dalam mempromosikan perlindungan anak. Melalui organisasi yang diberi nama Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) yang sejalan dengan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), muncul kader-kader yang menjadi tokoh pembaharu yang berperan tidak hanya di tingkat komunitas, tetapi juga di tingkat yang lebih luas di kecamatan ataupun kota/kabupaten.

Yayasan Pengkajian Pengembangan Masyarakat (YKPM) Makassar memusatkan kegiatannya di lorong-lorong yang dikenal sebagai kawasan padat dan menjadi

kantong kaum marginal, dengan situasi dan kondisi anak-anak yang sangat rentan terjebak dengan obat-obatan, kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi. Melalui pengalaman dari dua tokoh pembaharu dari organisasi yang menjadi gerakan PATBM guna membangun perubahan situasi, pembelajaran yang dipetik adalah kesungguhan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan, menciptakan ruang-ruang aman bagi anak, dan memanfaatkan pertemuan-pertemuan untuk mempromosikan perlindungan anak. YKPM juga berperan mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di kota Makassar.

Yayasan Hotline Surabaya (YHS) Surabaya memfokuskan kegiatannya di sekolah-sekolah guna melakukan pencegahan dan merespon jika terjadi kasus-kasus anak. Mereka berhasil melibatkan para guru, khususnya guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai tokoh pembaharu yang memberikan perhatian memadai kepada anak-anak secara aktif termasuk melakukan kunjungan



dan dialog ke rumah-rumah muridnya.

Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Indonesia di Bandung memilih tiga kecamatan yang dinilai menjadi basis tempat tinggal anak-anak yang dilacurkan dan anak-anak rentan. Untuk memperkenalkan persoalan anak yang dilacurkan di wilayah ini, berdasarkan hasil pemetaan masalah bersama masyarakat, mereka menggunakan isu kehamilan tidak dikehendaki (KTD) sebagai pintu masuk dialog yang lebih intens dengan masyarakat. Basis gerakan PATBM yang diberi nama Forum Komunikasi Peduli Anak (FKPA) telah melahirkan tokoh pembaharu yang berperan di dalam pendampingan anak, promosi perlindungan anak, dan juga bersama KAP Indonesia membangun komunikasi dan kerja sama dengan lembaga layanan terutama layanan kesehatan. Rintisan di tiga Puskesmas, diapresiasi secara positif oleh Dinas Kesehatan Bandung yang kemudian menetapkan tujuh Puskesmas ramah anak di awal tahun 2018.

Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK) yang bekerja di Kabupaten Garut memusatkan kegiatannya di tiga desa. Ini merupakan hal yang menarik mengingat selama ini perhatian banyak pihak terhadap persoalan prostitusi anak adalah di wilayah-wilayah perkotaan. Digambarkan keberadaan anak-anak yang dilacurkan melakukan kegiatan tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Pada awalnya, tokoh-tokoh pemerintahan desa menolak kehadiran SEMAK dan menganggap bahwa di wilayah mereka tidak ada persoalan prostitusi anak. Namun, melalui kegiatan bersama para ibu, yang juga mengidentifikasi persoalan-persoalan anak di desa mereka, ditemukan adanya anak-anak yang terjebak di dunia prostitusi. Melalui Gerakan PATBM yang terorganisir dengan nama Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD), bermunculan kader-kader tangguh yang aktif mempromosikan perlindungan anak, berperan penting dalam rencana pembangunan di tingkat



desa, dan berhasil mendapatkan alokasi dana desa bagi kegiatan anak-anak. Apresiasi Pemerintah Kabupaten Garut terhadap program di wilayah ini sangat baik.

Berbagai praktik pengalaman baik yang tergambar dalam tulisan-tulisan dari lima organisasi, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan memberikan inspirasi bagi pihak-pihak lain yang bekerja untuk perlindungan anak, khususnya bagi yang bekerja bersama kelompok anak-anak yang dilacurkan. Semakin banyak pihak yang terlibat dan dengan kekayaan pengalaman serta metode-metode pendekatan dan pendampingan, harapan kita anak-anak dapat keluar dari situasinya yang buruk, dan tercipta kehidupan anak Indonesia yang lebih baik.

Buku ini berisi enam belas pengalaman

menyemai benih-benih inklusi sosial di tingkat desa, kabupaten, provinsi dan pusat. Pada setiap praktik cerdas disertakan visualisasi tahapan-tahapan penting dalam membangun inklusi sosial untuk anak pekerja migran, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang dilacurkan.

Menyemai Inklusi Sosial adalah langkah-langkah kecil dan mendasar untuk memastikan semua anak Indonesia yang 'tak terlihat' memperoleh perlindungan dan pelayanan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak." (Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014)

WILAYAH CAKUPAN

PROGRAM **peduli** 2017-2018



Pilar Remaja dan Anak-anak Rentan



Makassar

Sulawesi Selatan
YKPM Makassar

Sumba Barat Daya

Sumba Timur

Nusa Tenggara Timur
YPK Donders

Nusa Tenggara Barat
SANTAI

PEKERJA MITIGASI

BAGIAN 1

ANAK ERJAJA RAN



DARI KADER KE LEADER

Oleh Sisillia Velayati
Tanoker, Jember



Atsror Ryan Alief (17), Anak Pekerja Migran (APM) yang ditinggalkan ayahnya sejak balita. Ayahnya bekerja sebagai mandor bangunan di Sumba dan Bali, ibunya guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ledokombo.

Meski bertemu ayah hanya 3-6 bulan sekali, komunikasi Ryan dengan sang ayah berjalan baik melalui telepon.

“Cuma nahan kangen selama jauh dari abah. Ryan ingin setiap hari bisa kumpul”, ujar Ryan yang memanggil ayahnya abah.

Pada 2014, orang tuanya bercerai. Di awal perceraian itu, ia susah beradaptasi dengan kondisi keluarga. Ia juga harus menghadapi orang di lingkungan sekitar yang menganggapnya tidak dipedulikan orang tuanya. Ia memilih tinggal di pondok pesantren agar adil terhadap orang tuanya.

Ryan menghadapi kondisi itu dengan mengikuti berbagai kegiatan di komunitas Tanoker bersama anak-anak Kecamatan Ledokombo yang sebagian kondisinya tidak jauh berbeda dengannya. Sejak 2011, ia menjadi kader dengan bergabung dalam tim *Tari Egrang*.

Ryan mengasah minat dan kemampuannya dengan bermain perkusi. Ia tampil membawa *Tarian Egrang* ke berbagai wilayah, baik di dalam maupun luar negeri.



Atsrer Ryan Alief:
“Abahku Bekerja di
Sumba dan Bali”

“ANAK-ANAK ADALAH MASA DEPAN DUNIA. ANAK-ANAK MEMBUTUHKAN WAWASAN YANG LUAS. MEWAKILI ANAK-ANAK LEDOKOMBO, SAYA MOHON PEMERINTAH MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK ANAK-ANAK LEDOKOMBO BELAJAR KE LUAR LEDOKOMBO SEKALIGUS MEMPROMOSIKAN TARIAN EGRANG KE MASYARAKAT DUNIA.”

Atsrer Ryan Alief, 17 tahun, di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Tingkat Kecamatan Ledokombo, 22 Februari 2018.



Pada 2016, ia juga aktif sebagai *leader*, memimpin berbagai kegiatan di sekolah, seperti pramuka, pasukan pengibar bendera, paduan suara, *band*, dan pencak silat. Dua tahun berikutnya, ia terpilih menjadi juara 3 pemilihan duta sekolah, Gus dan Ning di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kalisat.

Selain Ryan, ada Nurhalimah, 20 tahun, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Universitas Jember, juga aktif di Tanoker. Ibunda Nunung pernah bekerja di Saudi Arabia pada 2007 sampai 2010. Kemudian sang ibu melanjutkan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di Oman hingga saat ini, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sejak 8 tahun lalu.

Nunung, sapaan akrabnya, diasuh oleh neneknya yang berusia 60 tahun. Sekian lama berjauhan dengan ibunya, ia hampir tak bisa melanjutkan pendidikan sesuai pilihannya. Selain sang ibu, tak ada dari keluarga besar yang mendukungnya melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah

**Nurhalimah:
"Ibuku
Bekerja di
Oman."**

Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi ternama di Jember.

"Mereka bilang, 'Sekolah di kota itu pergaulannya bebas. Bayarnya mahal. Belum lagi biaya hidup. Apa kamu tega nyuruh ibumu kerja terus?' Intinya tidak ada uang untuk aku sekolah. Waktu diterima di FKG, aku disuruh pindah jurusan. Bahkan tidak diperbolehkan kuliah," cerita Nunung menggambarkan pendapat keluarga besarnya.

Nunung diam-diam tetap mendaftar ke sekolah impiannya. Hanya ibunya yang tahu. Ibunya bahkan pulang mendampingi dan memberikan penjelasan kepada keluarga besar.

Guru bimbingan konseling dan olahraga di Sekolah Menengah Pertama (SMP)nya, Drs. Radik Sandjaja juga membantunya mengantar dan membayar biaya pendaftaran SMA.

Perjuangannya, ibunya, dan perjuangan orang-orang yang mencintainya, membuahkan keberhasilan. Nunung

mempersembahkan berbagai prestasi buat mereka.

Semasa di perguruan tinggi, ia mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan tabungan dari Bupati Jember. Ia menyabet gelar Top 10 *Best Speaker* di Brawijaya *English Tournament*; Juara 3 lomba debat keagamaan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia; Finalis lomba debat pangan tingkat nasional di UPN Veteran Jawa Timur; Delegasi FKG di ASEAN *Islamic Dentistry Festival*; Juara 3 lomba poster ilmiah di Soedirman *Dentistry Scientific Meeting*. Ia juga menjadi mahasiswa berprestasi FKG tahun 2018.

Sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Nunung menjadi *leader* di sejumlah organisasi. Sekarang, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dentine, Unit Kegiatan Penalaran Mahasiswa Kedokteran Gigi.

Ledokombo dan Pekerja Migran

Ryan dan Nunung tinggal di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur bagian utara yang jumlah penduduknya 64.841 orang (BPS; 2017). Kawasan yang berada di wilayah berbukit dengan suhu sekitar 18oC ini terdiri dari 10 desa yang terletak di ketinggian 370 meter di atas permukaan laut. Selain udaranya yang sejuk, kawasan ini memiliki bentang alam yang asri dan indah dengan hamparan sawah nan hijau dikelilingi sungai. Akses jalan utama antar desa sudah beraspal dan mudah dilalui kendaraan. Sebaliknya, akses jalan antar dusun berupa tanah disertai bebatuan yang sering kali licin jika dilalui.

Ledokombo tempo dulu, dikenal sebagai wilayah tertinggal di Jember. Marginalisasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Belum banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah ini.

Ledokombo dianggap sebagai wilayah buangan. Jika ada staf pemerintahan yang ditugaskan di Ledokombo, dianggap sebagai hukuman untuknya.

Mayoritas penduduk adalah Suku Madura yang



dilabeli keras kepala dan susah diajak maju. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah buruh tani. Sisanya bekerja di sektor informal (pedagang kecil) dan menjadi buruh perusahaan, pegawai negeri, atau swasta.

Tiga dekade belakangan, sebagian penduduk berusia produktif di kawasan ini menjadi pekerja migran. Mereka pergi ke luar daerah untuk mencari nafkah, baik di dalam negeri (Bali, Lombok, dan Kalimantan) maupun luar negeri (Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Hongkong, Singapura, Taiwan, dan sebagian negara di Eropa).

Belum ada data yang valid mengenai jumlah penduduk yang bekerja ke luar daerah. Pada 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember mencatat sebanyak 7 orang penduduk asal Kecamatan Ledokombo bekerja ke luar negeri. Padahal hasil pendataan oleh komunitas Tanoker menunjukkan terdapat 156 orang bekerja ke luar negeri. Itupun baru angka dari satu desa di Kecamatan Ledokombo, yaitu Desa Sumbersalak.



Anak-anak itu dititipkan dan diasuh oleh salah satu orang tuanya, paman dan atau bibi, nenek dan atau kakek yang berangkat renta, bahkan ada yang ditinggal dan dititipkan begitu saja kepada tetangga. Kehidupan tanpa pengasuhan yang layak mewarnai hari-hari mereka.

Kurang siapnya peralihan pengasuhan ke pihak kedua yang mengasuh, menyebabkan mereka kurang dipedulikan, bahkan mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

Permasalahan demi permasalahan muncul di tengah kehidupan anak-anak, termasuk APM. Ini berakar dari minimnya pendidikan dan pengetahuan anak serta orang tua yang mengasuh, pergaulan geng anak, arus migrasi pemuda dan pemudi desa, perkembangan teknologi terutama gawai, dan kurangnya sarana penyaluran bakat yang positif.

**Anak-anak:
Berkarya,
Berdaya**

Mereka membolos bahkan putus sekolah, sampai mengalami kehamilan di luar nikah, dipaksa nikah dini, hingga berakhir perceraian. Belakangan mewabah anak-anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang yang secara bebas beredar di masyarakat. Mereka mengenal minuman keras dan obat-obatan itu kebanyakan dari anak-anak yang putus sekolah. Awalnya mereka sebagai pemakai kemudian meningkat menjadi pengedar.

Selain minuman keras, perilaku hidup tidak sehat juga diakibatkan sering mengonsumsi makanan dan minuman ringan tidak sehat (*junk food*). Saat bermain di lingkungan rumah, istirahat sekolah, atau menunggu waktu mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPA), anak-anak gemar "*rojegen bebbel bik jembuh*". Dalam bahasa Madura bermakna: rujakan nangka

muda dan jambu dicampur cabai, penyedap rasa, dan garam.

Problem lainnya berkaitan banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran. Identitas anak dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting oleh masyarakat. Pemerintah seolah membiarkan ini terjadi.

Ada keterputusan informasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten akan pilihan solusi jika salah satu dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran tidak dapat dipenuhi, misalnya



Tarian Egrang, Bermain Mencerdaskan

karena kartu keluarga atau surat nikah orang tua dibawa ke luar daerah.

Dampaknya, hak mereka terabaikan. Mereka tidak bisa mendapatkan berbagai layanan dasar, seperti Kartu Identitas Anak (KIA), mendaftar sekolah, dan kelak tidak bisa mendapatkan surat nikah serta lain sebagainya.

Egrang dan Kampung Wisata Belajar

Begitu banyak permasalahan yang terjadi, namun tidak semua APM terjerembab secara sosial. Di antara mereka ada yang bergerak menjadi motor perubahan. Mereka belajar berorganisasi dan melahirkan komunitas Tanoker pada 10 Desember 2009. Dalam bahasa Madura Tanoker berarti kepompong.

Dalam hampir 9 tahun terakhir, anak-anak telah mengubah banyak hal. Mereka mengawal Ledokombo menjadi sebuah “desa dunia” melalui *egrang* sebagai medianya.

Anak-anak mengembangkan optimisme dan gairah baru permainan tradisional *egrang*. Keseimbangan dan saling peduli terhadap teman lain adalah nilai yang tertangkap. Melihat ada yang terjatuh dan berdarah, membuat satu per satu ide muncul dari mereka. Mereka belajar bersama menemukan gerakan-gerakan yang tidak membuat terluka. Media sosial seperti *youtube* adalah salah satu gudang ilmunya.

Egrang, dalam perkembangannya berhasil dihidupkan dan dirayakan untuk menjadi harapan masa kini dan masa depan. Anak-anak memodifikasi permainan tradisional ini dengan dipadukan perkusi dan gerak tari menjadi hasil kreasi seni inovatif, Tarian *Egrang*.

Kini anak-anak komunitas Tanoker berjumlah 280 anak, sekitar 52 anak di antaranya merupakan APM. Mereka didampingi belajar dan bermain bersama dengan metode *peer education* atau saling belajar dari teman sebaya. Mereka belajar pendidikan karakter dengan *outbound* permainan

tradisional, kolam baca. Di kolam baca ini anak-anak berenang di kolam kecil dengan membaca buku sebagai tiketnya. Mereka juga belajar berorganisasi dan kepemimpinan, *public speaking*, seni musik, drama, tari, bahasa Inggris, kesehatan reproduksi, kerajinan tangan, pola hidup sehat termasuk pola konsumsi sehat, serta belajar pengetahuan tentang Indonesia serta negara-negara di dunia baik lewat berbagai buku, situs web, maupun warga negara lain yang datang ke Ledokombo melalui kampung wisata belajar.

“ANAK-ANAK MEMBUTUHKAN WAKTU UNTUK BERKREASI SESUAI DENGAN KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL YANG SUDAH DIRATIFIKASI. FESTIVAL *EGRANG* ADALAH SALAH SATU WUJUD DARI PEMENUHAN HAK ANAK.”

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Apa yang diinisiasi oleh anak-anak telah membuahkan hasil. Dari parade keliling desa kemudian membuat keluarga lebih memedulikan anak-anak. Anak-anak dipercaya menjadi wakil daerah untuk kegiatan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Salah satu gagasan penting anak-anak adalah Festival *Egrang*. Festival ini menjadi puncak hajatan budaya tahunan memperebutkan piala bergilir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Festival *Egrang* dimeriahkan dengan berbagai

kegiatan, seperti pawai *Egrang*, jalan sehat beregrang, bazar kuliner dan kerajinan tangan, lomba foto dan videografi, serta lomba mewarnai bertema *egrang*. Partisipan dalam kegiatan ini dari usia anak-anak hingga lansia. Tahun ini, Festival *Egrang* telah memasuki tahun ke-9 dan menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Jember.

Sebelumnya, pada Festival *Egrang* ke-8, peserta mencapai sekitar 1.500 orang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menghadiri festival. “Anak-anak membutuhkan waktu untuk berkreasi sesuai dengan konvensi hak anak internasional yang sudah diratifikasi. Festival *Egrang* adalah salah satu wujud dari pemenuhan hak anak.”

Pada acara tersebut, Kementerian PPPA mendukung Pemerintah Kabupaten Jember mendeklarasikan Jember menuju Kabupaten Layak Anak. Festival *Egrang* ke-8 menjadi media advokasi melalui pendekatan budaya melalui kerja sama dengan Program Peduli.

Tarian Egrang juga merupakan cikal bakal yang membawa Ledokombo menjadi destinasi wisata baru di Jember. Ledokombo berproses menjadi kampung wisata belajar di mana ekonomi desa bergerak dan kehidupan sosial, politik, dan budaya makin bergairah.

Kampung wisata belajar dikelola oleh mayoritas pekerja migran purna dan keluarga yang sejatinya mempunyai pengalaman-pengalaman internasional yang didapatkan di luar negeri, seperti kecakapan hidup maupun keahlian memasak aneka kuliner dan kemampuan berbagai bahasa internasional.

Kreativitas bersama ini melahirkan paket wisata dengan suguhan aneka *outbound* berbasis permainan tradisional; kuliner sehat kreatif mulai dari makanan, jajanan, dan minuman tradisional

Indonesia dan beberapa negara lainnya yang salah satunya dipasarkan di Pasar Lumpur (pasar kuliner *ndeso*) pada setiap hari Minggu di akhir bulan; produk pertanian organik serta produk kerajinan tangan; dan penyediaan *homestay*.

“Anakku, Anakmu, Anak Kita Bersama”

Tanoker mengagas program *Collaborative Parenting* atau pengasuhan bersama terutama untuk APM. Pengasuhan bersama dilakukan melalui pendekatan sosial budaya di mana pemerintah dan masyarakat menjadi orang tua semua anak, “*anakku, anakmu, anak kita bersama*”. Upaya sinergis ini digalang atas kerja sama berbagai pihak baik di tingkat lokal hingga internasional.

Pengasuhan bersama dirintis melalui kerja pendampingan anak-anak yang kemudian diperkuat dengan hadirnya Sekolah *Bok-ebok* (sekolah ibu), Sekolah *Pak-bapak* (sekolah bapak), dan Sekolah *Yang-eyang* (sekolah nenek dan kakek).

Pengasuhan ini dikemas dengan membangun ruang-ruang curhat sebagai upaya pengasuhan untuk perdamaian.

Sekolah *Bok-ebok* bertujuan memberdayakan perempuan. Pengelolaan belajar bersama sudah terorganisir dengan kerja sama komunitas akar rumput yang mayoritas keluarga pekerja migran dan juga pengajian-pengajian di kampung.

Ada fasilitator lokal dalam setiap pertemuan dengan materi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam modul sebagai panduannya. Beberapa materi dalam modul tersebut, yaitu pengasuhan bersama, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan, kesehatan reproduksi, pola hidup sehat termasuk pola konsumsi sehat, membangun keluarga damai, migrasi aman dan benar, internet cerdas, peran perempuan pembangunan dan keamanan, seks dan gender, deteksi dini radikalisme, serta materi

lainnya yang dibutuhkan.

Keberhasilan Sekolah *Bok-ebok* mulai dirasakan di keluarga kecil Muflihatun, 43 tahun yang diungkapkannya dalam bahasa Madura.

“*Mon sebelum bedeh Sekolah Bok-ebok, ebok reh mentang-mentang. Apa-apa bender. Denglah norok Sekolah Bok-ebok pendapat nak-kanak kodu kedingagih. Engkok reh ebok tak pasteh bender meloloh. Ebok tak mentang ebok. Kodu butoh ke nak-kanak. Padena a mesak’a apa tak pas metepak ke eberah dibik. Kan kodu tanya ke anak tero ngakan apa. Pas poleh, engkok setiyah tak ngalak sekarepa dibik mon nyoroh anak bik lakeh. Kodu ngocak kasoon. Setiyah lah biasa tak canggung. Reh gebei ngajeri anak kiyah.*”

(Sebelum ada Sekolah Ibu, ibu *mentang-mentang*. Semua yang dilakukan dan diucapkan adalah benar. Saat sudah mengikuti Sekolah Ibu, saya harus mendengarkan pendapat anak-anak. Saya ini ibu yang tidak selalu benar. Ibu juga membutuhkan anak-anak. Contohnya jika akan memasak harus menanyakan kepada anak, ia ingin makan masakan apa. Tidak hanya sesuai dengan yang diinginkan ibu. Selain itu, saya sekarang tidak mau menang sendiri kalau minta bantuan anak dan suami. Setelah dibantu harus mengucapkan terima kasih. Ini sudah terbiasa dilakukan dan tidak lagi canggung. Ini juga untuk memberikan contoh kepada anak.)

Seiring berjalannya waktu, Sekolah *Bok-ebok* ternyata tak cukup memenuhi kebutuhan belajar di kampung.

“*Re tak cokop Sekolah Bok-ebok. Jugen butoh Sekolah Pak-bapak mak gun tak pasrah ke embuk’en meloloh gebei adidik anak. Mak le pade tanggung jawab. Degik pas adidik tak padeh antara pak bik embuk. Embuk’en tak nokol, tapeh pak’en nokol kan pas tak padeh.*”

(Sekolah Ibu saja tidak cukup. Selain itu, juga butuh diadakan Sekolah Bapak agar tidak hanya pasrah kepada istri untuk mengasuh anak-anak. Nanti kalau tidak sama-sama mengikuti sekolah, maka akan tidak sama pola asuh antara bapak dan ibu. Sebagai contoh, ibu sudah tidak memukul dalam mengasuh anak, tetapi bapak masih memukul.)

“Kuleh bingung tak biasah kedibik adidik nak-kanak. Ebok’en nak-kanak mangkat ke luar negeri. Boleh bede Sekolah Pak-bapak?”

(Saya bingung, tidak biasa sendiri mengasuh anak-anak. Ibunya anak-anak berangkat kerja ke luar negeri. Kapan ada Sekolah Pak-bapak?)

Permintaan dua orang laki-laki untuk bersama-sama melaksanakan Sekolah Pak-bapak.

Sekolah Pak-bapak menjadi penting karena banyak suami ditinggal istri keluar Ledokombo untuk mencari nafkah. Pada umumnya mereka kurang siap untuk mengasuh anak dan mengelola keluarga. Sekolah Pak-bapak masih tergolong baru berjalan. Masih belum terorganisir

dengan baik dan belum tersedia modul. Kegiatannya dilaksanakan setiap dua minggu bersamaan dengan arisan bapak-bapak. Materi untuk sekolah bapak-bapak masih seputar penyeimbangan peran bapak dan ibu dalam keluarga serta fase perkembangan psikologis anak.

Ternyata dua sekolah masih tak cukup. Masyarakat meminta Sekolah Yang-eyang juga.

Sekolah Yang-Eyang bertujuan melakukan pengasuhan terhadap cucu yang lebih baik. Sekolah yang juga tergolong baru ini berkembang dengan pesat. Semangat mereka luar biasa dalam menjadi teman berjuang untuk Ledokombo. Komunitas lansia yang berawal dari kegiatan senam dan pengajian, beberapa

**Sekolah
Bok-ebok:
Menjadi ibu
pembelajar**





waktu belakangan ini secara mandiri membuat kurikulum pembelajaran untuk Sekolah *Yang-eyang*. Kesehatan keluarga dan pengasuhan cucu yang lebih baik adalah isu utama dalam pembelajarannya.

Pengasuhan bersama ini dilengkapi dengan sebuah upaya pengasuhan lintas batas dengan menciptakan keterhubungan antara orang tua di rantau dengan anak mereka, serta jejaring pengasuhan bersama di desa melalui berbagai alat komunikasi masa kini. Jika sang anak belum memiliki alat tersebut, misalnya telepon genggam, maka pendamping dan atau tokoh masyarakat aktif menjadi jembatan dalam pengasuhan jarak jauh ini. Mereka menghampiri rumah si anak dan meminjamkan telepon genggamnya.

Kini mereka bisa saling bercerita tentang banyak hal. Bicara tentang keseharian di kampung dan di rantau, serta soal keberlanjutan pendidikan anak yang dulunya tidak terlalu diperhatikan

karena penghasilan yang didapatkan dipakai untuk kegiatan konsumtif, seperti membangun rumah dan membeli barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor sebagai simbol keberhasilan.

Pengasuhan bersama dengan pendekatan budaya yang dirintis anak-anak, kini berkembang menggerakkan kepedulian banyak pihak. Salah satunya untuk berpartisipasi dalam melakukan perubahan kebijakan yang ramah anak dan perempuan yang hasilnya adalah Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan anggota keluarganya asal Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, serta melibatkan anak-anak dan perempuan secara aktif dalam musyawarah Desa Summersalak hingga Kecamatan Ledokombo sejak tahun 2015.

Sejak 2016, Pemerintah Desa Summersalak mengalokasikan dari dana desa untuk kegiatan pemberdayaan anak dan perempuan.



Prestasi dari Collaborative Parenting

Buah pengasuhan bersama nampak jelas dari jejak tumbuh kembang Ryan dan Nunung.

Sejak usia 11 tahun, Ryan aktif dalam gerakan budaya khususnya bermain perkusi bersama dengan teman-temannya di komunitas Tanoker. Ryan merasakan masa depannya lebih terarah.

“Awalnya saya pemalu. Sekarang, masa depan Ryan lebih terarah, lebih percaya diri, banyak pengalaman. Ini semua karena belajar bersama banyak orang dan punya kesempatan tampil di mana-mana. Ini tidak hanya dirasakan Ryan saja, tapi juga teman-teman,” ungkapinya dalam perbincangan bersama penulis.

Keahlian bermain perkusi ditransferkan kepada teman-teman sebayanya, baik di lingkungan sekolah maupun di Kecamatan Ledokombo.

Begitu juga Nunung. Telah banyak prestasi yang digenggamnya terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris yang dipelajarinya melalui kampung wisata belajar yang diinisiasinya bersama anak-anak Ledokombo saat usianya masih 12 tahun.

(atas) Sekolah Pak-bapak: Berbagi, membimbing, mengasuh bersama

(Kiri) Sekolah Yang-eyang: Semangat tak pernah uzur

“Berkat anak-anak dengan egrangnya, Ledokombo dikenal banyak orang. Banyak orang dari luar negeri datang ke Ledokombo, ingin belajar bareng anak-anak. Aku paling suka ini. Bisa belajar langsung sama *native speaker*-nya,” jelas Nunung sambil mengenang masa lalunya.

Nunung makin peka terhadap lingkungan sekitarnya. Segala hal positif dan negatif yang ia temukan di Ledokombo, disaringnya. Ia bertekad menjadi perempuan tangguh dan bermanfaat untuk banyak orang agar dapat membahagiakan orang tua, terutama ibunya yang berjuang untuk keluarga. Ibunya selalu menyemangati setiap hari, sekitar 20 menit melalui telepon genggam.

Pengalamannya dengan sang ibu membuatnya peduli terhadap APM lainnya.

Saat ditanya, “Apa tipsmu untuk APM?”

Nunung yang hobinya membaca dan menonton film berbahasa Inggris ini mengatakan, “Tips untuk teman-temanku seperjuangan (APM), *build a strong parent and child bond*, membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, jangan pernah putus komunikasi, jadikan orang tua sebagai sahabat, bangga sama orang

PENGASUHAN BERSAMA DENGAN PENDEKATAN BUDAYA YANG DIRINTIS ANAK-ANAK, KINI BERKEMBANG MENGERAKKAN KEPEDULIAN BANYAK PIHAK



Anak dan perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Ledokombo: Suara kami menentukan

tua, jangan minder karena orang tua kita sebagai pekerja migran. Buatlah target untuk masa depan, ajak diskusi orang tua apa yang dicita-citakan untuk anaknya dan ceritakanlah apa yang menjadi cita-cita kalian. Tetap berada di lingkungan yang mendukung karena teman adalah sekolah kehidupan.”

Tak hanya Nunung yang peduli APM, empati juga terawat dalam diri anak-anak lainnya. Beberapa anak sering kali ikut keluarganya datang ke Sekolah *Bok-ebok* dan mendengarkan materi migrasi aman. Mereka kemudian melaporkan kepada orang tua, fasilitator Sekolah *Bok-ebok*, dan guru mengaji ustaz atau ustazah jika ada tetangga yang hendak bekerja ke luar negeri atau mengetahui ada anak-anak yang mengalami masalah, termasuk APM.

Salah satunya Melly Agustin, 15 tahun.

“*Bu guru, tatanggehnah kuleh ampon mangkat ka luar negeri. Je’ kuleh tak olle le ngabele ka empean*” tandasnya kepada Siti Latifah yang

merupakan guru mengajinya dan salah satu fasilitator Sekolah *Bok-ebok*.

(Bu Guru, tetangga saya sudah berangkat ke luar negeri. Saya tidak boleh memberikan kabar ini ke Bu Guru).

Laporan dari anak inilah yang kemudian menjadi pembahasan dalam Sekolah *Bok-ebok* untuk mengatur strategi menginformasikan tentang migrasi yang aman dan benar atau solusi mengatasi permasalahan anak. Jika waktunya mendesak, fasilitator Sekolah *Bok-ebok* atau ustaz dan ustazah menghampiri dan memberikan edukasi terhadap orang yang bersangkutan.

Ledokombo menorehkan cerita, menggambarkan realitas bahwa perubahan bisa terjadi dari mana saja, termasuk dari desa yang dimotori oleh anak-anak dengan percaya pada mereka, memberikan ruang, peluang dan pendampingan. Anak-anak telah menginspirasi dan menggerakkan orang dewasa, masyarakat, dan pemerintah untuk belajar.



COLLABORATIVE PARENTING

FORUM ANAK



MEMILIH TINGGAL DI DESA

SEKOLAH PENGASUHAN BERSAMA



KETERAMPILAN KULINER



HOMESTAY



PERLINDUNGAN TKI & ANAK



MUSRENBANG DESA

HINGGA KABUPATEN

LASKAR PED

Oleh Rambu W. Lodang
Yasalti, Sumba Timur.



DULI LAI HAU





Penampilan Forum Anak Impian Kasih pada saat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkunjung ke Desa Lai Hau

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai provinsi yang paling banyak menghasilkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2016 menyatakan, dari 1,3 juta TKI ilegal dari Indonesia, sekitar 60 persennya berasal dari NTT dan sebagian besar adalah perempuan.

Ini membuat pekerja migran NTT menjadi pekerja yang rawan mengalami kekerasan. Tak hanya itu, keluarga yang mereka tinggalkan harus menghadapi suasana baru, hidup tanpa seorang ibu. Mereka harus hidup bersama ayahnya, kadang dengan neneknya, tantenya, bahkan harus tinggal di rumah tetangganya.

Di Desa Lai Hau, Kabupaten Sumba Timur, anak pekerja migran (APM) mengalami beragam persoalan. Ada sekitar 85 anak pekerja migran di desa ini. Rata-rata mereka berumur 5-17 tahun.

Hidup menjadi tidak mudah bagi para APM. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka harus menjadi pekerja anak, bekerja menjadi buruh tani.

“MAMA SUDAH KURANG LEBIH 3 TAHUN BEKERJA DI MALAYSIA, KAK. SEJAK SAYA BERUMUR 10 TAHUN. MAMA PERNAH PULANG SEKALI, DUA MINGGU LAMANYA UNTUK MENJENGUK KAMI, TETAPI KEMBALI LAGI KE MALAYSIA KARENA TERIKAT KONTRAK DENGAN MAJIKAN.”

Anton masih 13 tahun, kelas 1 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lewa.

Namun, di saat yang sama, mereka juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan jika lebih tua, mereka harus mengasuh adik-adiknya, menggantikan sebagian peran orang tua mereka.

Salah satunya dialami Anton. Anton masih 13 tahun, kelas 1 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lewa. Ia mengaku jarang belajar. "Sebenarnya saya jarang belajar. Kalau pulang dari sawah begini kadang saya capek sehingga saya tidak sempat lagi untuk belajar. Kadang kalau saya ke sekolah juga jarang, Kak, apalagi pas musim tanam. Saya jadi buruh tani di sawah tetangga dengan upah Rp 65.000,- per harinya."

Anton dan adik perempuannya yang berumur 8 tahun, Yetty, saat ini tinggal dengan neneknya, Konga Wandal yang usianya 68 tahun. Ia sudah menjanda lama. Sebelumnya mereka tinggal berenam sebelum salah satu anak perempuannya bekerja di luar negeri.

Neneknya juga mengurus anak perempuannya yang disabilitas daksa, tidak bisa berjalan sejak lahir. Ibu Anton, Anawulang, sejak 3 tahun lalu bekerja di Malaysia. Kadang-kadang ibunya berkiriman uang. Nenek menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga serta membayar sekolah Anton dan adiknya yang sekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bapaknya bekerja menjadi sopir ojek. "Uang hasil ojek hanya untuk tambah-tambah, belum lagi kebutuhan bapak merokok," tambahnya.

"Mama sudah kurang lebih 3 tahun bekerja di Malaysia, Kak. Sejak saya berumur 10 tahun. Mama pernah pulang sekali, dua minggu lamanya untuk menjenguk kami, tetapi kembali lagi ke Malaysia karena terikat kontrak dengan majikan. Selama ini, kadang-kadang saja kami bicara dengan mama. Paling banyak nenek dan bapak yang ngobrol



Aprilani Pandahuki, Laskar Peduli Anak Pekerja Migran di Desa Lai Hau

dengan mama. Mama hanya bertanya tentang keadaan kami melalui nenek dan bapak: Apakah kami sehat? Apakah kami rajin ke sekolah? Kehidupan kami tidak menunjukkan sebuah keluarga yang utuh. Kadang nenek saja yang selalu memperhatikan kami. Bapak kalau sudah capek dari mengojek, hanya minum kopi, makan, dan tidur tanpa bertanya apakah kami sudah makan, bagaimana di sekolah, apakah ada PR, dan lainnya."

Desa Lai Hau berada di bagian utara Sumba Timur. Sebenarnya desa ini memiliki wilayah pertanian yang cukup luas. Luasan sawahnya mencapai 5 ha. Namun sawah tadah hujan ini hanya bisa ditanami setahun sekali pada Desember-Maret.

”SEJAK SAAT INI, JIKA ADA ORANG YANG Mencari TENAGA KERJA, HARUS MENUNJUKKAN SURAT ASLI DENGAN TANDA TANGAN DAN CAP BASAH DARI DINAS.”

Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan

Mereka masih kesulitan untuk mendapatkan biaya mendanai pendidikan dan kebutuhan lainnya. Namun pendidikan yang rendah membuat tak banyak pekerjaan tersedia. Tak ada pilihan selain menjadi pekerja migran.

Saat ini ada sekitar 50 pekerja migran, baik yang bekerja di luar maupun dalam negeri. Sekitar 95 persennya adalah perempuan. Mereka meninggalkan anak-anak yang jumlahnya mencapai 180 orang. Mereka diasuh ayah atau ibu atau kakek atau nenek atau kakek dan nenek atau om atau tante atau om dan tante.

Karena tidak diasuh orang tuanya, pola pengasuhan yang salah mengakibatkan anak-anak dan anak pekerja migran mengalami permasalahan sosial, seperti: banyak anak yang mengkonsumsi minuman keras, merokok, membolos dari sekolah bahkan putus sekolah, ada anak yang hamil di luar nikah, serta mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Situasi yang dialami anak-anak pekerja migran inilah yang membuat Yayasan Wali Ati (Yasalti) bekerja pada 3 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Mereka memperkenalkan Program Peduli.

Namun Yasalti belum mengenal wilayah tersebut. Itulah sebabnya mereka harus “berkenalan dan memahami” tempat mereka bekerja.

Pada Agustus 2016, Yasalti menyelenggarakan lokakarya dan mengundang semua pemangku kepentingan dari tingkat desa hingga kabupaten. Dalam pertemuan ini mereka saling mengenal, mendiskusikan informasi tentang situasi sosial,



ekonomi, politik, dan budaya yang berpengaruh terhadap kehidupan buruh migran, serta mendiskusikan harapan, strategi, dan komitmen bersama yang akan dilakukan ke depan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan dalam pertemuan ini menyampaikan, “Sejak saat ini, jika ada orang yang mencari tenaga kerja, harus menunjukkan surat asli dengan tanda tangan dan cap basah dari dinas.”

Komitmen Kepala Dinas disampaikan mengingat banyak praktik di lapangan, para pencari tenaga kerja suka-suka datang ke kampung dan merekrut orang. Dalam pertemuan ini juga disepakati dibentuknya laskar peduli anak dan anak pekerja migran di desa, biasa disebut Laskar Peduli.

Langkah Yasalti selanjutnya adalah menemukan kader-kader Laskar Peduli. Bagi tim pencari bakat,



**Akta
Kelahiran
bagi anak
dan anak
Pekerja
Migran**

Yasalti mulai menanyakan di sana sini. Mereka mencari orang yang dapat diajak dan dipilih bekerja sama di desa. Orang-orang tersebut bisa laki-laki, bisa juga perempuan, yang memiliki kriteria punya rasa kepedulian atau jiwa sosial dan rela berkorban. Selain itu terdapat kriteria-kriteria lainnya seperti: harus ramah, punya pengalaman, bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Awalnya, belum semua Laskar Peduli yang terpilih memahami isu pekerja migran dan APM yang dikerjakan Yasalti, juga persoalan yang dialami anak-anak pekerja migran.

“Saya baru mendengar kata buruh migran. Selama ini yang saya pahami Tenaga

Kerja Wanita (TKW). Kalau anak-anak pekerja migran di Desa Lai Hau banyak tetapi data anak pekerja migran di desa kami belum ada. Data pekerja migrannya saja juga belum ada,” ujar Aprilani Pandahuki, 26 tahun, seorang Kader Posyandu Lansia di desa saat lokakarya.

Aprilani yang belakangan menjadi bagian Laskar Peduli adalah ibu yang memiliki dua orang anak, laki dan perempuan. Suaminya bekerja sebagai satpam kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Sumba Barat Daya.

Selama ini Aprilani aktif sebagai kader Posyandu lansia yang dikenal gigih. Selama menjadi kader Posyandu, Aprilani merasa hidupnya berarti bagi orang lain. Itu juga menjadi pengalaman berarti karena harus melayani orang tua yang sudah lanjut usia. Selain Aprilani, ada 35 orang kader Laskar Peduli lainnya yang terdiri dari 14 laki-laki dan 22 perempuan. Mereka direkrut pada Oktober 2017 dari 3 desa dan 1 kelurahan dampingan Yasalti.

Dari 36 Laskar Peduli yang direkrut paling banyak adalah perempuan. Perempuan dilihat lebih memahami dan memiliki pengalaman tentang anak, dan lebih sabar menghadapi kelakuan anak dengan karakternya masing-masing.

Mereka berasal dari profesi yang berbeda. Ada yang pendeta, aparat desa dan kelurahan, guru, kader-kader Posyandu, dan orang tua anak pekerja migran.

Pendataan APM diawali dengan menyusun panduan pendataan bersama dengan Laskar Peduli. Kader memahami format yang disiapkan untuk melihat berapa jumlah, apa yang dibutuhkan, bagaimana kondisi mereka, diasuh oleh siapa saat ini, dan lainnya.

Pendataan pun dilakukan Aprilani dan teman-teman Laskar Peduli lainnya, didampingi staf program Yasalti. Dari hasil pendataan anak pekerja migran di 3 desa (Watu Hadang, Patawang, dan Lai Hau)

dan 1 Kelurahan Lumbu Kore, ada 180 orang anak pekerja migran yang terdiri dari 93 laki-laki dan 87 perempuan. Khusus di Lai Hau ada 85 orang yang terdiri dari 45 laki-laki dan 40 perempuan.

Anak-anak pekerja migran memiliki persoalan yang sangat mendasar. Kalau mau masuk sekolah mereka tidak punya akta lahir asli. Kalau mau dapat beasiswa, tak punya akta lahir. Kalau mau buat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), tidak memiliki akta lahir, dan lain sebagainya.

Dari data yang diambil Laskar Peduli, diketahui anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 96 orang anak yang terdiri dari 48 laki-laki dan 48 perempuan. Di Desa Lai Hau ada 43 orang anak pekerja migran yang belum memiliki akta kelahiran yang terdiri dari 21 laki-laki dan 22 perempuan.

Dari data inilah Laskar Peduli mengunjungi para orang tua anak dan pengasuh. Kader memberi pemahaman kepada mereka tentang pentingnya anak memiliki akta kelahiran sekaligus membantu orang tua anak dan pengasuh menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Kartu Keluarga, surat keterangan kenal lahir dari desa, dan dokumen dasar lainnya.

Ternyata saat turun ke lapangan, Laskar Peduli menemukan fakta tambahan. Ada sekitar 87 anak lainnya yang juga belum memiliki akta kelahiran.

Setelah melakukan pendampingan sejak November 2017-Januari 2018, Laskar Peduli berhasil membantu keluarnya 119 akta kelahiran dari Desa Lai Hau, sekitar 17 di antaranya adalah akta kelahiran milik anak pekerja migran.

Data yang dikumpulkan Laskar Peduli ternyata mendorong berbagai pihak untuk bergerak dan peduli kepada anak-anak, khususnya anak-anak pekerja migran. Instansi-instansi pemerintah menggunakan data mereka untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat, khususnya keluarga pekerja migran. Salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Waingapu untuk memberikan kartu jaminan kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi anak pekerja migran.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tak mau ketinggalan, mereka memberikan layanan akta kelahiran bagi anak dan anak pekerja migran.

Situasi ini mendorong Pemerintah Desa bersedia mengalokasikan dana bagi anak dan anak pekerja migran.

Akhirnya, lembaga gereja juga tak mau kalah. Lembaga Peruati melalui Kelas *Disciples* Remaja (KDR) dan Kelas Tumbuh Bersama (KTB) memberikan bantuan peralatan sekolah bagi anak pekerja migran di Kelurahan Lumbu Kore.

Tantangan Perempuan Laskar Peduli

Sebagai perempuan, Aprilani dan perempuan lainnya dalam Laskar Peduli memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tantangan berbeda ini bisa berasal dari keluarga, dari tetangga, orang tua, anak dan anak pekerja migran, bahkan dari sesama Laskar Peduli. Perempuan yang sudah menikah seperti Aprilani juga memiliki tantangan sendiri, salah satunya dukungan sang suami. Kepercayaan dan dukungan suaminya sangat membantu dalam mengembangkan diri sebagai perempuan meskipun dia kerap digunjingkan oleh tetangga-tetangganya.

“Pendataan dari pagi sampai sore, data apa saja?” begitu kata Apriliani menirukan pertanyaan tetangganya.

Hal serupa dialami Dellyani M. E. Bunga, 57 tahun, Ketua Laskar Peduli Kelurahan Lumbu Kore. Ia dipertanyakan oleh anggota Laskar Peduli lainnya, yang mau bekerja asal diberi uang, insentif, atau honor.

Tantangan lainnya adalah kapasitas Laskar Peduli yang masih minim, apalagi dukungan pemerintah desa untuk kerja-kerja Laskar Peduli Anak Pekerja Migran juga kurang.

Tantangan-tantangan itu dijawab Yasalti dengan menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi Laskar Peduli. Penguatan kapasitas dilakukan



melalui pelatihan dan diskusi sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang hak-hak anak, gender, pengorganisasian, dan advokasi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, lokakarya, pertemuan rutin, asistensi, dan pendampingan.

Koordinasi dan komunikasi terus dibangun Yasalti dan Laskar Peduli untuk mendorong pemerintah desa dan kelurahan aktif terlibat dalam upaya perlindungan anak. Laskar Peduli kini lebih percaya diri terlibat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kelurahan dalam mendorong alokasi dana desa bagi anak dan anak pekerja migran.

Selain itu, mereka juga mengawal penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi legalitas lembaga Forum Peduli Anak dan Forum Anak pada 3 desa dan 1 kelurahan. Di Lai Hau, Aprilani bahkan dipercaya menjadi bendahara Forum Peduli Anak.

**Dellyani
M.E.Bunga,
Laskar
Peduli Anak
dan Anak
Pekerja
Migran
Kelurahan
Lumbu Kore**

Akhirnya SK Kepala Desa dan Lurah terbit. Kini ada harapan baru bagi Laskar Peduli dan Forum Anak. Melalui dukungan Alokasi Dana Desa (ADD), Laskar Peduli membantu memperjuangkan hak anak-anak, mengupayakan pemenuhan hak anak, memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang perlindungan anak, serta membantu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi yang dimiliki masing-masing anak.

Strategi lain yang dilakukan Yasalti untuk mendukung kerja Laskar Peduli Anak dan Anak Pekerja Migran adalah dengan membentuk Forum Anak di Desa Lai Hau pada November 2017. Forum Anak memberi ruang anak-anak dan anak pekerja migran untuk bertemu serta berinteraksi bersama melalui bakat dan potensi yang dimiliki. Peran Laskar Peduli Anak dan



Aprilani Pandahuki Laskar Peduli Anak dan Anak Pekerja Migran sedang berdiskusi bersama Laskar Peduli

Anak Pekerja Migran membantu mengolah bakat dan potensi yang mereka miliki.

Kegiatan demi kegiatan dikembangkan dalam Forum Anak. Anak-anak sering bertemu dan berkreasi bersama melalui tarian, menyanyi, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan untuk membuat produk dari barang-barang bekas. Bersama Laskar Peduli Anak dan Anak Pekerja Migran, mereka lebih terbuka dan menjadi teman untuk saling berbagi, sebagai teman curhat, dan teman yang akan mendengarkan keluhan-keluhan dan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan solusi buat mereka.

Kini anak pekerja migran tidak lagi merasakan kesepian karena ditinggal orang tuanya. Tidak lagi merasa minder karena ada teman-teman yang menjadi keluarga terdekat yang selalu ada dalam duka, dan senang. Perasaan itu, salah satunya dirasakan Fetrinancy.

Fetrinancy (16) adalah seorang anak pekerja migran. Kini dia duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) Lewa Tidahu. Anak ke-3 dari 4 bersaudara yang ditinggal ibunya, Magdalena Mora Ngguna, 3 tahun yang lalu. Ia tumbuh sebagai anak yang pendiam, jarang bertemu dengan teman-temannya karena merasa minder. Kesehariannya hanya seputar sekolah, rumah, dan sawah saat musim kerja sawah.

Nancy, panggilan akrabnya, sering didatangi Aprilani ke rumahnya. Ia diberi penguatan agar tidak terlena dan larut dengan perasaan malu dan minder

dari teman-temannya. Nancy terharu dan tumbuh semangat baru dalam dirinya. Ia merasa ada seorang sosok ibu yang sering memberikan penguatan dan selalu mendukung dia. Akhirnya Nancy bersedia bergabung di Forum Anak Impian Kasih.

“Sebelumnya saya adalah anak yang pemalu. Minder dengan teman-teman lainnya, Tetapi sejak saya bergabung di Forum Anak Impian Kasih, saya menjadi lebih percaya diri untuk berbicara, saya bisa mengenal banyak teman. Saat ini saya dipercaya menjadi sekretaris Forum Anak Impian Kasih,” ungkap Fetrinancy.

Forum anak menjadi tempat Nancy berproses bersama anak-anak lainnya, membangun relasi dan interaksi sehingga menjadi anak yang lebih mandiri. Dia dan teman-temannya saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi, sehingga anak-anak yang sebelumnya kurang mendapatkan pengasuhan, kurang mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan pembelajaran dari teman-temannya atau pengasuh-pengasuhnya.

Kini Nancy lebih ceria dan bersemangat, bahkan berprestasi. Ia terpilih menjadi sekretaris Forum Anak Impian Kasih.

Yasalti bersama Laskar Peduli berharap anak-anak, khususnya anak-anak pekerja migran tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri sehingga mereka bisa berpikir kreatif dan mempunyai mimpi untuk masa depan mereka sendiri, juga keluarga dan untuk membangun Desa Lai Hau dan Sumba Timur.



KOLABORASI CSO & KADER



IKUT DALAM PERENCANAAN DESA



ADVOKASI





WAHANA BELAJAR ANAK UMMA PANDE

Oleh Imelda Sulis Seda
YPK Donders, Sumba Barat Daya



DI HAMPARAN WILAYAH YANG TERHAMBUR KUBANGUN SEBUAH GERAKAN UNTUK MASA DEPAN ANAK DI SITU ADA JUGA MOTIVASI. DI SITU JUGA ADA HARAPAN. ITULAH DIA UMMA PANDE UMMA PANDE BAWALAH DIRIKU DAN LANGKAHKU YANG CILIK DAN CERDAS

Puisi Novi, anak pekerja migran (APM) Desa Wee Limbu, anggota Komunitas Umma Pande.



Wee Limbu ‘air mengalir dari batu-batu’, sebuah desa yang jaraknya hampir satu jam dari ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya Wee Teebula, yang artinya air yang keluar dari tempayan batu. Hampir semua nama-nama tempat di Pulau Sumba berhubungan dengan air.

Desa Wee Limbu berada di Kecamatan Wewewa Timur. Sekitar 90% warga desa bekerja sebagai buruh tani, baik bertani sawah maupun ladang. Sisanya menjadi pekerja migran. Pekerja migran dari daerah ini umumnya masih berusia muda. Mereka yang belum menikah, atau baru 1 sampai 3 tahun menikah. Mereka yang sudah menikah biasanya memiliki 1 atau 2 orang anak yang usianya mencapai 1 hingga 13 tahun.

Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, kebanyakan pekerja migran dari Sumba Barat Daya memutuskan berangkat ke luar daerah maupun luar negeri dikarenakan utang adat. Utang yang ditanggung karena tuntutan adat, seperti membayar biaya mahar yang jumlahnya sangat besar untuk pernikahan, biasa disebut *belis* atau untuk biaya kematian yang disebut *ke'dde*.

Ritual kematian menjadi sesuatu yang sangat mahal secara adat di Sumba, terutama saat akan dilakukan penguburan dan pemindahan kerangka orang yang sudah meninggal atau menggali kerangka untuk dipindahkan ke kampung adat. Upacara yang biasa disebut Makawera atau Saiso ini membutuhkan hewan persembahan untuk para leluhur dalam jumlah cukup besar. Dalam setiap upacara, dibutuhkan sekitar 7 - 10 ekor kerbau. Satu ekor kerbau harganya bisa mencapai 15 hingga 20 juta rupiah. Artinya, tiap ritual kematian membutuhkan setidaknya 140 juta rupiah hanya untuk hewan persembahan.

Biaya pernikahan di Sumba juga tak kalah mahal. Belis pernikahan jumlahnya beragam, tergantung kepada tinggi rendahnya derajat keluarga bersangkutan secara adat. Keluarga biasa membutuhkan biaya belis mencapai 135 juta rupiah untuk membeli 5 ekor kuda, 5 ekor kerbau, dan 3 ekor babi. Keluarga bangsawan bisa berlipat tiga biaya belisnya.



Inilah alasan kebanyakan orang menjadi pekerja migran di Sumba, khususnya dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Sumba Barat Daya menyatakan bahwa jumlah buruh migran yang pergi ke Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura mencapai 3.270 orang. Sekitar 64,2 % pergi secara ilegal. Akibatnya, mereka rentan mengalami kekerasan baik oleh majikan maupun penyalur mereka ke luar negeri.

Tak hanya para pekerja migran yang rentan mengalami kekerasan, anak-anak mereka yang ditinggal dan dititipkan ke keluarga terdekat juga berpotensi menghadapi banyak masalah yang berujung pada kekerasan.

Mama Agustina Lingü Lango (45), Kader bintang perubahan desa

Anak-anak pekerja migran ini biasanya dititipkan kepada keluarga terdekatnya, misalnya kakek, nenek, om, dan tante. Ada juga yang terpaksa dititipkan kepada tetangganya. Di Desa Wee Lumbu, Yayasan Pengembangan Kemanusiaan (YPK) Donders menemukan 115 anak-anak pekerja migran.

Orang tua sebagian anak-anak ini memiliki status pernikahan yang belum jelas, belum diakui secara adat karena belum melunasi belisnya. Status orang tua ini membuat status anak-anak juga tidak jelas. Orang tuanya tidak mungkin memiliki kartu keluarga, padahal keberadaan kartu keluarga akan berpengaruh terhadap pengurusan akta kelahiran, juga Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat



atau layanan dasar lainnya.

Kesulitan yang dihadapi anak-anak ini berpotensi membawa mereka kepada kekerasan berikutnya.

Agustina Lingüística Lango (45), mama yang tinggal di Wee Limbu menjadi saksi kekerasan yang dialami oleh anak-anak pekerja migran. Anak-anak pekerja migran, menurutnya, kerap mendapat perlakuan atau tekanan dari 'keluarga baru'nya, mulai dari umpatan kasar, bahkan ada yang mendapatkan pukulan.

Hal ini mengakibatkan anak-anak cenderung takut bertemu atau berbicara dengan orang lain. Mereka juga sulit belajar karena waktunya habis untuk bekerja di kebun, mengambil kayu, dan menjaga ternak.

Prestasi belajar di sekolah cenderung menurun. Di desa tetangga, Desa Wee Kokora dan Mawo

Kegiatan rutin anak daur ulang plastik menjadi kerajinan tangan dalam bentuk tas, tempat ponsel didampingi oleh kader anak

Dana, anak-anak pekerja migran bahkan mengalami pelecehan seksual dari keluarga yang mengasuhnya, yaitu om dan kakeknya.

Situasi ini membuat Agustina prihatin. Rasa kasihan mendorongnya mengunjungi anak-anak tersebut di rumahnya, hanya untuk sekedar mengobrol dan menghibur mereka. Kepedulian ini membawanya bertemu dengan YPK Donders saat lembaga ini melakukan kajian cepat tentang situasi anak-anak buruh migran pada Juni 2015.

Belakangan, YPK Donders mengajaknya bergabung menjadi kader.

Bersama empat kader lainnya di Desa Wee Limbu, Agustina mengikuti pelatihan-pelatihan



“KAMI MENYUMBANG INI UNTUK ANAK-ANAK KARENA MEREKA JUGA ANAK-ANAK SAYA. KAMI MAU ANAK-ANAK INI MENJADI LEBIH BAIK DAN MENJADI CONTOH BUAT ANAK-ANAK LAINNYA.”

Erna Erisa Hoar

yang diselenggarakan YPK Donders, seperti pelatihan anak, kepemimpinan, pengasuhan (*parenting*), hak anak, dan pengorganisasian. Pelatihan-pelatihan ini membuatnya mampu membangun komunikasi dan hubungan yang lebih luas dengan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa.

Yayasan Donders menyamakan kader-kader desanya seperti sinar-sinar yang akan membawa perubahan. Itulah sebabnya mereka menyebut diri sebagai Kader “Bintang Perubahan”. Kader-kader inilah yang melakukan pendekatan multipihak dengan mendatangi dan mengajak diskusi semua pihak untuk bekerja sama dan peduli terhadap nasib anak-anak pekerja migran. Pihak-pihak yang bekerja sama ini termasuk orang tua asuh, tokoh adat dan tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah desa.

Diskusi-diskusi ini membuat mereka memahami kebutuhan anak-anak pekerja migran terhadap ‘ruang’ untuk saling bertemu dengan anak-anak lainnya, sehingga mereka tidak lagi distigma sebagai anak yang tak punya orang tua. Anak-anak ini juga membutuhkan ruang belajar dan berkreasi serta mengenal seni dan adat mereka. Mereka juga membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang hak-hak dasar anak dan keberanian menyampaikan pendapat, juga pelatihan untuk pengembangan bakat dan minat.

Pemahaman terhadap kebutuhan ini melahirkan gagasan bersama untuk menyediakan fasilitas bertemu dan belajar bagi anak-anak pekerja migran yang mereka sebut sebagai Umma Pande.

Umma di tanah Sumba bermakna rumah. Jika rumah biasanya hanya menjadi tempat tinggal, *umma* bagi masyarakat Sumba memiliki fungsi sebagai tempat orang berkumpul dan bermusyawarah untuk pengambilan keputusan. *Umma* adalah simbol kebersamaan dan solidaritas. *Umma* di Sumba memiliki dua pintu. Pintu sebelah kanan biasa disebut sebagai pintu bapak dan sebelah kiri pintu ibu. Simbol ini menunjukkan nilai harmoni bahwa perempuan dan laki-laki saling membutuhkan.

Pande dalam bahasa Indonesia bermakna pintar atau cerdas. Harapan paling besar terhadap Umma Pande adalah bisa menghasilkan buah-buah kebaikan, menghasilkan nilai-nilai kecerdasan bagi anak-anak dengan tetap berpijak pada kearifan lokal yang menjadi basis gerakan kemanusiaan.

Umma Pande yang dibangun di Dusun Satu, Desa Wee Limbu, adalah hasil gotong royong dan sumbangan nyata masyarakat terhadap masa depan anak-anak pekerja migran. Rumah yang memiliki luas 63 meter persegi ini dibangun dari hasil sumbangan 25 keluarga. Ada

yang menyumbang kayu dan bambu, ada yang menyumbang uang tunai, memberikan material bangunan, menyumbang makanan, bahkan menyumbang tenaganya untuk bekerja bergotong royong. Rumah berbentuk menara seperti rumah adat Sumba pada umumnya ini selesai dibangun dalam waktu 90 hari.

Rumah yang semua dinding dan lantainya dibuat dari bambu ini berdiri di atas tanah seluas 525 meter persegi. Umma Pande memiliki halaman yang cukup luas untuk digunakan berkegiatan oleh anak-anak. Mereka bisa berkebun, belajar, dan bermain di sana.

Tanah untuk rumah ini disumbangkan oleh Erna Erisa Hoar, mama berusia 43 tahun. Ia juga salah satu kader Bintang Perubahan.

“Kami menyumbang ini untuk anak-anak karena mereka juga anak-anak saya. Kami mau anak-anak ini menjadi lebih baik dan menjadi contoh buat anak-anak lainnya,” ujar Erna Erisa Hoar tentang alasannya menghibahkan tanahnya secara cuma-cuma.

Kini, setiap jam 3 hingga jam 5 sore, Umma Pande selalu ramai dan riuh dengan suara anak-anak berkumpul, bermain, dan menari. Kini anak-anak memiliki tempat belajar menulis, menggambar, membuat kerajinan-kerajinan tangan, menari, menyanyi, berpuisi, dan berpidato.

Siapa yang melatih mereka? Mereka dilatih oleh tetua adat, orang tua mereka, para kader Bintang Perubahan, relawan dari luar Sumba, dan staf YPK Donders.

Umma Pande menjadi tempat anak-anak mengenal pola dan tata cara bertani yang ramah lingkungan. Mereka berpraktik membuat pupuk cair dan pupuk padat organik menggunakan organisme lokal yang dikenal dengan teknologi *Effective Microorganism* (EM4). Bahan dasar pupuk ini berasal dari kebun warga.

Kehadiran Umma Pande memberikan pengaruh besar terhadap upaya-upaya berbagai pihak terhadap perlindungan anak-anak pekerja migran. Umma Pande juga mendorong kemajuan para kader Bintang Perubahan dan juga peran pemerintah desa serta tokoh adat.

Di Umma Pande, para kader mengumpulkan



kaum perempuan, anak muda, dan para tokoh masyarakat untuk mendiskusikan tak hanya masalah pekerja migran, tapi juga permasalahan-permasalahan di tingkat desa lainnya dan mencari solusinya.

Sejak itu, jumlah anggota komunitas dan kader terus bertambah. Jumlah kader Bintang Perubahan yang pada awalnya hanya 5 orang, saat ini menjadi 10 orang. Meningkatnya jangkauan dan peran-peran kader ini mendorong lahirnya komunitas-komunitas belajar anak di dusun-dusun. Mereka memiliki jadwal belajar secara bergantian di Umma Pande.

Perkembangan yang tidak kalah penting yang muncul sejak berdirinya Umma Pande adalah



mendorong perempuan di desa mulai aktif dengan usaha-usaha ekonomi produktif. Mengolah bahan pangan lokal menjadi menjadi makanan yang bisa dijual. Kue-kue dari bahan ubi, singkong, pisang, dan labu yang dibuat oleh para mama sekarang mulai dikenal. Mereka bahkan mendapat pesanan untuk menyediakan konsumsi rapat desa.

Selain itu, mama-mama juga semakin aktif dan terlibat dalam pertemuan di tingkat desa. Mereka mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan berani mengeluarkan pendapat pada saat pertemuan di forum desa.

Umma Pande sebagai pusat dasar pelayanan sosial dasar bagi warga Desa Wee Limbu.

Keberadaan Umma Pande juga memberi keyakinan dan harapan baru bagi masyarakat dan pemerintah desa. Mereka mulai memperhatikan para keluarga pengasuh anak-anak pekerja migran. Sepuluh keluarga mendapat bantuan masing-masing sepasang ternak kambing pada 2017. Tahun ini, bantuan kembali diberikan pada sepuluh keluarga yang berbeda.

Pemerintah juga menyediakan dana insentif bagi para kader Bintang Perubahan yang jumlahnya mencapai sepuluh orang. Setelah mereka mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, tiap orang mendapat dana sebesar 300 ribu rupiah



setiap 3 bulan, sesuai jadwal pencairan Anggaran Dana Desa (ADD).

Kerja sama antara para kader dan pemerintah desa juga semakin erat. Dibuktikan oleh keluarnya 80 Kartu Keluarga, 100 buah akta kelahiran, 10 Kartu Indonesia Sehat, dan 100 Kartu Indonesia Pintar yang diajukan para kader.

Umma Pande juga memicu lahirnya gagasan baru dari warga, anak-anak, dan pemerintah desa untuk mendirikan fasilitas Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Peduli pada April 2018. Keinginan mendirikan PAUD didorong karena banyaknya anak-anak usia 2 hingga 4 tahun yang belum bisa belajar.

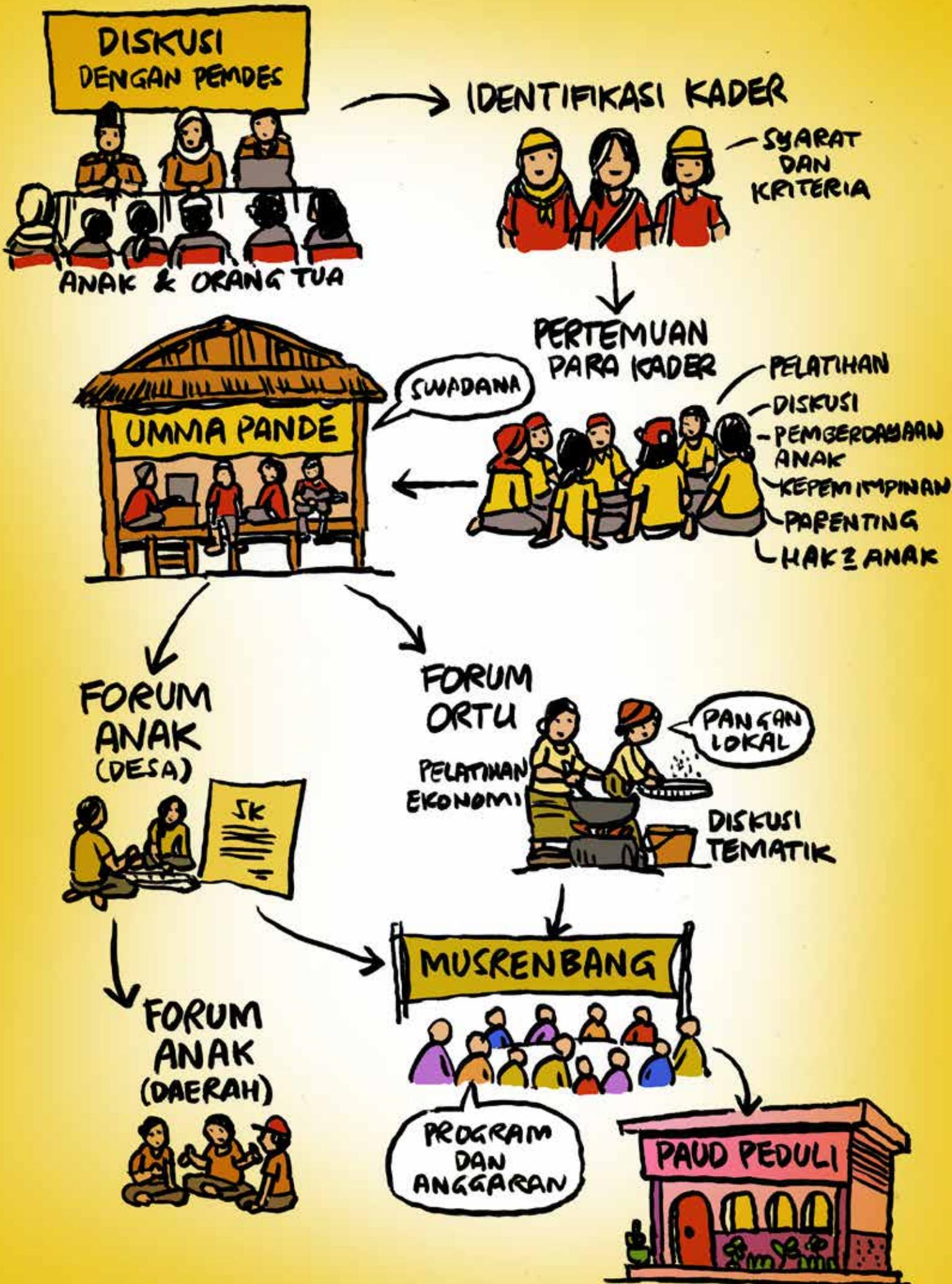
Perkembangan yang terjadi bersama hadirnya Umma Pande membuat para tokoh adat Desa Wee Limbu bangga. Seperti yang diungkapkan oleh Agustinus Ndamalero, “*Umma* Pande merupakan

Agustinus Ndamalero tokoh masyarakat salah satu penggagas pembangunan Umma Pande

hal penting bagi kami orang tua. Umma menjadi simbol budaya yang hampir dilupakan. Kami bangga anak-anak dapat belajar tentang simbol kekayaan Sumba. Sebab dengan begitu mereka tak melupakan identitas Sumba. Rumah ini juga menjadi tempat membangun kerja sama antara anak-anak pekerja migran dan anak-anak lainnya di desa.”

Umma Pande menjadi simbol harapan bagi anak-anak pekerja migran dan anak-anak Desa Wee Limbu lainnya. Para kader Bintang Perubahan yakin, bersama Umma Pande akan tumbuh generasi yang cerdas, kreatif, dan mandiri, yang akan berbuat untuk Pulau Sumba.

Seperti penutup puisi yang dibaca Novi, “Untukmu Sumba aku berdiri di sini”.





POLA PENGASUHAN APM DI DESA PURWODADI

Oleh Zuhro Rosyidah
LP3TP2A, Malang





KARENA FISIK MEREKA YANG BERBEDA, MEREKA SERING DISEBUT SEBAGAI “ANAK ONTA”

Mi'ut (50), perangkat Desa Purwodadi, mengkhawatirkan warganya yang menjadi pekerja migran, baik di daerah lain atau yang kerja di luar negeri. Selama lima tahun terakhir, ada 432 warganya yang menjadi pekerja migran dan jumlahnya terus meningkat.

Desa Purwodadi berada di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Desa ini ditempuh sekitar 2 jam dari Kota Malang, melewati Bendungan Sengguruh dan jalan hutan yang berkelok-kelok.

Purwodadi terdiri dari 5 Dusun, 10 Rukun Warga (RW), 41 Rukun Tetangga (RT), dan jumlah penduduk sekitar 6.557 jiwa (3.035 laki-laki dan 3.232 perempuan). Jumlah anak yang berusia 14 tahun ke bawah sebanyak 1.128 anak.

Sebagian besar warga, sekitar 2.220 orang, bekerja sebagai petani. Mereka mengelola lahan



**Mi'ut, tokoh
relawan
pemilik
TPQ di Desa
Purwodadi**

seluas 12.777 ha, namun 96% lahan tersebut adalah lahan kritis atau tidak subur. Inilah yang membuat banyak warga Desa Purwodadi memilih bekerja ke luar desanya, walau mereka tidak tercatat dalam profil desa.

Kegelisahan Mi'ut lebih kepada anak-anak para pekerja migran yang ditinggalkan di desa. Pada pendataan terakhir, jumlah Anak Pekerja Migran (APM) telah mencapai 164 anak, 250 persen lebih tinggi dari 5 tahun lalu.

APM tumbuh tanpa dampingan orang tua langsung, kebanyakan diasuh nenek atau kakek. Ini menimbulkan permasalahan sosial akibat salah asuhan karena jauhnya jarak generasi mereka.

Tak hanya itu, APM dianggap masyarakat sebagai biang masalah, tidak sopan, dianggap centil kalau perempuan, dan suka kebut-kebutan. Anggapan-anggapan buruk semacam itu dianggap hal yang wajar dan membuat APM rentan terhadap kekerasan. Alih-alih mendapat perlindungan, mereka justru dianggap sumber masalahnya.

Lebih parah lagi untuk anak yang lahir ketika ibu mereka bekerja di luar negeri. Karena fisik mereka yang berbeda, mereka sering disebut sebagai "Anak Onta".

Pandangan-pandangan negatif dari masyarakat memberi pengaruh buruk bagi APM. Mereka jadi sering meminta gawai atau motor baru kepada orang tua yang bekerja di luar negeri agar terlihat

keren, bahkan banyak yang mengendarai motor walau belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Mereka juga merasa bahwa pendidikan menjadi tidak penting karena orang tua selalu dapat memenuhi kebutuhan materi mereka.

Mi'ut berhasil memengaruhi warga di sekitarnya. Ia menemukan beberapa orang dengan kegelisahan yang sama. Beberapa memiliki pengalaman mengasuh APM. Beberapa pernah menjadi pekerja migran. Mereka sepakat untuk menjadi tim relawan penanganan APM.

Desa Purwodadi merupakan satu dari tiga desa yang mendapatkan pendampingan Program Peduli, khususnya sub pilar APM. Mi'ut menjadi penggerak Program Peduli melakukan sosialisasi program pendampingan APM kepada masyarakat desanya.

APM yang mendapat kekerasan seksual menjadi perhatian utama. Dalam kurun waktu satu tahun, kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang sudah mendampingi 8 APM, 3 anak berasal dari Kecamatan Donomulyo.

Ironisnya, masyarakat justru menganggap APM yang bersalah dengan tuduhan menggoda pelaku atau karena pergaulan yang salah. Anak-anak dan remaja pun ikut memiliki pandangan serupa dan sering melecehkan APM.

Program Peduli mulai dilakukan Lembaga Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3TP2A) sejak Juli 2017. LP3TP2A memulai programnya dengan melakukan audiensi kepada Bupati Malang dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Audiensi dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan tiga desa terpilih, Desa Kedungsalam, Mentaraman, dan Purwodadi. Satu pokok bahasan yang dibahas adalah cara menangani isu eksklusivitas yang dialami APM.

Hasilnya, Program Peduli mendapat banyak dukungan pemerintah dan ada program pengelolaan keuangan pekerja migran dalam bentuk koperasi di desa. Diskusi-diskusi yang dilakukan juga membuat wawasan tentang isu APM menjadi lebih luas.

Selain bekerja bersama OPD, LP3TP2A percaya bahwa Program Peduli harus menysasar semua kalangan secara simultan, khususnya warga desa. Para relawan direkrut untuk melakukan pendataan desa. Data-data yang didapat, diolah dan dipaparkan di depan pemangku kebijakan pada tingkat kecamatan.

Salah satu sasaran Program Peduli adalah tokoh agama. Mereka diajak memahami eksklusi sosial APM yang harusnya menjadi perhatian para ulama dan bisa diangkat dalam ceramah-ceramah mereka. Selain LP3TP2A, narasumber juga berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang. Cara ini diharapkan membuat para tokoh agama tak ragu memasukkan isu APM dalam ceramah-ceramahnya karena tidak menyalahi aturan dalam berdakwah.

Selain tokoh agama, sasaran penting lainnya untuk mendukung perlindungan APM adalah perangkat desa dan pendamping desa. Kegiatan Lokakarya Inisiasi Inklusi Sosial APM didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dilaksanakan dengan melibatkan pihak kecamatan yang membidangi kesejahteraan sosial serta menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Konsultan Kementerian Desa tingkat Kabupaten Malang. Lokakarya diharapkan menghasilkan kesepakatan tentang alokasi dana khusus untuk anak dalam APBDes, khususnya untuk APM.

Sasaran utama Program Peduli adalah APM pada tiga desa. Mereka membutuhkan sebuah forum untuk saling berdiskusi, melahirkan gagasan, dan berekspresi. Organisasi anak yang membaurkan membaurkan APM dengan non APM. Keanekaragaman peserta dalam forum anak diharapkan mempercepat terwujudnya inklusi sosial di antara anak-anak tersebut.

Tak hanya anak, orang terdekat yang mengasuh si anak juga perlu mendapat perhatian. Inilah yang



melatari lahirnya Sekolah Peduli, sekolah untuk orang tua dan orang tua pengganti APM yang mengajarkan tentang *parenting* atau pengasuhan bagi anak yang jauh dari orang tua.

Sekolah Peduli disesuaikan dengan kondisi keseharian APM, seperti materi bijak menggunakan internet serta mengajarkan orang tua dan orang tua pengganti cara mengantisipasi dan mengatasi kecanduan gawai. Ada juga materi bijak berlalu lintas. Materi tersebut diadakan karena banyak anak menggunakan sepeda motor meski belum memiliki SIM, bahkan anak-anak Sekolah Dasar (SD).

Sebenarnya ujung tombak kegiatan adalah para relawan. Mereka terlibat di semua kegiatan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar lebih mudah melakukan pendampingan.

Mi'ut adalah penggerak relawan. Semula LP3TP2A mengenalnya sebagai Sekretaris Desa Purwodadi. Ia sangat peduli pada permasalahan yang dialami masyarakat. Ia memiliki Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ) yang dikelola secara swadaya sejak 2005 dengan 40 anak didik, 80% nya adalah APM.

Mi'ut pernah menjadi pekerja migran di Malaysia saat masih muda sehingga memahami



Pertemuan relawan di sekretariat LP3TP2A-Peduli Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang

bagaimana kesulitan APM. Tiap *ba'da* Magrib, beliau memberikan ceramah bagi orang tua. Saat anak-anak belajar, ia juga memberikan siraman rohani bagi para orang tua.

Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia sosial, ia banyak mengalami tantangan dari masyarakat. Ajakannya pada orang-orang terdekat untuk peduli terhadap permasalahan APM lambat laun membuahkan hasil. Muncul relawan-relawan yang melakukan pendampingan bagi APM.

Para relawan melakukan pendampingan dengan cara yang berbeda-beda. Maslakah (43), tetangga dekat Mi'ut memberikan les mata pelajaran gratis. Les ini selain menambah pengetahuan akademik APM sesuai dengan mata pelajaran di sekolah, juga menjadi cara untuk memantau dan mendampingi tumbuh kembang APM. Selain memberi les gratis, ia juga mengajarkan keterampilan seperti membuat prakarya dari kain flanel. Banyak APM yang tertarik mengikuti program Maslakah.

Maslakah juga mendampingi salah satu APM yang memiliki kebutuhan khusus atau lambat belajar. APM tersebut berusia 13 tahun dan belum memiliki kemampuan membaca sehingga ia malas sekolah. Tiada henti-hentinya Maslakah mendatangi sekolah agar para guru memberikan perhatian ekstra pada anak tersebut. Ia juga terus membujuknya sekolah. Akibatnya, pihak sekolah kini sangat kooperatif terhadap kondisi APM.

Nur Rohman (29), penggerak di Dusun Sumber Blimbing, menerapkan strategi berbeda. Ia menggunakan seni dalam membimbing APM. Ia mendirikan kelompok Seni Hadrah di Dusun Purworejo Kidul. Jayani (45), ketua Rukun Tetangga (RT), juga ikut membentuk kelompok kesenian tradisional kuda lumping "Jathilan". Itu adalah strategi untuk mengurangi waktu anak bermain gawai dan kebut-kebutan.

Anak-anak juga punya forum tersendiri yaitu Forum Anak Desa Purwodadi. Ketua Forum Anak, Alex Firmansyah (17), mengumpulkan anak-anak APM dan non-APM pada hari Minggu sore untuk melakukan olahraga bersama.

Forum Anak juga memiliki pelajaran tambahan untuk murid kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Forum Anak Desa kini memiliki SK pengesahan dari kepala desa dan dilibatkan dalam kegiatan forum anak di tingkat kabupaten dan kecamatan.

LP3TP2A menyadari bahwa relawan merupakan ujung tombak pendampingan bagi perlindungan APM dalam Program Peduli. Para relawan dilibatkan dalam semua kegiatan, khususnya penguatan kapasitas dan peningkatan pemahaman mereka terhadap Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Para relawan juga memiliki forum pertemuan bulanan untuk membahas permasalahan tumbuh kembang anak APM dan mengevaluasi kegiatan yang sudah



Olahraga mingguan yang digagas oleh Forum Anak Desa Purwodadi



Mengantar anak ke sekolah menjadi kebiasaan baru warga Desa Purwodadi

berjalan serta rencana bulan berikutnya. Kadang, jika diperlukan dalam pertemuan, diundang narasumber yang kompeten sehingga para relawan bisa berdiskusi dan menimba pengetahuan dengan leluasa.

Relawan juga mendapat kesempatan untuk belajar dari organisasi atau wilayah lain. Saat Festival *Egrang* VIII di Tanoker, relawan juga pergi ke sana dan belajar cara pendampingan APM.

Sejak adanya Program Peduli, banyak perubahan yang terjadi di desa. Ponisri (61), nenek yang mengasuh 4 cucu dari tiga anaknya yang bekerja di luar negeri, merasa sangat terbantu dengan adanya Sekolah Peduli. Ia sadar telah salah dalam mendidik 4 cucu yang dititipkan padanya. Pelajaran pola pengasuhan di pada Sekolah Peduli sangat membantu dalam memahami cucu-cucunya.

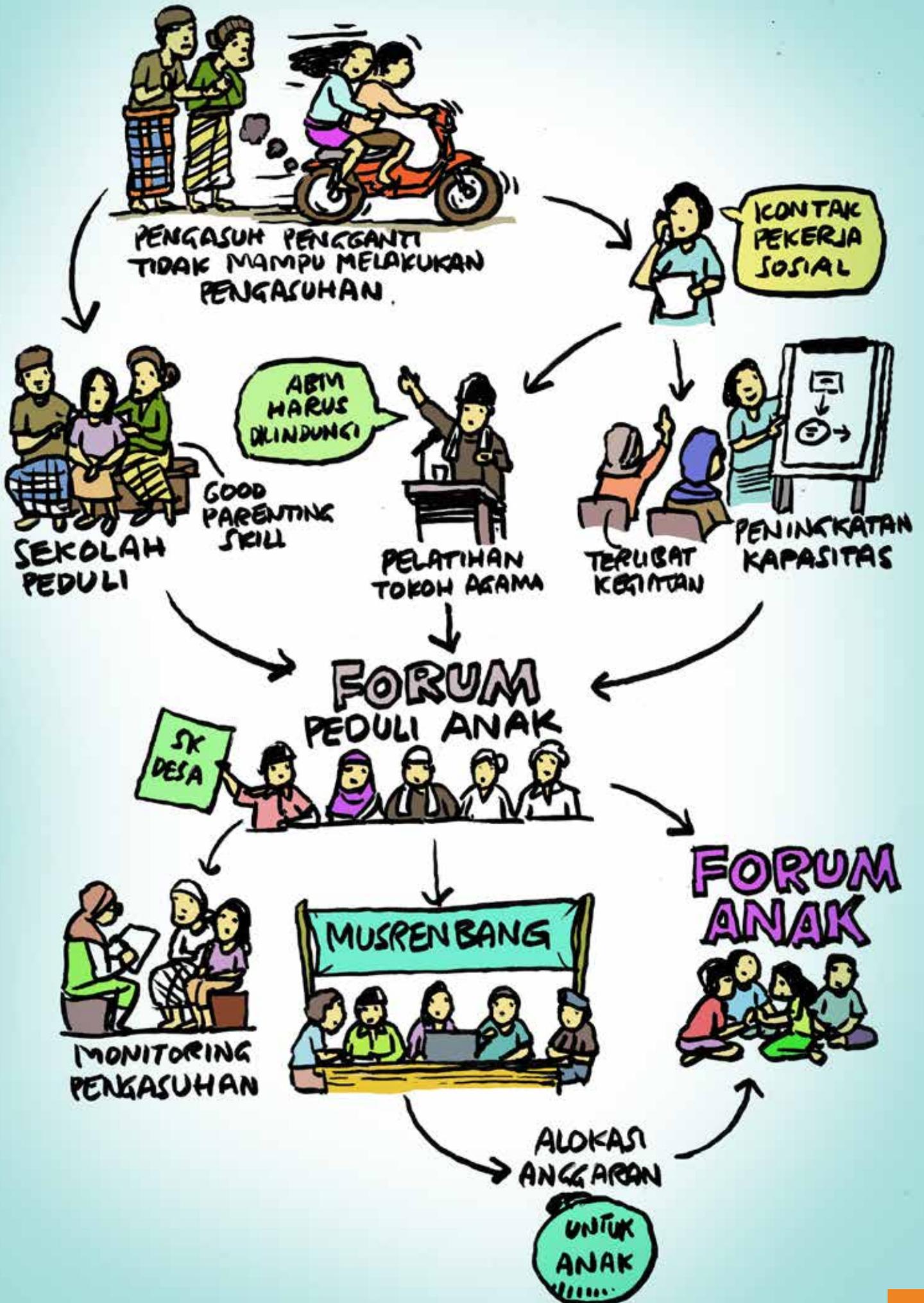
Para orang tua lebih peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Saat ini, banyak orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Dulu, mengantar anak dianggap sesuatu yang mengurangi jadwal kerja mereka. Sekarang, mengantar dan menjemput anak di sekolah sudah menjadi kecenderungan baru di kalangan masyarakat Purwodadi, khususnya bagi mereka yang memiliki anak-anak di sekolah dasar.

Sore hari, anak-anak pergi ke Tempat Pendidikan Agama, sudah tidak kebut-kebutan motor lagi. Mereka lebih rajin belajar dibanding dulu. Pihak sekolah pun lebih terbuka dengan relawan.

Perubahan-perubahan di atas juga mempengaruhi prestasi akademik siswa, khususnya sejak ada pelajaran tambahan yang diberikan para relawan. Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwodadi 4, siswa kelas 6 berjumlah 16 anak dan 3 di antaranya APM. Ketiga APM tersebut mendapat nilai ujian akhir di atas 80, sedangkan nilai tertinggi di SD tersebut 85 dan terendah 74. Prestasi membanggakan untuk sekolah di tempat terpencil.

Pemerintah desa pun menunjukkan dukungannya. APBDes di Desa Purwodadi pada 2018 mengalokasikan 6,5 juta, khusus untuk kegiatan APM. Ini tidak lepas dari peran Kholin (47) relawan dari Dusun Sumber Blimbing yang menjabat sebagai sekretaris Desa Purwodadi.

Keberhasilan-keberhasilan dan kemenangan-kemenangan kecil di atas membuat masyarakat yakin jalan menuju Desa Purwodadi yang Ramah Anak makin terlihat. Mereka yakin Desa Purwodadi dapat menjadi desa inklusi bagi semua anak.





MEREKA YANG TERGUGAH

Oleh Suharti
SANTAI, Lombok



“SAYA BARU TERSADAR BETAPA BERAT BEBAN YANG MEREKA ALAMI SELAMA INI. MEREKA ADALAH ANAK-ANAK YATIM SOSIAL.”

H. Muh. Amin, Wakil Gubernur NTB pada Seminar Gerakan Inklusi Sosial Anak Pekerja Migran, 13-14 Juni 2016 di Mataram.



Anak-anak buruh migran seperti yatim sosial. Bagaimana tidak, mereka hidup jauh dari orang tuanya. Tidak mudah menjadi anak-anak pekerja migran. Anak-anak yang ditinggalkan ini, ada yang masih bayi dan belum genap berusia 1 tahun, ada yang balita, dan ada yang sudah bersekolah.

Dalam waktu seketika, mereka kehilangan kasih sayang, kehilangan teman untuk bercerita, kehilangan sosok yang akan membantu mereka ketika ada persoalan, dan kehilangan orang yang akan melindungi mereka. Peran-peran dan sosok orang tua tersebut kemudian digantikan oleh nenek, kakek, bibi, paman, saudara, bahkan orang lain. Anak-anak ini hidup di bawah pengasuhan ala kadarnya.

Mereka memiliki masalah sosial yang pelik. Pertama, mereka tidak memperoleh pelayanan dasar kependudukan. Kedua, mereka mengalami banyak perundungan oleh kawan-kawan sebayanya maupun oleh masyarakat. Ketiga, mereka tidak memperoleh pengasuhan yang memadai dari orang tuanya. Keempat, perbedaan fisik menyebabkan mereka juga mengalami berbagai kasus tindak kekerasan dan diskriminasi.



**Siti
bersama
ketiga
saudaranya**

Anak-anak pekerja migran yang dibawa orang tuanya dari negara tempatnya bekerja dalam usia balita, mereka belum terlalu merasakan perbedaan dengan temannya, tetapi ketika mereka mulai memasuki sekolah dasar (SD), perbedaan itu mulai terasa. Apalagi ketika mendapatkan perundungan dari kawan-kawan sebayanya, bahkan ada anak yang terpaksa keluar dari sekolahnya karena tidak tahan dan merasa minder.

Situasi-situasi sulit anak pekerja migran ini dialami Siti yang tinggal di Desa Lenek Lauq. Ia terpaksa berhenti sekolah untuk mengurus ketiga adiknya. Keempat bersaudara ini dibawa ibunya dari Arab Saudi ketika masih bekerja di sana. Ayah Siti, menurut pengakuan ibunya adalah orang Pakistan.

Pada usia 15 tahun, Siti harus menggantikan peran orang tuanya. Mulai dari mengurus rumah, memasak, menyediakan kebutuhan sekolah adiknya, serta mengasuh adiknya yang masih balita. Mereka hanya mengandalkan kiriman uang

ibunya dan bantuan dari bibinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tak lama, Abdullah, adik laki-laki Siti yang masih duduk di kelas 5 SD pun menyusul keluar dari sekolahnya. Ia malu karena sering diolok-olok dengan sebutan “Anak Onta” oleh temannya. Ia terpaksa bekerja di sebuah toko kayu di desanya dan kerja serabutan lainnya untuk membantu kakaknya.

Tahun 2017, ibu Siti pulang dari Arab Saudi. Kepulangannya ini bukan tanpa alasan. Kepulangannya karena saudaranya sudah tidak sanggup lagi menjaga Siti dan saudara-saudaranya.

Konsekuensi dari kepulangan ibunya, Abdullah terpaksa mengambil alih tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya dengan menjadi buruh bangunan di Bali.

Siti akhirnya menikah pada usia dini, 16 tahun. Ia menjadi istri kedua laki-laki dari desa tetangga.

Tak berselang lama, Siti mengandung dan melahirkan. Saat ini dia sedang menunggu keberangkatan menjadi pekerja migran ke luar negeri. Dia berencana menitipkan anaknya yang masih balita pada ibunya untuk diasuh.

Beginilah daur lingkaran kemiskinan keluarga pekerja migran yang susah diputus.

Berbeda lagi dengan Ahmad, bocah laki-laki yang saat ini berusia 10 tahun yang tinggal di Desa Wanasaba. Dia dibawa oleh ibunya kembali ke Indonesia saat masih dalam kandungan. Saat itu ibunya menjadi pekerja migran di Malaysia.

Tak lama berselang, ketika usianya masih balita, ibunya kembali lagi menjadi pekerja migran sampai sekarang. Selama ini, Ahmad hidup bersama kakeknya. Ia juga mendapatkan perundungan dari teman sebayanya dan warga sekitar. Namun kakeknya selalu menjadi pembelanya sehingga dia masih tetap bertahan di sekolah.

Itulah sekelumit cerita yang dialami

oleh anak pekerja migran yang mendapatkan stigma di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek (dulu masih Kecamatan Aikmel) dan Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kedua desa ini memiliki hamparan sawah yang hijau. Penduduknya mayoritas menjadi petani dan buruh tani. Sebagian lagi menjadi pekerja migran ke luar negeri seperti Malaysia dan Timur Tengah, maupun dalam negeri seperti Kalimantan, Bali, dan lainnya.

Bekerja di luar negeri adalah salah satu pilihan yang diambil sebagian warga di Desa Lenek Lauq dan Desa Wanasaba maupun desa-desa sekitarnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Alasan yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan tergoda melihat teman dan tetangga yang sudah berhasil. Pada umumnya, masyarakat di desa ini menggunakan uang hasil kerja dari luar negeri untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya.

Dibalik cita-cita mulia yang ingin mereka capai, ternyata ada persoalan yang harus ditanggung anak-anak mereka.

Jika berkunjung ke pedesaan di Lombok, terkadang kita jumpai anak-anak yang wajahnya terlihat berbeda dengan anak-anak di sana pada umumnya. Mereka memiliki paras lebih cantik dan ganteng. Warga desa memanggil mereka “Anak Onta”, “Anak Pakistan”, “Anak Sawit”, atau “Anak India”. Ini salah satu stigma yang diberikan masyarakat setempat terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh para pekerja migran perempuan ketika bekerja di luar negeri. Mereka adalah Anak Pekerja Migran (APM).

Stigma ini memberikan rasa sakit bagi anak-anak pekerja migran. Mereka harus kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Mereka dibatasi untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Mereka juga rentan untuk dinikahkan maupun menikah di usia anak, bahkan rentan menjadi korban eksploitasi seksual.

Kondisi-kondisi di atas hampir tidak pernah dibahas oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah. Selama ini, topik yang dibahas hanyalah tentang pekerja migrannya. Kalaupun membahas keluarganya, itu bukan khusus membahas tentang



perasaan anak-anak ketika mereka ditinggalkan, apa yang dialami oleh anak-anaknya selama ditinggalkan, atau menanyakan apakah mereka mengizinkan orang tuanya pergi.

Anak-anak pekerja migran ini dibiarkan tumbuh hanya dengan kekuatan yang mereka miliki. Tentu saja ada juga APM yang hidup berkecukupan, mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, serta mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga terdekatnya, tapi lebih banyak yang justru mendapatkan kesulitan saat orang tuanya jauh.

Ketika kita menanyakan berapa jumlah anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya ke luar negeri, kita bisa pastikan data itu tidak akan pernah kita dapatkan. Jangankan data tentang jumlah anak yang ditinggalkan. Berapa jumlah



BAGI ANAK PEKERJA MIGRAN MEMPEROLEH PELAYANAN DASAR KEPENDUDUKAN TIDAKLAH MUDAH

warga yang bekerja ke luar negeri di desa saja pasti akan didapatkan data yang beragam dan tergantung lembaga mana yang mengeluarkan. Ini bukti persoalan anak pekerja migran bukan isu yang “seksi” untuk dibahas.

Pada awal diskusi dengan beberapa

**Aktivitas
petani di
pedesaan,
Lombok**

masyarakat, tokoh masyarakat, kader desa, bahkan staf desa yang Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) temui, mereka memberikan pernyataan yang beragam terhadap situasi anak-anak pekerja migran.

“Tidak ada yang terjadi dengan anak-anak pekerja migran. Kehidupan mereka jauh lebih sejahtera dibandingkan kami yang menjadi staf desa,” ungkap Turmuzi, staf Desa Lenek Lauq.

Lain lagi yang disampaikan oleh salah satu warga yang mengatakan, “Di desa kami tidak ada anak yang dipanggil seperti itu.”

Memang tidak mudah meyakinkan semua pihak bahwa ada banyak persoalan yang dihadapi anak-anak pekerja migran. Butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkan mereka.

Situasi inilah yang membawa SANTAI mengajak beberapa orang di Desa Lenek Lauq dan Wanasaba untuk membahas apa yang sedang dialami anak-anak pekerja migran di desa, apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka, dan mendiskusikan memulainya dari mana.

Mereka kemudian menyepakati awalnya dengan melakukan pendataan dari dusun ke dusun. Bersama kader desa, mereka melihat berapa jumlah APM, apa yang dibutuhkan APM, bagaimana kondisi mereka, serta siapa yang mengasuh APM saat ini. Dari hasil pendataan tersebut didapatkan data sejumlah 441 anak (207 perempuan dan 234 laki-laki) di Desa Lenek Lauq dan 303 anak (139 perempuan dan 162 laki-laki) di Desa Wanasaba.

Selanjutnya mereka mulai mendekati dan mendiskusikan dengan para kader desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa sampai kabupaten.

Dari data yang diperoleh bersama, mereka membuat strategi advokasi serta membangun komitmen dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Data ini juga kemudian menjadi kekayaan desa. Desa yang semula tidak memiliki data, kini jadi

memiliki data yang kemudian digunakan dalam menyusun program kerja di desa. Data ini juga digunakan untuk mendapatkan layanan dasar dan bantuan sosial bagi anak pekerja migran.

Bagi anak pekerja migran memperoleh pelayanan dasar kependudukan tidaklah mudah. Nama mereka harus terdaftar dalam kartu keluarga pengganti, yang belum tentu secara otomatis memasukkannya dalam kartu keluarga. Kartu keluarga ini berkaitan dengan kepastian identitas yang berimplikasi pada kemudahan mengakses layanan sosial dasar pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Akta Kelahiran.

Seharusnya tiap warga negara berhak mendapat layanan dasar penduduk, termasuk hak mendapatkan identitas hukum, termasuk anak-anak pekerja migran. Namun apa daya, masih banyak di antara anak-anak ini yang belum mendapatkan akta kelahiran. Hal ini disebabkan kelengkapan persyaratan administrasi untuk mendapatkan akta kelahiran tidak bisa dipenuhi. Selain itu, para pengasuh pengganti tidak tahu bagaimana cara mengurusnya.

Tak berhenti di situ, upaya-upaya untuk mendapatkan layanan dasar ini terus dilakukan. Namun di awal, SANTAI melihat perlunya upaya penguatan kapasitas bagi kader desa, kader Posyandu, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa. Penguatan kapasitas kunci ini bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mereka tentang hak-hak anak, gender, pengorganisasian, advokasi, perencanaan penganggaran, dan lainnya.

Upaya penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, lokakarya, pertemuan rutin, asistensi, dan pendampingan. Strategi-strategi ini dilakukan untuk membangun komitmen, jejaring, kepedulian masyarakat, serta keberlanjutan dari program ke depannya. Untuk menjamin keberlanjutan kepedulian terhadap anak pekerja migran, penting melahirkan aktor-aktor kunci yang akan menjadi agen perubahan dan tetap mengawal program ke depan.

Untuk mengubah pola pikir dan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan

“SAYA MERASA SENANG DENGAN ADANYA PERTEMUAN INI. KAMI JADI TAHU CARA MENDIDIK ANAK-ANAK KAMI.”

anak-anak pekerja migran, dilakukan pendidikan *parenting* atau pengasuhan di tingkat desa. Kegiatan ini melibatkan tak hanya pengasuh anak pekerja migran, tetapi juga untuk para orang tua di desa.

Pemerintah juga diajak terlibat untuk menjadi narasumber dalam pendidikan pengasuhan ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3APKB), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pihak lainnya menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan. Materi yang dibahas meliputi bagaimana pola pengasuhan yang baik, bagaimana masyarakat mengetahui hak-hak anak, serta bagaimana peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

“Saya merasa senang dengan adanya pertemuan ini. Kami jadi tahu cara mendidik anak-anak kami,” ungkap salah satu warga.

Data yang dihasilkan juga digunakan untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sampai dengan pemerintah provinsi. Koordinasi dan komunikasi yang dibangun bersama OPD terkait dilakukan tidak hanya secara formal tetapi juga pendekatan secara informal.

Data-data ini telah membuka mata, bahkan cara berpikir pemerintah daerah, bahwa persoalan yang dihadapi anak pekerja migran saat ini harus dicarikan solusinya dan membutuhkan dukungan, kerja sama, dan sinergi semua pemangku kepentingan.

Pertemuan-pertemuan formal dengan berbagai pemangku kepentingan pun dilakukan melalui



lokakarya, seminar, dan pertemuan rutin. Ini dilakukan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran, serta menentukan strategi-strategi bersama menyelesaikan persoalan layanan dasar dan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi anak pekerja migran dan anak secara umum.

Pengorganisasian kelompok anak juga tak luput dilakukan. Strategi ini bertujuan mengembalikan kepercayaan diri anak-anak pekerja migran, sekaligus mendorong penerimaan sosial bagi anak-anak pekerja migran.

Ruang inilah yang diciptakan oleh beberapa kader desa sebagai wadah untuk saling bercerita, saling berbagi, dan saling belajar untuk menerima perbedaan. Wadah yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat.

Setelah berdiskusi dengan kader, dan berdasarkan hasil kajian tentang kebutuhan anak pekerja migran dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, maka digagaslah wadah yang diberi nama “*Smart*

**Ahmad
bersama
kakek dan
neneknya**

Class” di Desa Wanasaba, dan perpustakaan desa di Desa Lenek Lauq yang difasilitasi pemerintah desa. Selain itu, anak-anak usia remaja juga disibukkan dengan terlibat dalam klub sepak bola Desa Lenek Lauq.

Tidak ada yang sia-sia ketika kita berusaha. Itulah kata yang sempat terucap ketika kami melihat semangat dan senyum ceria di wajah anak-anak pekerja migran. Anak-anak yang selama ini terlupakan, tidak diperhatikan, bahkan tidak pernah dibahas, kini mulai dibicarakan.

Walaupun belum sempurna yang kami harapkan, tetapi saat ini sudah mampu menggugah para pimpinan daerah ketika beberapa anak pekerja migran dihadirkan dan bicara pada Seminar Gerakan Inklusi Sosial Anak Buruh Migran di tingkat provinsi maupun dalam kegiatan lainnya yang memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kelompok lainnya.

“Saya senang sekali waktu kita diajak untuk berkegiatan di Jember. Saya bisa

naik pesawat, naik bus, dan naik kereta api. Yang paling menyenangkan adalah saya bisa presentasi di depan teman-teman yang lain. Pokoknya ini adalah pengalaman yang paling menyenangkan, tidak akan terlupakan,” ungkap Fika.

Beberapa anak pekerja migran saat ini sudah mulai tumbuh rasa percaya dirinya. Mereka mulai dilibatkan pada kegiatan-kegiatan di desa. Mereka juga terlibat dalam kegiatan *smart class* yang merupakan wadah bagi anak-anak yang ada di desa untuk berkumpul dan belajar bersama.

Selain itu, anak-anak pekerja migran sering ikut dalam lomba-lomba yang diadakan desa dalam rangka hari besar keagamaan.

Anak-anak pekerja migran akhirnya mulai dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

“Anak-anak pekerja migran di Desa Lenek Lauq saat ini semua bersekolah. Anak-anak remaja sudah difasilitasi mesin perbengkelan dan perlengkapannya ditempatkan di Dusun Praubanyar dan Gelumpang,” ungkap Sarkiyah.

“Saya sangat senang karena Kartu Keluarga dan akta kelahiran cucu saya sudah jadi sehingga memudahkan pengurusan sekolah cucu saya dan pengurusan Program Keluarga Harapan (PKH)-nya,” ungkap Inaq Zuriyatun, 40 tahun, yang saat ini mengasuh kedua cucu laki-lakinya yang masih berusia 10 dan 8 tahun.

Perubahan juga dirasakan oleh beberapa pengasuh anak pekerja migran yang ada di desa. Sekitar 200 lebih anak di Desa Lenek Lauq dan 32 anak di Desa Wanasaba bisa mendapatkan akta kelahiran, baik APM dan anak lainnya.

“Saya sekarang sangat senang karena tidak mengalami masalah lagi dalam mengasuh cucu saya, Basir. Selama ini dia bergabung di *smart class*. Dia menjadi aktif belajar dan selalu dapat juara di sekolah,” ungkap Abdul Latif.

Berbeda lagi yang dirasakan salah satu kader desa yang selama ini aktif mendampingi anak-anak pekerja migran dan rela rumahnya dijadikan tempat untuk belajar mereka.

“Alhamdulillah saya bisa membantu anak-anak yang ada di desa ini termasuk anak pekerja migran untuk menambah ilmu pengetahuan dalam belajar,



dan bisa bergaul dengan teman-teman yang lain dalam hal positif. Anak-anak kita tidak lagi merasa tereksklusi dengan teman-teman yang lain dan mereka bisa berkumpul,” ungkap Suprihatin, salah satu kader Desa Wanasaba.

Kader desa dan pihak-pihak yang selama ini tidak mengakui fakta yang terjadi pada anak-anak pekerja migran, saat ini sudah mulai mengubah cara pandang mereka. Bahkan salah satu staf desa yang pada awalnya tidak sepaham, kini menjadi kader sekaligus aktor dalam mengubah pemahaman dan cara pandang masyarakat.

“Sebelum saya mendampingi anak pekerja migran, saya sudah jadi guru Raudatul Athfal (RA) dan jadi kader Posyandu, tapi waktu itu perasaan saya biasa-biasa saja, tidak begitu peduli dengan keberadaan anak-anak pekerja migran. Namun setelah saya mengikuti kegiatan bersama SANTAI, saya jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak pekerja migran. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang, bukan materi semata. Jadi saya selalu mencari anak pekerja migran duluan, baru yang lain. Mereka butuh bimbingan agar anak-anak ini menjadi anak yang baik, tidak salah pergaulan, dan mengerti dengan siapa mereka bergaul. Itu



sebabnya kita bentuk sejak dini,” ungkap Sarkiyah.

Sarkiyah, salah satu guru sekaligus pemilik RA yang lebih dari setengah muridnya adalah anak-anak pekerja migran. Dia juga semakin kencang menyuarakan kondisi anak-anak pekerja migran setelah terpilih menjadi salah satu anggota tim 9 di desanya. Ini juga bagian strategi agar anak pekerja migran mendapatkan perhatian dari pemerintah desa melalui kebijakan dan anggaran desa.

Aktor-aktor yang ada di desa juga sudah mampu membangun dan mengubah pemahaman atau cara pandang masyarakat terhadap keberadaan anak-anak pekerja migran. Hal ini mengurangi stigma yang selama ini disandangkan pada mereka.

Capaian lain yang dihasilkan adalah kemampuan kader desa dalam melakukan advokasi untuk pelayanan dasar. Anak-anak pekerja migran saat ini sudah bisa mendapatkan layanan administrasi penduduk berupa akta kelahiran. Pengasuh anak pekerja migran sudah bisa melakukan

(kiri) Ekspresi bahagia yang dirasakan oleh Inaq Zuriyatun ketika cucunya mendapatkan akta kelahiran.

(Kanan) Fika Anak Pekerja Migran

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan pembuatan Kartu Keluarga.

Di tingkat desa, bahkan sudah ada alokasi anggaran dari dana desa untuk pengadaan perpustakaan desa, bantuan mesin dan peralatan perbengkelan remaja, dan bantuan mesin jahit bagi pengasuh anak pekerja migran. Kelompok peduli di desa yang diwadahi Forum Komunitas Peduli dan pemerintah desa, mulai melakukan pendidikan dan penyadaran sehingga warga lebih memperhatikan kondisi APM.

Kegiatan yang dilakukan ini juga sangat berdampak pada anak lainnya yang ada di Desa Lenek Lauq dan Desa Wanasaba. Muncul kepercayaan diri bagi anak dan tidak ada lagi anak yang menstigma negatif anak pekerja migran. Lahir pula komunitas belajar bagi anak yang menjadi wadah anak untuk berkreasi, mengeluarkan pendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan di tingkat desa. Selain itu, terbangun juga jejaring antar komunitas belajar anak desa



Suprihatin salah satu kader di Desa Wanasaba penginisiasi sekolah *smart class*

dengan forum anak di tingkat kabupaten.

Beberapa capaian penting untuk anak-anak antara lain mendapatkan layanan kartu identitas, kesehatan, dan sekolah. Namun yang paling utama yakni perubahan untuk tidak lagi melakukan perundungan pada APM, meskipun hal ini belum 100 persen tercapai sesuai harapan.

Capaian yang sangat menarik di tingkat kabupaten adalah isu anak pekerja migran menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan dan menjadi komitmen beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung upaya perlindungan APM.

Selain itu, pada perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Timur, isu anak pekerja migran menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten. Keterlibatan kader dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik itu Musrenbang reguler dan Musrenbang perempuan, juga menjadi kekuatan untuk mendorong isu anak pekerja migran menjadi prioritas dalam Musrenbang tersebut.

Kekuatan data hasil pendataan langsung merupakan salah satu alat dan strategi jitu dalam advokasi anggaran dan kebijakan pada tingkat desa melalui Musrenbangdes. Kolaborasi dan sinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga

diperlukan dalam mendorong gerakan inklusi sosial anak pekerja migran.

Akhirnya ada kabar baik pada Januari 2017. Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi selaku Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur nomor 400/10/BP3AKB tentang Perlindungan Anak Buruh Migran.

Tentu saja kebijakan bukan akhir dari perjuangan untuk perlindungan AMP, tetapi itu adalah awal untuk memastikan kepedulian pemerintah.

Kita masih membutuhkan pengawalan atas kebijakan tersebut. Yang tak kalah penting adalah menjaga keberlanjutan, komitmen, dan keterlibatan komunitas dalam memberikan perlindungan kepada anak pekerja migran menjadi sebuah keharusan dalam membangun masa depan anak-anak menjadi lebih baik lagi.

Pembelajaran penting dari proses yang dilakukan ini adalah keterlibatan, kepedulian, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan akan sangat penting dalam keberhasilan sebuah program. Membangun koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kabupaten, sampai dengan provinsi, sangat dibutuhkan dalam mendorong terpenuhinya hak-hak dasar anak.

Data merupakan alat yang sangat jitu yang dapat digunakan dalam melakukan advokasi.

Kini praktik cerdas ini sudah dilakukan di 2 desa dan direplikasi di 2 desa lain di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Desa Pandan Wangi dan Pemongkong, juga 2 desa lagi di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Desa Jago dan Sukaraja. Hal menarik yang diperoleh dalam mereplikasi praktik cerdas ini adalah adanya layanan administrasi penduduk sampai ke tingkat desa yang dilakukan Dukcapil Kabupaten Lombok Timur dan di tingkat desa lahir peraturan desa tentang perlindungan anak.

Praktik cerdas ini bisa direplikasi di mana saja. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia serta memperhatikan kearifan lokal yang ada di tempat tersebut.

MELALUI DATA DAN RESIKO



REKRUT KADER



KOLABORASI DENGAN CSO



PERWAKILAN KADER MASUK TIM 9



PERWAKILAN MUSRENBANG KHUSUS PEREMPUAN



REPLIKASI PERDES



SURAT EDARAN GUBERNUR

PROGRAM LAYANAN UNTUK ABM



A group of children and a man in a classroom setting. The man, wearing a black cap and a patterned shirt, is pointing upwards with his right hand. The children, mostly girls in hijabs, are smiling and some have their hands raised. The background shows a window and a door.

BERGERAK BERSAMA MELINDUNGI APM

Oleh Iwan Riswan
YAKIN, Tasikmalaya



“SUDAPLAH, PAK USTAZ NGURUS NGAJI SAJA. JANGAN IKUT CAMPUR NGURUS YANG BEGINI.”

Warga Desa Purwarahayu, Kabupaten Tasikmalaya

Memiliki nama lengkap A. Jajang Nurjaman, Ustaz Jajang sehari-hari mengurus sekaligus mengajar di Pondok Pesantren Subulus Salam di Kampung Panguyuhan, Desa Purwarahayu. Rata-rata murid santrinya adalah anak-anak, termasuk juga anak pekerja migran (APM). Sejak 2017, Ustaz Jajang banyak membantu anak-anak buruh migran.

Ia menceritakan bagaimana tanggapan masyarakat pada saat awal program. Mereka menunjukkan kecurigaan.

“Bahkan salah seorang warga mengatakan, ‘Aduh! Pak Ustaz, awas jangan masuk politik. Nanti bisa hancur’,” cerita beliau sambil tertawa.

Seperti warga lainnya, pada awalnya Ustaz Jajang juga tidak langsung percaya terhadap kehadiran Program Peduli yang mengajaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak-anak pekerja migran.



“Pada awalnya saya tidak langsung ikut terjun di Program Peduli ini karena saya ingin melihat dulu seperti apa dan untuk apa program ini dilakukan,” ujarnya.

Tanggapan masyarakat desa ketika ditawari bantuan pengurusan pembuatan akta kelahiran gratis juga negatif.

Malah sempat ada warga masyarakat yang mengatakan, “Sudahlah, Pak Ustadz ngurus *ngaji* saja. Jangan ikut campur *ngurus* yang begini,” ujar salah satu warga Desa Purwarahayu. Namun Ustadz Jajang tak peduli. Dia sudah berniat membantu anak-anak pekerja migran di desanya. Setelah dijelaskan, barulah masyarakat mengerti kalau bantuan yang diberikan adalah bagian dari tujuan Program Peduli.

Seiring waktu berjalan dan sering dilibatkannya dalam berbagai kegiatan program, akhirnya Ustadz memahami dan

mengerti apa tujuan Program Peduli. Saat ini, melalui kegiatan pengajian rutin, Ustadz Jajang juga aktif menyuarakan hak anak dan menyampaikan informasi pentingnya kepedulian terhadap anak buruh migran kepada masyarakat Desa Purwarahayu.

Desa Purwarahayu dan Desa Kertaraharja adalah dua desa di wilayah Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, yang menjadi wilayah sasaran Program Peduli. Keduanya berada di ujung barat daya wilayah ibu kota kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Jarak dari ibu kota kabupaten, Singaparna, adalah sekitar 27 km dengan waktu tempuh 1,5-2 jam perjalanan. Jalan menuju ke desa naik turun, berkelok-kelok, berbatu, serta rawan longsor.

Jumlah penduduk Desa Kertaraharja yaitu 4.571 jiwa, sedangkan Desa Purwarahayu 7.009 jiwa.

Yayasan Akses Indonesia (YAKIN) melaksanakan Program Peduli dengan sasaran anak pekerja migran sejak 2017. Dari hasil pendataan YAKIN, ditemukan sekitar 188 anak pekerja migran tinggal di kedua desa tersebut (Maret 2018). Sebagian anak pekerja migran tersebut lahir saat ibunya masih bekerja di luar negeri dan tidak diketahui siapa bapaknya. Anak-anak ini dikenal dengan sebutan “Anak Gendongan”.

Di dua desa tersebut 7 orang “anak gendongan”. Salah satunya adalah Indah, anak perempuan yang kini berusia 10 tahun. Ia tidak pernah bertemu ibu kandungnya. Sejak lahir dia dititipkan kepada paman dan bibinya yang sudah dia anggap sebagai orang tuanya. Ibunya adalah pekerja migran.

YAKIN percaya bahwa pelabelan “Anak Gendongan” merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk yang harus dihilangkan. Pelabelan ini memberikan tekanan psikologis kepada anak karena hal ini bisa mengakibatkan anak menghadapi kesulitan

Ustadz Jajang tokoh agama Desa Purwarahayu



dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bahkan mengalami kekerasan.

Masalah lain yang ditemukan pada anak pekerja migran di kedua desa tersebut antara lain adalah masalah pola pengasuhan. Selain diasuh oleh nenek dengan perhatian yang kurang memadai, kadang mereka yang diasuh oleh bapaknya juga kurang mendapat perhatian.

Anak-anak pekerja migran ini juga menghadapi kesulitan mendapatkan akses layanan publik karena belum memiliki akta kelahiran. Terdata dari 180 anak pekerja migran, sekitar 51% belum memiliki akta kelahiran. Masalah ini ternyata tak hanya milik anak pekerja migran tapi juga anak-anak lainnya yang orang tuanya tidak bekerja di luar negeri. Hal tersebut membuat tim YAKIN bertanya-tanya karena kondisi tersebut seolah-olah dibiarkan tanpa ada penyelesaian.

Masalah-masalah di atas menjadi perhatian tim YAKIN. Sayangnya perhatian ini tidak serta merta diterima baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hambatan dan tantangan yang harus dihadapi adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa manakala program ini akan digulirkan.

Untuk itu, tim kemudian menerapkan strategi pengorganisasian dengan menguatkan kelompok masyarakat agar mereka mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungannya.

Langkah pertama yang dilakukan Tim Peduli YAKIN adalah melakukan identifikasi langsung. Mereka tinggal di desa untuk mengamati kelompok masyarakat pada kedua desa tersebut yang benar-benar memiliki kepedulian sosial. Hasilnya, terdapat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kader perempuan yang bisa dilibatkan sebagai kader Program Peduli.

Pelibatan tokoh agama seperti Ustadz atau ajengan dilakukan karena Ustadz merupakan sosok panutan bagi warga masyarakat pada dua desa tersebut. Melalui kegiatan pelatihan, pertemuan koordinasi, dan pertemuan rutin yang dilakukan, mereka diajak berdiskusi untuk membahas seputar persoalan anak yang terjadi di lingkungan desanya.

Setelah beberapa kali berdiskusi, akhirnya ditemukan akar masalahnya. Setelah dipetakan,



penyebab dari permasalahan tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa yang seharusnya memenuhi dan menjamin anak untuk mendapatkan hak identitas menjadi titik persoalan yang terjadi selama ini.

Para orang tua di kedua desa ini kurang memperhatikan kebutuhan pengadaan akta kelahiran untuk anak-anaknya. Hal ini salah satunya dikarenakan sang orang tua juga tidak memiliki kartu keluarga termasuk surat nikah. Ini disebabkan oleh pernikahan yang mereka lakukan secara agama, sehingga tidak ada bukti hukum tentang pernikahan mereka, padahal dokumen-dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran.

Di sisi lain, mereka tidak tahu bagaimana tata cara pengurusan administrasi kependudukan dan juga tidak mampu dari sisi keuangan. Adapun mereka yang mampu secara ekonomi biasanya menggunakan jasa agen atau calo dengan biaya yang tidak murah, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 350 ribu. Namun hasilnya nol. Setelah ditunggu selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, bukti akta tersebut tidak pernah mereka



(atas) Pelatihan kader Program Peduli anak pekerja migran

(kiri) Kegiatan Forum Anak Desa Purwarahayu

terima. Hal inilah yang menimbulkan rasa kekecewaan sehingga mereka enggan mengurusnya kembali.

Peran masyarakat dalam mengatasi persoalan yang terjadi pada anak-anak seperti anak putus sekolah, anak yang bekerja, dan anak yang menikah di usia muda juga tidak terlihat. Mereka masih memandang bahwa kondisi tersebut adalah sesuatu hal yang biasa dan lumrah.

Peran pemerintah desa sebagai perwakilan negara untuk memenuhi dan menjamin anak mendapatkan hak identitas juga kurang berfungsi optimal. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia menjadi penyebab layanan administrasi kependudukan tidak berjalan dengan baik. Secara tidak disadari, masalah administrasi kependudukan seperti kepemilikan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (KTP) menjadi semakin bertumpuk dan terbengkalai.

Melihat persoalan tersebut, Tim YAKIN bersama kader masyarakat menyusun

rencana kerja dan saling berbagi peran. Tim YAKIN berperan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada dinas terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Cara ini dilakukan agar membantu pemenuhan kebutuhan hak identitas anak dengan menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang tinggal di dua desa tersebut, sedangkan kader berperan melakukan sosialisasi, pendataan, mengumpulkan persyaratan pembuatan akta kelahiran, serta koordinasi dengan pemerintah desa.

Situasi dua desa ini sebenarnya menggambarkan juga situasi yang dialami Kabupaten Tasikmalaya. Itulah sebabnya Tim YAKIN melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan Ano, Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

Ternyata Kabupaten Tasikmalaya memang membutuhkan percepatan penerbitan akta kelahiran. "Saat ini



Terpenuhinya administrasi kependudukan di desa

pembuatan akta kelahiran Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 40% pada Desember 2017,” ujar Ano.

Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan antara Tim YAKIN dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, serta antara kader dengan pemerintah desa dalam pengurusan layanan administrasi kependudukan akhirnya membuahkan hasil. Pada Februari 2018, dari pengajuan awal sebanyak 19 berkas permohonan akta, pihak dinas baru bisa menerbitkan 11 berkas akta karena 8 berkas sisanya secara administrasi belum lengkap.

Terbitnya 11 berkas akta kelahiran menjadi awal masyarakat mulai percaya terhadap layanan administrasi kependudukan yang dilakukan kader forum. Kader yang biasanya harus mendatangi masyarakat, sekarang berbalik didatangi warga yang mengajukan permohonan pembuatan akta bagi anaknya.

Hingga April 2018, Tim YAKIN mencatat sebanyak 128 berkas akta kelahiran anak telah diterbitkan. Berkas tersebut terdiri dari 36 berkas anak pekerja migran dan 92 berkas anak bukan

pekerja migran. Sekitar 40 keluarga ikut terbantu mendapatkan kartu keluarga.

Peran kader yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk kader perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat, sangatlah penting. Untuk mempersatukan kelompok masyarakat tersebut maka dibentuklah Forum Peduli Anak di masing-masing desa tersebut. Forum ini berfungsi sebagai wadah masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak serta turut berperan serta dalam membangun desa dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kehadiran Ustadz sebagai kader forum peduli yang mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan ternyata cukup efektif. Meskipun dipandang sebagai tokoh, tidak segan-segan Ustadz bersama kader lain turun mendatangi rumah warga untuk mengumpulkan persyaratan dengan mensosialisasikan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Terselesainya layanan administrasi kependudukan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa terhadap



keberadaan Program Peduli semakin meningkat. “Sekarang ini pemerintah desa menjadi semakin ingin ikut terlibat dalam kegiatan forum. Masyarakat pun mulai berdatangan ke forum untuk mengurus pembuatan administrasi kependudukan,” kata Ustaz Jajang.

Tidak hanya sampai di situ saja, Ustaz Jajang juga ikut membina Forum Anak Desa Purwarahayu. Anak-anak yang tergabung dalam forum anak ini dilatih dengan kesenian tradisional Marawis.

Tim YAKIN mengusulkan agar dilakukan kolaborasi antara seni budaya dan informasi. Jadi dalam setiap penyampaian materi tentang hak anak atau kesehatan reproduksi remaja yang dilakukan oleh forum anak, maka pembukunya adalah dengan menampilkan kesenian Marawis. Hal ini menjadi metode yang dilakukan oleh Forum Anak Desa Purwarahayu dalam menyampaikan informasi.

Salah satu anak pekerja migran yang sekarang tergabung dalam forum anak dan

Ardan dan neneknya (kanan) Pak Yayan penerima manfaat pelayanan administrasi kependudukan

“SEKARANG DENGAN ADANYA KARTU KELUARGA INI SAYA BISA MENGAJUKAN BANTUAN PERMODALAN UNTUK ANAK SAYA MEMBUKA REPARASI PONSEL.”

Yayan

Marawis adalah Ardan. Dia tinggal bersama neneknya yang tidak lain adalah ibunya Ustaz Jajang.

Awalnya Ardan tidak begitu tertarik ikut dalam kegiatan. Namun setelah mengikuti pelatihan dan diajak ikut dalam kegiatan Festival Egrang di Jember, dia menjadi senang dan semakin ingin terlibat.

“Saya senang bisa ikut dalam kegiatan ini karena menambah banyak teman dari daerah lain,” ungkapnya.

Kegiatan di festival tersebut mendorong dirinya untuk bisa berkreasi. “Bersama forum anak sekarang saya ikut kesenian Marawis meskipun hanya sebagai penabuh rebana,” katanya.

Dampak keberhasilan layanan administrasi kependudukan ini dirasakan juga oleh Yayan, salah seorang warga Desa Purwarahayu. Ia menceritakan bahwa dengan adanya akta kelahiran, keinginan anaknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bisa terbantu. “Melalui program ini saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas bantuan yang diberikan. Keinginan anak saya untuk melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa terbantu. Karena baru sekarang ini, di usia 17 tahun, anak saya mempunyai akta kelahiran,” ucapnya.

“Alhamdulillah, saya sendiri secara pribadi terbantu dengan selesainya kartu keluarga yang telah dibantu oleh forum. Dulu saya tidak bisa mengakses bantuan karena tidak memiliki kartu keluarga,” katanya. “Sekarang dengan adanya kartu keluarga ini saya bisa mengajukan bantuan permodalan untuk anak saya membuka reparasi ponsel,” pungkask Yayan sambil menunjukkan peralatan tersebut.

Ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Kertaraharja dan Desa Purwarahayu menarik perhatian H. Ena, seorang pengusaha teh di wilayah Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya ia terkejut mendengar adanya kegiatan positif di dua desa tersebut. Menurutnya desa tersebut termasuk desa yang rawan dengan keributan.

Akan tetapi, setelah mendapatkan penjelasan tentang program, H. Ena yang juga merupakan Ketua Tim Inovasi Desa Kecamatan Taraju memahami dan tergerak untuk turut berkontribusi membantu, khususnya pada program anak. Ia berkomitmen memberikan 5% dari keuntungan penjualan produk perusahaannya untuk kegiatan anak.

“MURAH, CEPAT, DAN NYATA”

Hada, Kepala Desa Purwarahayu

Keberhasilan pengurusan administrasi kependudukan ini menjadi sebuah awal adanya kesepakatan antara Forum Peduli Anak dengan pemerintah desa. Melalui proses koordinasi, komunikasi, dan advokasi yang dilakukan forum, akhirnya kepala desa menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Purwarahayu Nomor 141/019/Kep. Des/2018 tentang Pembentukan Pengurus Forum Peduli Anak tertanggal 3 April 2018. Dalam struktur organisasinya, Ustaz Jajang diangkat dan dipercaya sebagai Ketua Forum Peduli Anak Desa Purwarahayu.

Pada April 2018, saat acara penyerahan simbolis akta kelahiran, Hada, Kepala Desa Purwarahayu, secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Yakin dan Forum Peduli Anak yang telah membantu masyarakat di desanya. Beliau mengatakan bahwa layanan administrasi kependudukan ini adalah layanan yang “Murah, Cepat, dan Nyata”. Ia bahkan menyampaikan gagasan baik, “Agar forum ini bisa berjalan dan berkegiatan, maka ke depan harus dibuat peraturan desa sebagai acuan untuk mengakses dana desa,” pungkasnya.

Pernyataan Kepala Desa Purwarahayu ini menjadi kabar baik bagi Tim Yakin. Meskipun baru setahun bekerja membawa Program Peduli pada dua desa melalui program layanan administrasi kependudukan, terbukti bisa menggerakkan semua pihak untuk peduli pada hak-hak anak, khususnya anak-anak pekerja migran.

Semua pihak mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah telah menunjukkan perannya masing-masing. Upaya ini juga secara tidak langsung mengubah cara kerja dan sistem di desa yang tadinya berjalan kurang baik menjadi lebih baik.

IDENTIFIKASI KADER

TOKOH YANG BER-PENGARUH

LIVE IN



KORDINASI DENGAN DESA



MEMBENTUK



LOBBY PERUSAHAAN



KORDINASI DENGAN



PELAYANAN



ANAK BERHA DE H

BAGIAN 2

YANG DAPAN NGAN URUM



RUMAHKU TEMPATKU KEMBALI

Oleh Yuliyanti Anggraeni
PKBI, Garut



Ginda tak membayangkan hobinya modifikasi motor dengan memasang knalpot yang berbunyi keras membawanya ke balik jeruji Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Ia terpaksa menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah bersama tiga orang temannya melakukan pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Masalahnya sepele, sang korban tak terima mendengar suara knalpot teman berkumpul Ginda dan kawan-kawan yang sangat berisik. Pengeroyokan itu berakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka divonis 2 tahun.

Saat divonis hukum, Ginda baru lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia harus menunda dua tahun untuk bisa belajar di bangku SMA.

“Nyesel dengan apa yang sudah saya lakukan dengan teman-teman, di LPKA tidak nyaman di rumah, makan tak seenak masakan mamah, dan suka disuruh-suruh sama senior. Disuruh ngambil ini itu. LPKA Bandung tempatnya bersih tapi tetap rumah adalah tempat paling nyaman. Dua bulan pertama saya terus menangis karena ingin pulang,” ujarnya.

Tapi bagi ABH, penderitaan itu tak cukup. Saat masa pembinaan mereka selesai, tantangan baru harus mereka hadapi: penolakan saat kembali ke sekolah.



Ginda mencium tangan sang ibunda saat bersiap berangkat sekolah

“ANAK SAYA TIDAK BISA LAGI MENERUSKAN BELAJAR DI JENJANG PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI. BEBERAPA SEKOLAH MENOLAK KAMI, SEKOLAH TIDAK MAU MENERIMA ANAK DIDIK YANG MEMPUNYAI LATAR BELAKANG HUKUM. BAGAIMANA DENGAN MASA DEPAN ANAK SAYA?”

Ima, Ibunda Ginda

“Awat! Anak itu orang jahat. Jangan sampai anak itu kembali ke kampung kita, nanti anak kita terbawa jahat dan nakal, mencoreng nama baik kampung kita saja. Pergi sana, pergi!” Ketakutan itu terbersit di benak Ima.

Saat Ginda masuk LPKA, perasaan Ima sangat cemas dan khawatir. Namun perasaan itu memuncak ketika Ginda pulang. Kekhawatirannya terbukti, ada dua sekolah yang menolak Ginda karena riwayatnya di LPKA.

Ima juga mengkhawatirkan Shakti, teman akrab Ginda saat sama-sama di LPKA. Keduanya bersamaan menyelesaikan masa pembinaannya, apalagi badan Shakti penuh tato. Selama ini masyarakat selalu melihat orang bertato itu negatif, mereka selalu menghubungkan tato dengan perilaku kriminal pemiliknya.

Kekhawatiran Ima terbukti.

“Saya jadi ditolak setiap sekolah,” kata Shakti sambil menunduk.

Suasana kelas belajar mengajar di LPKA Bandung

Apa yang dialami Ginda dan Shakti merupakan masalah umum yang dihadapi anak-anak yang menyelesaikan pembinaan.

Data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyebutkan ada sekitar 21 Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP) di 12 kecamatan di Kabupaten Garut. Tujuh anak sudah kembali kepada keluarganya. Situasi ini yang kemudian mendorong PKBI mendampingi AMPP.

Berjuang Menghapus Stigma

Pada masa awal intervensi, PKBI berkunjung dari rumah ke rumah orang tua AMPP. Tahapan ini sangat penting untuk mendengar dan menangkap masalah-masalah dan harapan-harapan keluarga bila anak-anak bebas dari masa pembinaan.





Sekolah tempat Ginda belajar

Kunjungan *door to door* ini bertujuan menggali permasalahan yang dihadapi dan harapan orang tua setelah anak bebas dari masa pembinaan, termasuk labelisasi pada anak. Para orang tua berharap anak akan tetap mendapat haknya dan dapat melanjutkan hidup setelah bebas kelak.

Kunjungan ini ternyata memakan waktu panjang, sebab jarak tempuh antar rumah lebih kurang empat jam perjalanan dari pusat Kota Garut. Beberapa rumah bahkan hanya bisa dijangkau dengan cara berjalan kaki. Banyak alamat juga sudah berubah atau waktu kunjungan yang kurang tepat. Atas bantuan tetangga mereka, PKBI bisa menemukan alamat terbaru keluarga-keluarga AMPP.

Selain kesiapan keluarga menerima AMPP, rasa percaya diri anak-anak penghuni LKPA juga menjadi penentu. Kerap mereka tidak percaya diri membaur dengan masyarakat dan teman-teman sebaya. Mereka pun merasa tidak menentu menghadapi masa depannya. Situasi ini bisa membuat mereka berbuat kriminal lagi dan berhadapan kembali dengan hukum.

Persoalan di atas terjadi karena anak-anak yang telah keluar dari LPKA tidak sepenuhnya diterima

FAKTOR EKONOMI SALAH SATU FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK JARANG DIKUNJUNGI KELUARGANYA

oleh masyarakat. Tak hanya tidak diterima secara sosial, AMPP pun sering mengalami kekerasan dari masyarakat atau keluarganya sendiri. Masyarakat percaya, anak-anak yang keluar dari LPKA adalah anak jahat.

Padahal, ketika keluar dari LPKA, anak-anak ini juga mempunyai harapan atau cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, perlu ada intervensi sosial agar masyarakat lebih memahami anak-anak tersebut dan terpenuhi haknya seperti hak kelangsungan hidup, hak untuk dilindungi, hak memperoleh pendidikan, dan hak tumbuh kembang anak. Inilah waktunya melakukan reintegrasi sosial.

Pada proses reintegrasi sosial, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Untuk itu,

PKBI Garut melakukan advokasi kepada berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kepolisian, dan tokoh masyarakat lainnya. Advokasi bertujuan mengubah cara pandang mereka pada AMPP, sebab perubahan cara pandang bisa mempercepat proses reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial merupakan proses yang dilakukan PKBI Garut kepada masyarakat, agar masyarakat tidak memberikan stigma kepada anak. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran pada masyarakat tentang perlunya menerima kembali anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

Selain kegiatan pemahaman dan penyadaran, PKBI Garut melakukan sosialisasi tentang perlunya menangani sendiri apabila menemukan salah satu anggota masyarakat berperilaku melanggar norma-norma sosial. Secara tidak langsung proses reintegrasi diharapkan memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk menangani anak berkonflik hukum.

PKBI juga pernah ditolak saat berkunjung ke rumah masyarakat. Terkadang keluarga yang dikunjungi menutupi dan mengatakan bahwa anak tersebut bukan keluarganya. Namun ada juga yang kemudian menceritakan tentang anaknya.

Mereka pun mengungkapkan angan dan harapan saat anaknya kembali. Tanpa melihat anak mereka benar atau salah, anaknya tetap menjadi kebanggaannya. Bagi mereka yang terpenting adalah anaknya selalu sehat di LPKA dan saat keluar nanti mereka tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik, tanpa melihat latar belakang pernah masuk LPKA, sehingga anak mereka bisa menjadi lebih baik lagi.



Pertemuan
Forum
Keluarga
PKBI Garut

Memulihkan Harga Diri Lewat Forum Keluarga

Selain proses advokasi, PKBI Garut juga memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi keluarga AMPP. Grup Whatsapp “Forum Keluarga PKBI Garut” menjadi wahana komunikasi bagi keluarga AMPP untuk saling berbagi dan menguatkan. Forum keluarga beranggotakan seluruh keluarga anak yang sedang ataupun sudah bebas dari LPKA.

Memang belum banyak yang dilakukan untuk upaya reintegrasi. Komunikasi yang intensif antar keluarga AMPP dan banyak pihak diharapkan bisa menjadi embrio menciptakan masyarakat yang inklusif untuk anak-anak kita.

Saat pertemuan forum keluarga banyak sekali cerita, mulai dari rasa sedih yang

mereka rasakan dan stigma dari masyarakat serta orang tua yang mengeluh jarang mengunjungi anak karena faktor ekonomi.

Faktor ekonomi adalah salah faktor yang menyebabkan anak jarang dikunjungi keluarganya, apalagi jarak Garut-Bandung cukup jauh. Biaya transportasinya juga tak sedikit, sekitar Rp 300 ribu untuk 2 orang pulang pergi. Keluarga yang mempunyai keterbatasan ekonomi tidak memungkinkan rutin berkunjung.

Padahal kunjungan keluarga sangat berpengaruh besar terhadap psikis anak. Lewat forum keluarga, PKBI lantas mengajak para keluarga untuk memikirkan bagaimana solusi anak yang jarang dikunjungi dapat bertemu keluarganya. Dari hasil diskusi, disepakati adanya dana patungan.

Biaya patungan adalah komitmen anggota forum keluarga untuk membiayai kunjungan ke LPKA. Koordinator forum menyusun jadwal keberangkatan kelompok melakukan kunjungan secara bergiliran, yang dijadwalkan setiap minggu pertama pada awal bulan. Seluruh biaya akomodasi hasil dari patungan sehingga meringankan beban keluarga yang kurang mampu.

Lewat dana patungan, seluruh anak diharapkan mendapatkan kunjungan yang rutin dari keluarganya, agar mereka merasa tidak dibuang dari keluarganya.

Keterlibatan pemerintah sangat penting dalam upaya reintegrasi. Forum keluarga juga mengadvokasi dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Pendekatan ini mendapatkan hasil. Dinas Sosial bersedia memfasilitasi pelatihan keterampilan AMPP.

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bersedia memfasilitasi kejar paket A, B dan C. Mereka juga bersedia memfasilitasi, jika ada anak yang bebas dari LPKA tetapi keluarga tidak menjemput karena kurang mampu. Dinas Sosial Kabupaten Garut akan mengantarkannya sampai ke rumah.

Setelah proses advokasi dan audiensi, PKBI Garut akhirnya bertemu dengan Zakaria, 60 tahun, seorang pendidik yang berpikiran maju. Zakaria berani mengambil risiko dengan menerima beberapa orang lepasan LPKA di sekolahnya.



Pertemuan PKBI dengan Zakaria bermula dari kegiatan PKBI Garut dalam sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Maret. SMK ini berada dalam naungan yayasan yang dipimpinnya, Yayasan Anak Kusuma Bangsa Garut (YAKBG). Ia seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayahnya.

“Pada prinsipnya, pendidikan adalah hak seluruh anak tanpa melihat latar belakangnya. Saya selaku tenaga pendidik berkewajiban mendidik seluruh anak tanpa terkecuali. Tidak bisa anak ditolak sekolah karena takut mencoreng nama baik sekolah. Itu namanya bukan lembaga pendidikan yang baik,” tutur Zakaria.

Penerimaan sosial di sekolah yang dipimpin Zakaria menciptakan perubahan sosial. Ia membuat SMK yang berbasis pesantren ramah anak. Ginda akhirnya bisa meneruskan pendidikan di SMK yang dipimpin Zakaria. Keberanian Zakaria menerima Ginda menjadi cikal bakal proses reintegrasi sosial di Garut.



Shakti paling dekat dengan ibunya, tempat ia berkeluh kesah

“SEMULA SAYA KIKUK DAN MINDER. PADA HARI PERTAMA SEKOLAH PUN SAYA DIANTAR MAMA SAKING TIDAK PERCAYA DIRINYA. TETAPI LAMBAT LAUN SAYA BISA BERGAUL DAN DITERIMA OLEH KAWAN-KAWAN. SAYA INGIN MENJADI POLISI.”

Ginda

PKBI Garut mengundang Zakaria untuk bergabung di Forum Keluarga PKBI Garut. Ia menjadi kekuatan baru bagi Forum Keluarga.

Zakaria menyambut dengan tangan terbuka jika ada yang mau sekolah di sekolah yang dipimpinya.

Ginda tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat keluar dari LPKA, Ginda baru lulusan SMP. Ia ingin meneruskan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Akhirnya ia diterima di SMK 1 Maret.

“Semula saya kikuk dan minder. Pada hari pertama sekolah pun saya diantar mama saking tidak percaya dirinya, tetapi lambat laun saya bisa bergaul dan diterima oleh kawan-kawan. Saya ingin menjadi polisi,” katanya dengan mata berbinar-binar.

Rasa minder, malu sampai dia memisahkan diri dari teman-teman barunya pernah dia rasakan selama kurun waktu bulan pertama masuk sekolah baru. Namun tantangan ini bisa diatasi.

”Setelah lulus sekolah nanti saya ingin menjadi polisi karena saya ingin membuktikan walau saya pernah masuk lembaga pembinaan, tapi saya bisa sukses, bisa membahagiakan serta membanggakan keluarga saya. Saya sedih melihat orang tua saya ketika saya masuk LPKA. Mereka berkorban banyak hal untuk saya. Mereka mengorbankan uang, waktu, dan tenaga untuk menjenguk saya selama saya di dalam. Suatu hari nanti saya akan mengganti air mata mereka dengan senyum bangga,” tuturnya dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca.

Cita-cita yang harus kita dukung. Semoga terwujud dan kita semua akan terus mendorong agar anak-anak yang mempunyai latar belakang hukum memperoleh haknya.

Namun teman Ginda, Shakti belum jelas nasib pendidikannya.



Zakaria, Kepala SMK 1 Maret

Shakti kini bekerja menjadi tukang parkir di sebuah bank di Garut. Sebenarnya ia masih ingin meneruskan sekolah, namun tidak semudah Ginda. Tato yang dulu dia banggakan kini menjadi masalah. Shakti memiliki tato yang jelas terlihat di kedua tangan hingga jemari. Di keningnya terdapat tato dengan tulisan "boncell".

Namun Zakaria masih memberikan peluang Shakti bersekolah di SMK 1 dengan syarat:

Boleh sekolah asal tatonya dihapus, sehingga ia bisa mengikuti sekolah regular atau mengikuti kejar paket C.

Proses penghapusan tato ternyata tidak mudah. Butuh waktu dan biayanya cukup mahal, seperti yang terbaca pada sebuah brosur penawaran.

Namun tekad Shakti tidak goyah. Ia bersedia menghapus tatonya.

"Tato akan saya hapus agar saya dapat bersekolah kembali," ujarnya dengan kepala menunduk.

Cerita Ginda dan Shakti hanya menggambarkan sebagian kecil kesulitan mantan anak binaan LPKA, yang berjuang menumbuhkan rasa percaya diri

"SAYA INGIN SEMUA ANAK MEMILIKI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA, BAIK ANAK ITU PERNAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA ATAUPUN MASALAH LAINNYA."

Zakaria, Kepala SMK 1 Maret

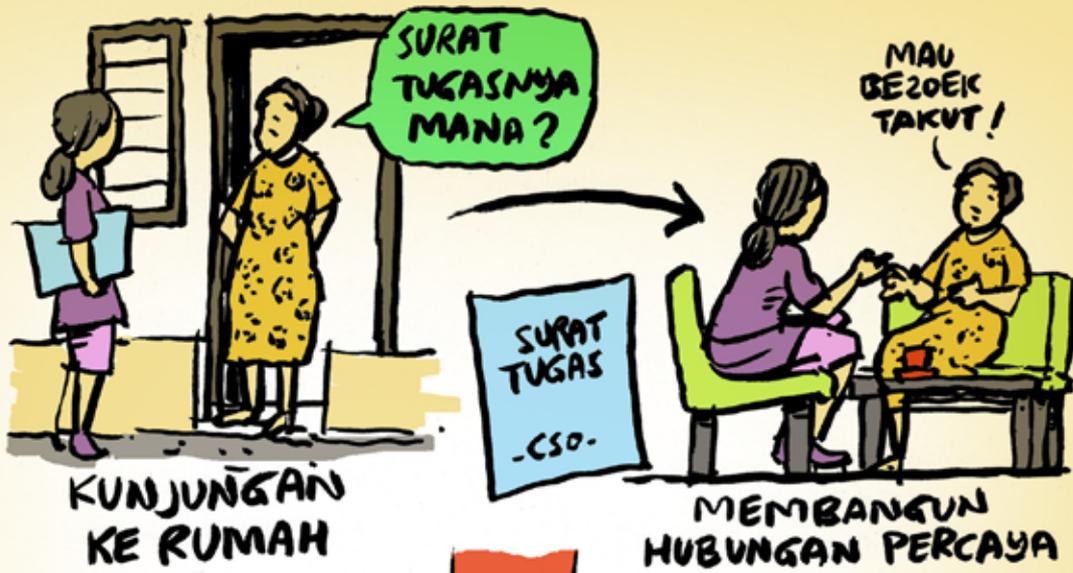
anak untuk beradaptasi kembali di lingkungannya dengan pelabelan dalam masyarakat.

PKBI Garut berperan sebagai pendamping, yang melakukan pendampingan kepada anak dengan cara menempatkan diri sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Dengan kita menghormati anak, ia akan merasa bahwa dirinya masih berharga di mata orang lain sehingga timbul rasa percaya diri dan berani.

Reintegrasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum banyak dilakukan, baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk itu, program yang dilakukan lebih ditingkatkan mengenai penyadaran masyarakat sehingga bisa menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap anak mantan LPKA.

Kalau stigma negatif sudah tidak ada, maka anak akan bisa berkembang lebih baik. Mereka tidak dipersulit mendapatkan haknya, termasuk hak atas pendidikan.

"Saya ingin semua anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, baik anak itu pernah menjalani hukuman pidana ataupun masalah lainnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitu pun kita. Allah saja yang menciptakan kita maha pengampun dan maha pemberi kesempatan, masa kita sebagai hambanya tidak bisa. Jadi tidak ada salahnya ketika anak ingin meneruskan sekolahnya maka saya akan menerimanya dengan senang hati dan terbuka," pungkas Zakaria.



SETIA

SAYA pengen
Me mabtebagakan
ke 3 orang tua

SAYA PENGEN
JADI
HAFIS QUR'AN
AMIN

Ingin jadi artis
dulu Indonesia

SAN Berguna
dari mabtebagal
Dan bangsa
INDONESIA

Penusaha LELE

Penusaha

Penusaha dan

Penusaha yang
dan
Mabtebagakan orang tua

PENGEN JADI
KASAT THT

Menjadi
ORANG SUKSES

Mabtebagakan orang
tua dan menjadi
orang yang sukses

Penusaha menjadi
mabtebagakan

Menjadi orang sukses
dan menjadi
BANGSA
Mabtebagakan orang tua

SAYA PENGEN
menjadi orang
yang sukses
dan mabtebagakan
orang tua

Ingin menjadi
orang yang
sukses

Menjadi orang sukses
dan mabtebagakan
orang tua

BANGSA
ORANG TUA

PENGEN JADI
DIREKTUR

SAYA PENGEN
SAYA lebih dari
P

TENTARA

BETI

GET
SPEED UP



MENJAGA MIMPI DI JALAN BALI

Oleh Sirot Fajar
LPA, Jawa Timur

ORANG TUA YANG SELAMA INI TIDAK PERNAH MEMBESUK ANAKNYA DI PENJARA MENDAPAT UNDANGAN UNTUK ACARA TEMU KELUARGA DI LPKA DARI PROGRAM PEDULI

“Teng teng teng...”

Suara lonceng bel itu menyadarkan lamunan Bagus. Ia tidak membayangkan sebelumnya jika hari ini akan kembali mengenyam bangku pendidikan. Ini adalah hari ia kembali bersekolah, setelah berhenti enam tahun lamanya. Sejak tadi ia terus melamun, membayangkan kiranya pelajaran apa yang akan dia peroleh di hari pertamanya sekolah, Apalagi sekolahnya bukan sekolah biasa. Sekolahnya disebut Sekolah Istimewa karena tempatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, di Jalan Bali, Kabupaten Blitar.

Suara lonceng bel tanda masuknya sekolah itu membuyarkan lamunan Bagus. Ia kini berlari secepat mungkin. Ia bergegas berlari, tidak mau terlambat di hari pertama sekolahnya. Ia berlari mengejar waktu seperti saat ia harus berlari dari kejaran massa karena ketahuan menjambret. Pelarian itulah yang akhirnya mengantarkannya berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang biasa disebut Penjara Anak.

Bagus akhirnya sampai di kelasnya. Kelas enam Sekolah Dasar (SD). Padahal usianya kini sudah mau 18 tahun. Andai saja ia tidak *Drop Out* menjelang Ujian Nasional dan terus melanjutkan pendidikannya, tentu kini telah masuk ke perguruan tinggi. Namun, itu semua hanya “andai saja”.



Suasana di kelas sekolah istimewa LPKA

Kenyatannya, kini ia kembali duduk di kelas enam SD.

Bagus merasa bahagia karena bisa melanjutkan sekolah. Namun ia juga sedih karena kesempatan kembali mendapatkan pendidikan itu justru hadir di saat harus mendekam di balik jeruji penjara anak. Namun ia tetap bersyukur karena selain bisa melanjutkan sekolahnya, beberapa hari lalu ia mendapat kabar dan melihat kondisi neneknya yang semakin tua, walaupun ia hanya melihatnya lewat video.

Masih teringat dengan jelas percakapan ibu-ibu dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dengan nenek Bagus saat ditemui di rumah petaknya di kampung pinggiran Kota Pahlawan, Surabaya.

“Bagaimana kabar Bagus?” tanya nenek.

“Baik, Mbah. Katanya *kangen* karena *nggak* pernah dijenguk.”

Neneknya langsung terisak, mengucurkan air mata. Ibu-ibu dari LPA juga diam, memberi waktu nenek Bagus melepas rasa rindunya.

Tak terasa air mata Bagus mulai mengalir mengingat neneknya. Ia begitu bahagia karena akhirnya bisa mendapat kabar neneknya. Selama setahun lebih mendekam di penjara, tak sekalipun ada orang yang membesuknya.

Beberapa waktu lalu banyak temannya yang bersuka cita karena bisa bertemu orang tuanya. Orang tua yang selama ini tidak pernah membesuk anaknya di penjara mendapat undangan untuk acara temu keluarga di LPKA dari Program Peduli.

LPKA penuh haru biru anak dan orang tua melepas kerinduan mereka. Hari itu, para orang tua hadir untuk acara bersama.

Bagus sedih saat itu sebab tak ada lagi kedua orang tuanya. Ayahnya telah kembali menghadap Sang Pencipta. Ibunya, pergi entah kemana. Ia tak tahu tempat pastinya. Satu-satunya harapan adalah neneknya yang selama ini mengasuhnya. Namun ia sadar, kondisi neneknya yang semakin



renta dan tak ada sanak keluarga lain yang mengantar, kecil kemungkinan neneknya hadir.

Bagus masih menyimpan harapan pada neneknya. Di hari acara temu keluarga itu, ia terus menunggu dan memandangi pintu kedatangan. Berharap neneknya tiba-tiba muncul, atau orang lain yang pernah dikenalnya. Namun sampai acara selesai, yang ditunggunya tak jua tiba.

Beruntung pihak LPA kemudian mengunjungi neneknya. Akhirnya ia kini tahu kabar neneknya. Melihat wajahnya. Mendengar suranya. Menangkap cahaya rindu yang terpancar dari rumahnya walau semua itu hanya lewat video.

Bagus merasa sangat puas dan terobati rasa kangenya pada keluarga saat menerima titipan bingkisan sebungkus permen, roti, dan uang saku yang dititipkan nenek Bagus melalui konselor Lembaga Perlindungan Anak Jatim yang sebelumnya membesuk dan menyampaikan pesan dari Bagus.

“Teng teng teng...”

Tak terasa bel istirahat berbunyi. Bagus lebih banyak melamun di hari pertamanya sekolah. Ia mengingat banyak hal tentang perjalanan hidupnya. Hatinya berbunyah karena kini bisa kembali bersekolah.

Saat Bagus keluar dari kelasnya,

seorang memanggilnya, “Baguuuus....”

Temannya yang lainnya menggoda dengan suara keras, sengaja agar teman yang lainnya juga mendengar, “Woi! Bagus sekarang sekolah. Lihat ini, ia masih kelas enam.”

Bagus hanya tersenyum. Teman-temannya pun ribut mengomentarnya. Tak sedikit yang mengolok-oloknya, “Jambret sekolah. Hati-hati yang bawa uang.”

Bagus hanya membalas dengan senyum. Ia sudah paham dengan perilaku teman-temannya itu. Bagus memang cukup populer di kalangan temannya. Tak heran ketika ada pemilihan ketua Forum Anak LPKA, Bagus mendapat dukungan paling banyak. Ia terpilih menjadi Ketua Forum Anak.

Berlatih menjadi pemimpin merupakan hal yang benar-benar baru baginya. Ia sendiri juga heran, bagaimana dirinya yang biasa-biasa saja, baik secara fisik, pendidikan, ataupun lainnya, ternyata dipilih menjadi ketua forum.

Demikian sekelumit kisah Bagus yang mengalami banyak perubahan dalam hidupnya ketika berada di LPKA. Bagus hanyalah satu dari kira-kira 200 anak laki-laki yang menghuni LPKA. Jumlahnya memang dinamis, terus berubah karena biasa ada yang keluar, juga ada yang masuk.

Anak-anak yang menghuni LPKA adalah anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Penyebab mereka menghuni LPKA bermacam-macam, ada yang karena narkoba, mencuri, menjambret, asusila, membunuh, dan lainnya. Akhirnya, mau tidak mau, di antara anak-anak itu ada yang harus menjalani masa kecilnya di LPKA. Kebebasannya pun terampas.

Persoalan-persoalan lain pun mengiringi anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Terlebih ketika mereka sudah masuk di LPKA. Bukan hanya kebebasan yang terenggut, tetapi masalah lain pun muncul mengiringinya.

Untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa menjalani pembinaan dengan sebaik-baiknya dan tetap terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, maka Program Peduli melalui LPA Jatim membuat beberapa program, antara lain:



Pendidikan Motivasi

Pendidikan Motivasi

Saat anak berhadapan dengan hukum dan akhirnya masuk LPKA, banyak di antara mereka yang akhirnya putus asa dan pasrah akan nasibnya. Anak kehilangan semangat hidupnya. Padahal sebenarnya, di usia mereka yang masih anak-anak, sisa usia mereka setelah keluar dari LPKA masih panjang.

Untuk menjaga harapan dan optimisme mereka, maka diadakan pendidikan motivasi yang bertujuan membangun kesadaran kritis agar anak mampu berubah, mempunyai konsep diri, bersemangat selama menjalani masa pembinaan, mengikuti dan mengakses layanan, serta menentukan langkah positif dalam hidupnya.

Di antara manfaat dari kegiatan pendidikan motivasi adalah seperti yang dituturkan Bagus, “Semula saya agak canggung ketika fasilitator menyuruh berdiskusi kelompok. Permainan kreatif dengan teman beda blok terasa tidak nyaman karena sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan anak blok lain. Namun pada akhirnya, permainan membuat anak-anak menjadi akrab, *guyon* atau bergurau, saling mengingatkan ketika salat, dan saya sendiri menyuruh dan mengajak teman satu blok yang semula tidak sekolah sekarang



mau sekolah.”

Manfaat lain dari pendidikan motivasi disampaikan oleh salah seorang anak di LPKA, Rio “Di antara hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mendapat pendidikan motivasi. Saat mendapatkan itu, semangat hidup saya yang padam kembali menyala. Saya lebih bisa menerima kenyataan yang harus saya hadapi sekarang ini.”

Kegiatan Outbound

Bagi anak-anak, kegiatan *outbound* terasa seperti main-main bersama teman, seperti jawaban Bagus ketika ditanya kegiatan yang paling disukai. Ia menjawab, “*Outbound*. Seru sekali bisa bermain bersama-sama teman. Belum pernah sebelumnya kami melakukan kegiatan seru-seruan seperti itu.”

Memang tujuan kegiatan *outbound* ini adalah untuk penguatan *team building*,

Kegiatan Outbound

kerja sama antar teman, bahkan melatih kepemimpinan. Dikemas dalam bentuk permainan, kegiatan ini termasuk yang mendapat sambutan positif dari anak-anak di LPKA karena mereka merasa sedang bermain-main bersama.

Body Mapping

Dalam rangka menanamkan perlindungan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, maka Program Peduli juga mengadakan kegiatan *Body Mapping*. Melalui kegiatan ini, anak-anak di LPKA ditanamkan kesadaran akan tubuhnya, memahami aturan tentang sentuhan, memahami bentuk hubungan dan perasaan yang muncul, serta mengetahui apa yang harus dilakukan tatkala ada yang melanggar hal tersebut.

Harapan terbesar dilakukannya *Body Mapping* adalah agar anak menyadari jika mendapat kekerasan, dan tidak melakukan kekerasan pada yang lainnya, baik kekerasan fisik, seksual, ataupun psikis.

Dalam kegiatan ini juga diajarkan *Mapping Area*. Anak diajak berpikir kritis dan menganalisa tiga hal yang perlu diwaspadai. Ketiga hal itu adalah: mengenali tempat-tempat yang berbahaya; mewaspadaikan ketika berada pada lingkungan yang asing atau tidak dikenal; dan mengenali sikap-sikap orang yang berbahaya atau mencurigakan untuk mengajak pada kejahatan.

Konseling

Sebagaimana kita pada umumnya yang tak pernah lepas dari masalah, anak-anak di LPKA juga memiliki masalah. Tidak semua orang bisa menyelesaikan sendiri, sebagian membutuhkan tempat untuk mencurahkan masalahnya.

Dari sinilah Program Peduli mengutus para konselor untuk mendampingi anak-anak di LPKA.

Melalui konseling, anak-anak mau mengungkapkan masalah-masalahnya yang selama ini disimpan di hati dan masalah yang ada juga dicoba untuk diselesaikan. Sebagai contoh, melalui proses konseling, ternyata didapati ada anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, anak tersebut juga hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Madura. Maka konselor kemudian menyampaikan ke pihak LPKA agar anak tersebut diajari baca tulis.

Dalam beberapa kesempatan, konseling juga disediakan untuk keluarga yang membesuk. Tujuan dari konseling keluarga adalah untuk menguatkan keluarga dan membuat orang tua lebih perhatian lagi kepada anaknya yang ada di LPKA.

Temu Penguatan Keluarga dengan Anak

Pada masa awal kehidupan, anak membutuhkan kedekatan dan berhak hidup bersama keluarga. Kekuatan anak dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah dalam setiap fase kehidupan sangat ditentukan oleh keluarga, tidak terkecuali bagi anak yang berada di LPKA Blitar. Saling asah,



asah, dan asuh yang diberikan pada anak mampu mendekatkan dan memberikan energi positif bagi anak-anak di LPKA.

Kaf dan Yus yang sudah hampir setahun di LPKA menuturkan setelah orang tuanya dua kali mengikuti penguatan kapasitas penguasaan anak, yang dari semula orang tuanya tidak mau berbicara saat berkunjung ke LPKA, menjadi selalu menjenguk setiap minggunya.

Itulah beberapa kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas anak-anak di LPKA. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membantu menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri anak agar sadar dan mau berubah, mempunyai konsep diri, bisa membuat keputusan, serta sikap positif lainnya.

Setelah anak bisa menghadapi masalahnya sendiri, anak diberi kegiatan lanjutan agar mereka bisa berperan aktif. Kegiatan lanjutan



Konseling dengan keluarga AMPP

tersebut diharapkan bisa membuat anak mengaktualisasikan diri mereka dan saling menguatkan di antara sesama. Intinya, setelah anak bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, selanjutnya anak diajak untuk berperan aktif untuk saling berbagi dan menebar energi positifnya kepada teman sesama.

Forum Anak LPKA

Saat anak masuk LPKA, mereka terputus hubungan dengan teman sebayanya. Sebagai gantinya, mereka akan bertemu teman lain yang sama-sama berhadapan dengan hukum. Untuk

menghimpun mereka semua, perlu dibuat suatu wadah sebagai tempat mereka untuk berkumpul bersama, saling tukar pikiran, dan untuk membicarakan kepentingan mereka.

Tidak sampai di situ, menurut penuturan Bagus selaku Ketua Forum Anak LPKA, sejak adanya forum anak, jumlah anak yang bertengkar di LPKA menurun drastis. Meski kadang masih terjadi sekali dua kali, namun intensitasnya sudah jauh berkurang. Hal ini karena mereka mulai sadar pentingnya persaudaraan dan persahabatan antara teman di LPKA.

Selain itu, Rio menambahkan, “Forum Anak ini bahkan mengubah obrolan teman-teman yang dulunya hanya *ngalor ngidul* ‘tidak jelas arahnya’, kini terkadang kita diskusi untuk perbaikan diri dan LPKA. Keakraban teman-teman juga menjadi lebih baik.”

Keberadaan forum anak juga menjadi perhatian petugas di LPKA karena keberadaan forum anak disahkan dan diberi SK Pembentukan Forum Anak LPKA oleh Kepala LPKA pada 1 Maret 2018.

Dampak adanya Forum Anak ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) akhirnya melibatkan lima pengurus Forum Anak LPKA menjadi narasumber dan perwakilan dalam perhelatan acara pemilihan Duta Anak dan Jambore Anak-anak Kota Blitar dalam rangka Kota Blitar menuju Kota Layak Anak.

Sampai saat ini, melalui Program Peduli, kami terus berusaha menguatkan sumber daya manusia Forum Anak LPKA Kota Blitar sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan ruang partisipasi anak untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anak-anak yang menjalani pidana penjara (AMPP).



Perwakilan FA LPKA bergabung dengan FA Blitar dalam Jambore Anak Blitar

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah beberapa kegiatan yang langsung dirasakan dan dilakukan anak-anak LPKA Blitar.

Selain itu, masih terdapat beberapa Program Peduli yang dilakukan LPA Jatim yang meski tidak dirasakan dan dilakukan secara langsung oleh anak tetapi sangat bermanfaat bagi mereka. Salah satunya adalah pembentukan Forum *Stakeholders* dan advokasi ke Dinas Pendidikan untuk kebijakan akses pendidikan yang berpihak pada anak di LPKA sebagai jembatan masa depan. Advokasi ke Dinas Pendidikan ini diharapkan dapat mendorong terbitnya kebijakan penguatan layanan pendidikan dan pengasuhan pada AMPP.

Sungguh, begitu banyak masalah yang dihadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu. Aktualisasi diri, komunikasi, pendidikan dan pengasuhan, dan masalah lainnya. Belum lagi bagaimana mereka menghadapi stigma negatif dari keluarga dan masyarakat.

Itulah sebabnya LPA terus melakukan advokasi

dan sosialisasi pada pihak media dan jurnalis untuk membangun persepsi dan kesadaran kritis tentang kerentanan dan pemenuhan hak-hak anak di LPKA Blitar.

Untuk mewujudkan itu semua, LPKA tidak bisa bekerja sendiri. Perlu bantuan dari pihak lain, siapa saja, terutama pihak yang secara otoritas berkaitan langsung seperti Dinas Pendidikan Daerah. Mereka seharusnya juga memantau pendidikan anak-anak di LPKA.

Semoga perhatian kita semua kepada anak-anak menjadikan mereka tetap memiliki harapan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik, tidak berputus asa karena menjadi anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

Dari sini, dari Jalan Bali, Kota Blitar, tempat anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu menghabiskan hari-harinya. Semoga mereka tetap menjaga mimpi yang mungkin telah tercerai berai. Semoga anak-anak itu kembali menyalakan api harapan akan masa depan.



PENDIDIKAN
MOTIVASI



OUTBOND



KONSELING



ADVOKASI
KE DINAS



FORUM
ANAK





LPKA RAMAH ANAK

Oleh Zulkarnain
PKBI, Sumatera Selatan



Penjara, jeruji, atau Lapas kata yang tidak asing lagi di telinga semua orang. Banyak orang sepakat ini tempat yang harus di jauhi dan tidak perlu diberi perhatian khusus. Tempat di mana semua orang dianggap hina, tanpa mengetahui kehidupan yang sebenarnya di sana. Entah kapan kita akan mengerti, padahal tempat itu juga bagian dari kehidupan kita.

Kehidupan di Lapas memang sangat keras. Semua Lapas di seluruh dunia hampir sama kondisinya, tidak terkecuali Lapas Anak Kelas II Palembang. Seluas mata memandang, yang terlihat hanya jeruji-jeruji besi.

Di Lapas, uang merupakan senjata paling ampuh untuk menangkal banyak hal, juga untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Di sana uang menjadi raja. Ini bukan hanya berlaku untuk sesama napi, tetapi juga para sipir yang biasanya memasang muka seram dan suaranya lantang.

Lapas mengedepankan pengamanan tanpa peduli penghuninya adalah anak-anak. Artinya, siapa yang membuat ulah pasti akan mendapat hukuman. Setiap ada keributan ataupun perkelahian antar sesama napi, tidak cukup hanya satu orang sipir yang turun tangan melakukan pemeriksaan yang biasanya juga disertai penyiksaan fisik. Ini membuat persoalan tidak akan pernah selesai, bahkan bisa menimbulkan persoalan baru dan membuat anak-anak menyimpan dendam.



“BELUM SEHARI SAYA DI SEL, KAKI-TANGAN KEPALA KAMAR SUDAH LANGSUNG MENGINTIMIDASI SAYA. KALAU MAU AMAN DI SINI, HARUS BAYAR UANG KEAMANAN. SUDAH MENJADI TRADISI RUPANYA, TIAP TAHANAN BARU AKAN DIMINTAI SEJUMLAH UANG. KALAU TIDAK AKAN DIGULUNG, ALIAS DISIKSA RAMAI-RAMAI.”

Mimin



Sejalan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Lapas anak dituntut melakukan perubahan tata nama dari Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sayangnya perubahan tersebut tidak disertai dengan perubahan pola pikir para petugas LPKA. Unsur penyiksaan terhadap anak masih kerap terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum petugas yang belum memahami perubahan yang terjadi. Secara teoretis, harusnya unsur pembinaan diutamakan dibanding unsur pengamanan.

Lapas Anak Kelas IIA Palembang sebelum menjadi LPKA

Menyikapi hal tersebut, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Selatan, melalui Program Peduli melakukan pendekatan dan bertemu dengan Kepala LPKA. Mereka mendiskusikan bagaimana mendorong perubahan pola pikir petugas agar sesuai dengan amanat pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati penyelenggaraan pelatihan psikososial bagi petugas dengan harapan mereka menjadi lebih ramah dalam melakukan pembinaan kepada anak. Mereka diharapkan menjadi

pengganti orang tua dan keluarga bagi anak di LPKA.

Pada pelatihan tersebut, para petugas diberikan pengetahuan terkait Undang-Undang SPPA, teknik konseling, serta pemahaman bahwa pembinaan anak di LPKA merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Semua membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak, Ahmad Fuad, SH. M.Si.

“Mengurusi anak di LPKA ini lebih susah daripada orang dewasa. Mereka tidak cukup sekali atau dua kali untuk diingatkan. Memang tidak mudah untuk mengubah pola pikir seseorang, tetapi kami berkeyakinan bahwa sekeras-kerasnya batu, kalau terus menerus ditetesi air, lama kelamaan akan berlobang juga,” ujarnya optimis.

Hal senada juga diungkap Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Keterampilan, sebelumnya adalah Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan, Fahriyuddin Jusef, S.Ag. Ia menyatakan bahwa sejak berlakunya UU Nomor 11 tahun 2012, Lapas Anak Palembang pada 2013 sudah mulai dipersiapkan dengan mengadakan studi banding ke beberapa Lapas di daerah lain untuk mendapatkan gagasan seperti apa LPKA akan dikelola.

“Kami menyimpulkan bahwa Lapas Anak Palembang lebih baik kami kuatkan segi pendidikan untuk anak karena tugas kami sebagai petugas pemsarakatan bagi pelanggar hukum, baik dewasa dan anak khususnya, disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak dan cita-cita anak tersebut,” jelasnya.

Berangkat dari hasil tersebut, PKBI Sumatera Selatan menghadap Walikota Palembang untuk membicarakan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak. Hasilnya di luar dugaan. Walikota menyambut baik usulan tersebut sehingga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk membuka sekolah jarak jauh (*filial*) mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan sekitar Lapas.

Keputusan Walikota tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara LPKA



Kelas I Palembang dengan Dinas Pendidikan kota Palembang.

Perubahan-perubahan pada LPKA Kelas I Palembang mulai dirasakan pada 2015, baik dari segi ruangan maupun aktivitas dan fasilitas LPKA. Perubahan ini merupakan mandat perubahan Lapas Anak menjadi LPKA. Di seluruh LPKA diharapkan tidak ada lagi jeruji atau terali sebagai pembatas ruang gerak anak dalam menyalurkan bakat dan minat mereka.

Dari segi fasilitas, saat ini dirasa sudah sangat menunjang. Kalau dulu, di Lapas hanya ada blok-blok kamar dan tempat ibadah. Sekarang semua fasilitas yang tersedia sudah berpihak pada anak.

Aktor di balik perubahan ini salah satunya adalah kepala LPKA Kelas I Palembang, Endang Lintang Hardiman, SH. MH yang berani mengubah penampilan fisik LPKA sehingga kesan penjara sudah tidak terlihat.



**Kedekatan
petugas
dan anak
di LPKA
dalam
kegiatan
diskusi**

Anak-anak diberikan ruang untuk mengekspresikan bakat dan minat yang mereka miliki. LPKA Kelas I Palembang menyediakan sekolah jarak jauh (*filial*) mulai tingkatan SD hingga SMA. Sekolah ini mempunyai ijazah yang tidak berbeda dengan sekolah umum lainnya.

Pengembangan bakat dan minat juga digalakkan. PKBI Sumatera Selatan melibatkan pihak-pihak luar untuk berkegiatan di dalam LPKA. Contohnya, LPKA menggandeng salah satu perguruan bela diri Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah untuk melatih anak-anak yang mempunyai minat pada seni bela diri. Puncaknya, atas izin dari kepala LPKA, anak dapat mengikuti ujian kenaikan sabuk yang diadakan di luar LPKA. Hasilnya, tiga anak LPKA berhasil menjuarai perlombaan

seni bela diri Palembang.

Bukan hanya pendidikan formal saja. LPKA juga memberikan peluang bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pembinaan dalam LPKA. Sampai saat ini, telah terjalin kerja sama dengan beberapa lembaga yang terlibat dalam proses pembinaan.

LPKA menjalin kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 dan 5 Palembang. SMKN 2 memberikan peningkatan keterampilan perbengkelan sepeda motor, sementara SMKN 5 meningkatkan pengetahuan tentang teknologi informasi dalam bentuk kursus *video editing* dan pembuatan film dokumenter.

Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Palcomtec juga menjalin kerja sama dengan berbagi teknik fotografi dan *photo editing*. Hasil karya foto anak-anak LPKA pun diikutsertakan pada lomba fotografi tingkat perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara.

Selain itu, ada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum. Ada mahasiswa magang yang datang ke LPKA untuk bakti sosial. Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Abdi Nusa dan Fakultas Kedokteran Ilmu Psikologi (FKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga memberikan layanan konseling bagi anak-anak LPKA.

Selain dukungan akademisi, pemerintah juga mendukung dalam bentuk pemberian bantuan belajar siswa pendidikan layanan khusus pada 9 November 2017. Bantuan ini berupa anggaran pendidikan yang bisa digunakan untuk biaya pembelian buku, seragam, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan lain terkait pembinaan bagi anak di LPKA.

Berbagai kerja sama itu memberikan dampak positif bagi anak-anak di Lapas, seperti yang dirasakan Sani Tampubolon,



anak didik LPKA Kelas I Palembang karena kasus asusila. Ia akrab dipanggil Batak atau Ucoc oleh teman-teman karena ia berasal dari Medan.

Wajahnya sedikit tegang saat mengingat masa lalunya. Sani menceritakan awal dari kasus yang menyimpannya.

“Ketika itu saya berkenalan dengan salah satu *cewek* dan singkat cerita kami pacaran. Kami saling mencintai dan ketika kami sudah sepakat untuk menikah, saya memberanikan diri untuk melamar pacar saya ke orang tuanya. Namun kedua orang tuanya tidak setuju dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah masih di bawah umur serta beda keyakinan. Sampai akhirnya, kami berdua memutuskan untuk kawin lari dan inilah awal malapetaka yang saya alami. Kedua orang tua pacar saya melaporkan ke polisi sampai akhirnya saya

ditangkap dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak divonis hukuman 2,2 tahun,” ceritanya singkat.

“Saya tidak menyangka akan terjadi begini. Namun apa mau dikata, saat mendengar putusan hakim saya harus menjalani pidana penjara, dalam pikiran saya itu pasti sangat menyeramkan. Apalagi kalau melihat dalam film, kehidupan di penjara sangat keras dan ini yang membuat saya benar-benar stres,” kenangnya cepat.

“Saat pertama tiba di LPKA, saya sempat bingung melihat kondisi di LPKA. Sebetulnya ini penjara atau asrama? Karena kesan penjara tidak terlihat sama sekali. Bahkan ini sangat jauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Apalagi ketika diwawancarai oleh salah satu petugas tentang pendidikan dan saya dianjurkan untuk melanjutkan sekolah yang ada



di LPKA. Tambah membuat saya bingung. Kok di penjara ada sekolah. Dan ini benar-benar sekolah, bukan kursus ataupun paket belajar,” tambahnya mengingat hari pertamanya di Lapas.

“Akhirnya saya pun mengikuti saran dari petugas tersebut. Sebelum masuk ke sini, saya sudah menyelesaikan sekolah sampai tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jadi waktu melanjutkan sekolah di sini, saya masuk di kelas 1 SMA. Tapi sangat disayangkan, saya tidak dapat menyelesaikan sekolah sampai tamat karena masa pembinaan saya di LPKA sudah selesai. Hanya sampai di kelas 2. Sebetulnya saya ingin tetap melanjutkan sekolah. Namun karena orang tua

Sekolah
filial SMA
Negeri 11
Palembang

**“PENJARA TANPA TERALI
ITU NYATA. LAPAS ANAK
KELAS IIA PUN BERUBAH
MENJADI LPKA KELAS
I PALEMBANG. LPKA
TERBAIK SELURUH
INDONESIA DAN MENJADI
PERCONTOHAN.”**

Mimin



Suasana kunjungan orang tua di LPKA Palembang

meminta saya untuk pulang ke Medan, niat untuk melanjutkan sekolah jadi tertunda,” tambah Sani mengakhiri ceritanya.

Bukan hanya Sani yang merasakan perubahan dalam dirinya. Mimin juga merasakannya. Semenjak diangkat menjadi tahanan pendamping (Tamping), ia mendalami ilmu hukum. Ia juga mendapat banyak pengalaman, mendalami ilmu agama Islam, dan merasa sangat dekat dengan Tuhan karena menjadi Tamping.

“Di masjid, saya sering melihat pria-pria kuat yang berdoa sambil menangis. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang yang mereka tinggalkan. Saya tetap bersyukur karena semuanya sekarang terasa lebih baik.”

“Penjara tanpa terali itu nyata. Lapas Anak Kelas IIA pun berubah menjadi LPKA KELAS I Palembang. LPKA terbaik seluruh Indonesia dan menjadi percontohan. Tempat ini menjadi saksi perubahan dalam diri untuk menjadi manusia yang bersih,” cerita Mimin ketika diwawancarai.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada LPKA Kelas I Palembang tak lepas dari pemikiran dan tangan dingin Ahmad Fuad, SH selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Fahriyuddin Jusef, S.Ag. Peran mereka berdua inilah yang menjadi inspirasi bagi

petugas lainnya dalam mewujudkan LPKA ramah anak.

Para petugas Lapas kini mulai berubah, mereka lebih terbuka dan bersedia melibatkan pihak-pihak luar yang sering datang ke LPKA dalam pembinaan anak-anak. Petugas klinik LPKA sudah dapat memberikan penyuluhan kesehatan yang selama ini dilakukan oleh Puskesmas.

Kegiatan kerohanian dalam bentuk pengajian dan salat berjamaah juga mulai dibimbing langsung oleh petugas dari LPKA. Perubahan ini adalah bukti dari perubahan pola pikir petugas. Dari unsur pengamanan, kini lebih mengedepankan unsur pembinaan.

Dulu, kunjungan orang tua dan keluarga terhadap anak di LPKA dibatasi oleh jeruji besi. Sekarang orang tua dan anak dapat berkumpul dalam satu meja karena ruang kunjungan keluarga lebih seperti taman di sebuah hotel atau kafe.

Pada 2017, perubahan-perubahan baik itu mengantarkan LPKA Kelas I Palembang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai LPKA terbaik se-Indonesia, juga penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai LPKA Ramah Anak.

KEBUTUHAN HAK ANAK TERKAIT PENDIDIKAN

OK INI MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA



PENDEKATAN DENGAN KEPALA LPKA



- PSIKOSOSIAL
- SOSIALISASI UU SPPA
- PERSPEKTIF HAK
- KONSELING

PELATIHAN BAGI PETUGAS



PETUGAS DILIBATKAN DALAM KONSELING



KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

JALAN PANJANG GAPAI DUKUNGAN BAGI ANAK DI LAPAS

Oleh Abdul Salim Ali Siregar
PKBI, Bengkulu



“TAK ADA SEKOLAH. KEGIATAN KAMI SEHARI-HARI HANYA *NGOBROL* DENGAN TEMAN ATAU MENUNGGU KELUARGA YANG BERKUNJUNG KE SINI. KALAU SAKIT PALING KAMI DIBERI OBAT PANAS SAJA.”

Adi

Ia tinggal bersama anak-anak lainnya yang berjumlah 35 anak. Mereka ditempatkan dalam kamar berukuran 2,5x3 meter di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Ada 4 kamar yang berisi masing-masing 8-10 anak dalam blok L, blok khusus untuk anak di Lapas Kelas IIA ini. Jumlah anak di Lapas sangat dinamis karena ada saja anak yang baru masuk dan ada yang bebas.

Leo (17), salah satu anak di Lapas, bercita-cita menjadi wirausahawan. Ia berkata, “Tapi aku masih mau sekolah.”

Keinginan untuk tetap bersekolah juga diamini oleh Wawan dan Adi, temannya.

Sayangnya keinginan itu tak bersambut. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses pembinaan anak di Lapas menjadi hambatan dalam memberikan dukungan bagi anak. Hambatan tersebut meliputi tidak adanya layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan identitas, dan layanan keterampilan sesuai minat bakatnya.



Belum lagi penempatan anak di Lapas hanya terpisah blok dengan blok dewasa. Ini menjadikan anak-anak tersebut rentan mendapatkan kekerasan dari narapidana dewasa.

“Pada saat jam besuk, blok kami seringkali didatangi oleh napi dewasa,” ujar Leo.

“Kami sering disuruh-suruh. Disuruh pijat, ambil air, terkadang juga dimintai uang. Kalau kami tidak menurut, kami diancam dan kepala kami dipukul. Pernah ada yang dijadikan kurir “togel”. Kami dipaksa bertugas mencatat angka-angka togel yang dipasang oleh napi dewasa.” Togel adalah permainan judi dengan menuliskan angka.

“Lapas Curup ini kan Lapas dewasa,” ujar Sri Harmowo, Bc.IP., SH (51), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIA Curup. “Jadi yang pertama, bagaimana semua warga binaan, termasuk anak, berada dalam kondisi aman dan tertib. Kami juga sudah berupaya maksimal untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Keterbatasan petugas pembinaan anak yang hanya berjumlah 8 orang dari total 80 orang petugas Lapas, sedangkan 80 orang petugas tersebut harus mengawasi sekitar 620 orang narapidana. Selain itu, tidak adanya sarana pendukung khusus untuk pembinaan anak juga membuat Lapas belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan keterampilan,” tambahnya.

Dari kondisi tersebut, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu berupaya melakukan identifikasi kebutuhan anak yang ada di Lapas. Kerja sama yang terbangun sejak tahun 2012 antara PKBI Bengkulu dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bengkulu memudahkan kami melakukan identifikasi kebutuhan tersebut.

Hasil identifikasi yang dilakukan, terdapat empat kebutuhan dasar anak yang harus tersedia di Lapas. Kebutuhan dasar tersebut terkait layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan keterampilan, dan layanan identitas.

Kebutuhan dasar yang telah terpetakan tersebut menjadi bahan bagi PKBI Bengkulu untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Bertemu dengan kepala Lapas secara rutin dilakukan dalam setiap kesempatan, baik secara formal maupun non-formal pada saat bertemu di beberapa kesempatan. Pertemuan dengan

“KAMI SERING DISURUH-SURUH. DISURUH PIJAT, AMBIL AIR, TERKADANG JUGA DIMINTAI UANG. KALAU KAMI TIDAK MENURUT, KAMI DIANCAM DAN KEPALA KAMI DIPUKUL.”

Leo

Kepala Lapas menjadi penting dilakukan karena ia mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan di dalam Lapas.

PKBI Bengkulu juga berinisiatif untuk mendorong semua pihak dalam memberikan layanan dalam memenuhi kebutuhan anak. PKBI melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui apakah dinas-dinas tersebut mempunyai program kegiatan yang terkait dengan anak di dalam Lapas.

“Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak di Lapas tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas. Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait langsung pemenuhan hak anak harus bertanggung jawab dalam



Rapat Koordinasi untuk Dukungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.

memberikan layanan sebagai bentuk perlindungan anak,” ujar Ir. Harmudya selaku Direktur Eksekutif Daerah PKBI Bengkulu.

“Selain melakukan proses pendampingan, PKBI Bengkulu mendorong pelayanan publik yang manusiawi untuk anak Lapas dan mendorong kreativitas mereka berkembang. Selain kegiatan pendampingan, dilakukan juga advokasi kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan anak Lapas. Lembaga Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” lebih lanjut disampaikan Direktur Eksekutif Daerah PKBI Bengkulu yang akrab dipanggil Bang Ayang.

Pada saat kunjungan, disampaikan kepada dinas instansi terkait bahwa ada anak di dalam Lapas dan mereka dalam kondisi tidak lagi bersekolah, tidak mempunyai aktivitas dalam mendukung minat bakatnya, dan pada saat sakit hanya mendapatkan layanan dari klinik Lapas yang hanya memiliki petugas medis yang terdiri dari 2 orang perawat.

“Seringkali kami mendatangi instansi pemerintah. Dalam seminggu bisa tiga kali mengunjungi dinas yang sama, tetapi kami sering mengalami penolakan,” ujar Febri Saputra, pendamping PKBI Bengkulu. “Alasannya bermacam-macam. Ada yang alasannya sedang ada

rapat, ada kegiatan di luar kantor, bahkan kepala dinas sedang tidak ada di kantor,” lanjut Febri.

Kunjungan dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan kondisi anak di Lapas dan bagaimana bisa bersama-sama memberikan dukungan bagi anak di Lapas.

Saat berkunjung, harapannya dapat bertemu dengan kepala dinas agar mendapatkan solusi atau bahkan mengambil keputusan dari persoalan anak di Lapas Curup. Namun kepala dinas sulit untuk ditemui. Kalau diterima, terkadang hanya diterima oleh staf ataupun kepala seksi (Kasi) yang membidangi masalah anak.

Pada saat bertemu mereka, selalu terkendala dalam pengambilan keputusan karena mereka tidak bisa mengambil keputusan dan harus melaporkan dahulu kepada kepala Dinas. Di setiap pertemuan juga ada dinas yang menyampaikan alasan tidak mempunyai anggaran atau sudah masuk tahun anggaran berjalan. Dinas tersebut tidak dapat melakukan program dan kegiatan untuk anak-anak di Lapas.

Kondisi tersebut tidak membuat PKBI Bengkulu berhenti untuk memastikan apakah dinas instansi mempunyai program dan kegiatan untuk dukungan bagi anak, khususnya untuk anak yang ada di Lapas. Setiap minggu pendamping PKBI Bengkulu selalu mendatangi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan Badan Kependudukan



dan Keluarga Berencana, sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain mendatangi langsung kantor masing-masing dinas, PKBI Bengkulu juga melakukan kegiatan pertemuan formal melalui kegiatan koordinasi penanganan anak berhadapan dengan hukum. Salah satu strategi PKBI Bengkulu agar semua pihak yang diundang hadir adalah dengan meminta pihak Lapas menyelenggarakan pertemuan tersebut di Lapas. Ini dilakukan agar para peserta pertemuan yang terdiri dari dinas instansi dan perguruan tinggi dapat juga melihat langsung kondisi anak-anak yang ada di Lapas Curup.

Strategi tersebut ternyata jitu. Semua dinas yang diundang hadir pada pertemuan tersebut. Dinas instansi pemerintah yang datang pada pertemuan koordinasi dihadiri langsung oleh kepala dinas. Kalau bukan kepala dinas yang hadir, yang datang mewakili adalah kepala bidang yang menangani persoalan anak. Pertemuan-pertemuan koordinasi ini juga dilakukan

Audensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong

secara reguler.

Pertemuan-pertemuan reguler tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk memberikan dukungan bagi anak-anak Lapas.

Pasca pertemuan-pertemuan koordinasi yang selalu menghasilkan kesepakatan bersama, PKBI Bengkulu melalui para pendampingnya, mendatangi kembali dinas instansi untuk menagih janji dari masing-masing pihak. Hal ini juga dilakukan berulang-ulang.

“Kami mendatangi kembali dinas instansi yang membuat kesepakatan dalam pertemuan koordinasi untuk mendapatkan rencana kegiatan yang disampaikan perwakilan dinas instansi dan yang tertera dalam dokumen kesepakatan,” ujar Febri.

Akhirnya kerja keras selama 3 tahun mulai kelihatan hasilnya. Pada 13 Agustus 2015, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Rejang Lebong, sebuah kerja sama dilakukan antara Lapas Curup, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas



Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penanganan Anak berhadapan Hukum Kabupaten Rejang Lebong

Sosial, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, dan PKBI Bengkulu.

Kerja sama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memenuhi hak-hak anak Lapas. Masing-masing pihak yang menandatangani MoU membuat rencana kegiatan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh kepala dinas dan pimpinan lembaga. Untuk instansi pemerintah, dokumen rencana kegiatan dapat juga ditandatangani oleh kepala bidang yang membidangi persoalan anak.

Harapannya, melalui kerja sama antar pihak, hak-hak anak Lapas terkait pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dapat terpenuhi.

Sayangnya harapan hanya sebatas harapan. Tak semua dinas instansi yang menandatangani kerja sama benar-benar bisa mewujudkannya. Padahal setelah penandatanganan kerja sama, semua pihak juga membuat rencana kegiatan atau program kerja untuk anak di Lapas. Namun akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kembali seperti biasa, hanya bersifat tentatif dan belum menjadi rutinitas dari dinas instansi.

Ketersediaan anggaran menjadi alasan dinas terkait tidak bisa menjalankan kesepakatan kerja sama. Namun sebagian sudah menunjukkan komitmennya, misalnya Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan kesehatan untuk anak-anak Lapas dan BKKBD melakukan kegiatan sosialisasi

generasi berencana (Genre) serta terkadang melibatkan Forum Anak Daerah. STAIN Curup juga mulai melakukan kegiatan rutin dengan melibatkan mahasiswa untuk memberikan layanan konseling sebaya.

Minimnya komitmen dinas instansi dalam memberikan dukungan bagi anak yang ada di Lapas, tidak membuat PKBI Bengkulu berhenti melakukan upaya advokasi. PKBI kembali mendatangi dinas instansi guna mendapatkan dukungan program dan kegiatan bagi anak yang ada di Lapas. Menemui kepala-kepala dinas, sampai bertemu dengan Wakil Bupati dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak anak yang ada di Lapas.

Kerja-kerja advokasi ini juga mendapat dukungan dari Kepala Lapas, Ahmad Faedhoni. PKBI Bengkulu dengan pihak Lapas kembali melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan lebih banyak pihak. Tidak hanya dinas instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media.

Dari pertemuan yang dilakukan, disepakati bahwa kesepakatan bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) belum dapat menjadi acuan bagi dinas instansi pemerintah kabupaten dalam menyusun program dan anggaran di masing-masing dinas. Diperlukan payung hukum dalam bentuk legalitas pemerintah kabupaten.



Ahmad Faedhoni, SH. MH
Kepala Lapas kelas IIA Curup Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Legalitas pemerintah kabupaten yang diperlukan adalah Surat Keputusan (SK) Bupati di tingkat paling minimal. Urusan memformalkan MoU untuk dijadikan Surat Keputusan Bupati disepakati akan dilakukan dan diadvokasikan secara bersama.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang saat ini menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dimandatkan sebagai koordinator dalam proses pengurusannya. Ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti disebutkan dalam Pasal 7, dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Selain mendorong keluarnya SK Bupati tersebut, PKBI Bengkulu juga aktif memastikan hak-hak anak di Lapas tetap bisa dipenuhi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan multipihak.

“Anak-anak harus mempunyai aktivitas yang rutin,” kata Ahmad Faedhoni, SH. MH, “Karena dengan mempunyai aktivitas yang rutin setiap hari, anak tidak merasa bosan dan jenuh,” lanjutnya.

“Saat ini, di Lapas dengan dukungan semua pihak, setiap hari ada kegiatan, seperti olahraga, latihan baris berbaris, pendidikan Alquran, dan latihan pramuka. Harapannya, di Lapas, anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya,” ujar Ahmad Faedhoni yang menjadi kepala Lapas Kelas IIA Curup sejak Oktober 2017.

Menurut Ahmad Faedhoni, dalam pembinaan anak di Lapas, pekerjaan beratnya adalah merubah pola pikir para petugas. “Mereka harus memahami bahwa pembinaan terhadap anak itu sangat berbeda dengan pembinaan kepada warga binaan dewasa,” ujarnya. “Jadi selain dukungan yang ada dari luar, kami juga harus menyiapkan petugas-petugas Lapas yang ramah anak,” lanjutnya.

Semangat kepala Lapas agar anak-anak di sana mendapatkan hak-haknya, serta kerja-kerja advokasi yang dilakukan bersama, akhirnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten. Keluarnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (FKPABH) adalah bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Oktober 2017.

Dukungan kebijakan ini juga diikuti dengan dukungan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk kegiatan Pelaksanaan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kegiatan ini dilakukan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong dengan kelompok sasaran kegiatan



Pelatihan keterampilan sebagai bekal pada saat bebas dan kembali ke masyarakat

adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarganya.

Saat ini, pemenuhan hak anak yang ada di Lapas sudah lebih baik dibandingkan saat Wawan, Adi, dan Leo, serta anak-anak lainnya berada di dalam Lapas.

Setiap hari sudah tersusun kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak. Kegiatan keagamaan mulai dari belajar salat sampai belajar mengaji. Kegiatan olahraga, seni, pramuka, layanan kesehatan dan konseling, serta fasilitasi minat dan bakat sudah tersedia.

Untuk layanan pendidikan, walau belum ada sekolah, anak-anak difasilitasi pendidikan kesetaraan melalui kejar paket A, B, dan C. Tiap hari Sabtu, mereka dibagi dalam tiga kelas sesuai tingkatan yang akan dipelajari. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Sejahtera Kabupaten Rejang Lebong memfasilitasi proses belajar mengajar tersebut.

“Sekarang banyak kegiatan di Lapas,” ujar Putra (17), salah seorang anak yang ada di Lapas. “Setiap hari kami mengikuti kegiatan, mulai dari olahraga

dan latihan baris berbaris yang dilakukan setiap pagi, latihan pramuka seminggu sekali, pendidikan keagamaan, serta sekolah setiap hari Sabtu,” lanjut Putra.

“Kami juga diajari tentang perbengkelan dan membuat kerajinan yang dilakukan di bengkel kerja Lapas,” ujar Herly (17) yang juga menjadi teman satu kamar Putra di Blok Anak Lapas Kelas IIA Curup.

Kondisi kamar saat ini juga sudah lebih baik. Kepala Lapas menginstruksikan bahwa masing-masing kamar di blok harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh lagi membuat coretan-coretan di dinding kamar. “Kami juga diberi kebebasan untuk mewarnai dinding kamar sesuai dengan kreasi dan warna yang disukai,” lanjut Herly.

Sudah seharusnya ketika berjumpa dan menatap wajah-wajah anak yang ada di Lapas, kita tidak lagi membicarakan kenapa anak-anak tersebut berada di sana. Justru saat ini harus dilihat apa yang mereka lakukan selama di Lapas dan seperti apa mereka merencanakan masa depannya.

BAGAIMANA MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK

UNDANGAN DARI LAPAS



PERTEMUAN PARA PIHAK

BERITA ACARA

DIDATANGI SATU-SATU



MENAGIH JANJI HASIL FORUM

IDENTIFIKASI PROGRAM



FORUM PARA PIHAK

MOU ANTAR ANGGOTA FORUM

RENCANA PROGRAM

SK BUPATI

PERLUASAN LAYANAN...





MELANGKAH PASTI

Oleh Annisa Inayah
PKBI, DKI Jakarta



PKBI MELIHAT LOKASI LPKA YANG BERTIMPITAN DENGAN LAPAS DEWASA MEMBAWA KERENTANAN TERSENDIRI BAGI ANAK-ANAK

Langkah kakinya kini terasa ringan, matanya berkaca-kaca merasakan kembali ke rumah ternyata. “Kerinduan hatiku menjadi baru, kutinggalkan semua masa lalu. Kutatap hari esok, indah dan damai. Kuingin menggapainya tuk hidupku,” penggalan lagu Melangkah Pasti, karya Jeki-teman karibnya, mengiringi langkah kaki Maul keluar dari LPKA Jakarta.

Sudah 8 bulan Maul berada di balik pengapnya jeruji besi Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Jakarta. Bukan hanya Maul yang menantikan momen bahagia untuk kembali mendekap keluarga dan menghirup udara bebas.

Masih ada Kele, Tio, dan Jeki yang menginginkan hal yang sama. Kini mereka hanya bisa melepas Maul, teman dekat mereka dengan senyuman ikhlas. Tio masih harus menunggu 16 bulan lagi untuk bisa bebas dari LPKA, Kele masih 22 bulan, dan Jeki paling lama, masa pembinaannya masih 34 bulan lagi.

Saat masuk LPKA, mereka masih muda. Maul, Tio, dan Kele baru 16 tahun, sedangkan Jeki lebih



muda setahun dibanding ketiganya. Mereka adalah anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH).

Berbeda dengan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), anak-anak di dalam LPKA ini masih membutuhkan perhatian dan pembinaan karena setiap anak yang berada pada situasi hukum merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapat perhatian dan pembinaan seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum dengan pembinaan, sehingga anak memiliki jati diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah yang menjadi perhatian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta.

Saat PKBI memulai fokusnya pada ABH pada 2015, LPKA baru diresmikan di Indonesia dan para petugas masih belajar bagaimana membina anak-anak, begitu juga di LPKA Jakarta. Membuat para petugas ini mampu melakukan pembinaan anak merupakan tantangan pertama.

PKBI DKI Jakarta melakukan pendekatan kepada petugas selama kurun 5 bulan dengan melihat kesulitan apa yang dihadapi petugas saat membina anak-anak. Bersama LPKA, mereka memulainya dengan melihat kembali Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA untuk mengetahui kebutuhan dan pedoman pembinaan anak. Lantas dibuatlah kesepakatan untuk bekerja sama menerapkan apa yang tertuang dalam undang-undang itu, bagaimana mendampingi dan mengayomi anak dengan melihat kondisi dan kebutuhan psikologisnya.

Inilah yang mengawali PKBI bertemu Maul dan teman-temannya. Jumlah mereka kurang lebih 40 anak.

PKBI melihat lokasi LPKA yang berhimpitan dengan Lapas dewasa membawa kerentanan tersendiri bagi anak-anak. Ketika berjalan melewati lorong, bisa dilihat anak-anak yang disuruh memindahkan barang oleh napi dewasa. Kerap makanan yang mereka dapat dari kunjungan keluarganya, diambil oleh napi dewasa.

Di LPKA inilah masa-masa kelam Maul dan teman-temannya dimulai. Masa saat relawan-relawan PKBI membantu mereka melwati masa-masa sulit itu.

SELAMA PROSES PERKENALAN DAN MENGANALISA KEBUTUHAN, ANAK-ANAK CENDERUNG MENUNDUK DAN MENGALIHKAN PANDANGANNYA

Pada awalnya Ella, Panji, dan Heni serta relawan-relawan lain PKBI melakukan perkenalan dan observasi. Mereka bertemu dan bertatap muka.

Maul dan Jeki mencoba menarik senyumnya dengan canggung, Tio mencoba bersalaman sambil menunduk, dan Kele yang menatap kami dengan serius serta anak-anak lain yang menunjukkan ekspresi berbeda-beda saat itu.

Para relawan memulai dengan menanyakan kabar dan memperkenalkan diri.

Selama proses perkenalan dan menganalisa kebutuhan, anak-anak cenderung menunduk dan mengalihkan pandangannya.

Hal yang paling Ella ingat ketika ia bertanya, “Teman-teman, kalau boleh *gue* tahu hal apa sih yang lagi teman-teman sukai?” Jeki menjawab, “Kalau di sini, gak ada yang disukai, Kak. Semuanya mah di-enakin aja, dikeong melulu.”

Anak-anak lain tertawa kecil sambil

melihat ke arah Jeki.

Tantangan terbesar saat melakukan observasi adalah anak-anak tidak sepenuhnya percaya, terbuka, dan siap untuk bertemu orang lain yang ingin membantu mereka.

Saat ditanya bagaimana perasaannya, Tio hanya menjawab datar, “Ya, baik.”

Melihat situasi ini, Ella dan kawan-kawannya mengubah strategi. Ia mengajak anak-anak berdiri dan bermain *games* rubah, pohon, dan gempa bumi.

Permainan ini cukup sederhana. Anak-anak diminta membentuk tim dan menemukan anggota timnya. Jika Ella berkata pohon maka peserta lain yang tadinya menjadi pohon harus berganti menjadi pohon di tempat tim yang lain. Permainan ini memakan banyak energi dan kecepatan karena mereka harus mencari timnya. Mereka yang gagal menemukan timnya dianggap kalah dan dihukum.

Permainan ini membuat anak-anak bergairah, bergerak cepat meskipun ada juga yang masih terlihat malas bergerak.

Setelah permainan usai, Ella mengajak anak mengeluarkan pendapatnya mengenai permainan tersebut.

“Seru, Kak. Bikin kompak”, ujar Maul.

Ella lantas membawa pertanyaannya lebih mendalam: apa yang ingin mereka lakukan di Lapas.

Jeki menjawab “Musik, Kak, biar saya bisa main gitar lagi.”

“Kak, gambar. Saya suka gambar,” sahut Maul.

Mulailah anak lain juga menyampaikan apa yang mereka sukai “Futsal, Kak. Adain futsal”.

Ella menuliskan gagasan-gagasan tadi di papan tulis. Ella menutup pertemuan hari itu dengan mengajak mereka menyimpulkan kegiatan dan doa penutup.

Semua hasil cerita dan gagasan dikumpulkan. Tim relawan melihat anak-anak memiliki kondisi yang rentan. Mereka tidak mengetahui dirinya. Mereka memandang dirinya negatif dan merasa rendah diri.

Kemudian tim relawan juga melakukan observasi kepada petugas Lapas. Mereka menanyakan bagaimana situasi anak-anak di LPKA.



Maul sedang menunjukkan kepiawaiannya memasak

Para petugas mengatakan bahwa sebagian anak terlihat memiliki emosi negatif, banyak terjadi perundungan antar anak, mereka tidak pernah dikunjungi oleh orang tua, juga masalah kesehatan yang dialami anak di LPKA.

PKBI lantas menyusun program yang saling berkaitan, yaitu psikososial, konseling, dan bakat minat. Program ini bertujuan membangun harga diri anak. Anak-anak ini perlu mengetahui jenis emosinya dan mampu mengelolanya, perlu mengerti bagaimana bertahan dan membangun komunikasi dengan teman di LPKA, dan mulai merencanakan apa yang ingin dilakukan ketika mereka bebas.

Program pertama adalah psikososial

Modul yang dikembangkan berasal dari materi-materi yang disusun melihat kebutuhan psikologis anak. Modul mengintegrasikan berbagai teori psikologis yang membahas seputar remaja, anak, psikologi perkembangan, dan faktor lain yang mempengaruhi psikososial anak.

Modul diimplementasikan dengan pendekatan-pendekatan yang merujuk situasi si anak, seperti pendekatan teman sebaya.

Teman sebaya merupakan relawan yang sebaya dengan anak-anak LPKA dan sudah memiliki perspektif pendidik sebaya. Relawan-relawan ini mendapat penguatan dan kapasitas mengenai bagaimana menjadi pendidik anak sebaya.

Bagian yang penting untuk membangun harga diri anak adalah mengenai konsep diri yang positif. Materi ini mengacu pada hasil observasi anak yang masih merasa kecewa dan menganggap diri mereka negatif. Metode yang digunakan yaitu bimbingan kelompok melalui pendekatan sebaya.

Dalam pendekatan ini, anak-anak melihat sebuah film berjudul Tarazamen, yang mengisahkan seorang anak dengan disleksia, tetapi dia mampu bertahan dan akhirnya sukses.

Pada saat menonton film, anak-anak terlihat sangat antusias dan merasa nyaman. Satu per satu, mereka terlihat memperbaiki posisi duduknya agar nyaman.

Setelah film selesai, mereka diminta untuk menggali apa yang diceritakan dalam film tersebut.

Selain menganalisa film, mereka

diminta menuliskan kelebihan dan kebaikan yang mereka miliki.

Dari 18 anak yang hadir, Maul menuliskan kelebihan dan kebaikannya adalah suka menolong dan mudah beradaptasi dengan teman.

Ada lagi, Jeki menjawab kelebihan adalah suka melawak dan kebaikan yang dimiliki adalah ia sangat sayang kepada kedua orang tuanya.

Saat tulisan dibacakan, teman-teman yang lain tertawa dan bertepuk tangan.

Pada tahapan ini, terlihat anak mulai membuka diri dengan tim, meskipun sebagian lain masih diam dan malu ketika dimintai pendapat, seperti Ikmal.

BAGIAN YANG PENTING UNTUK MEMBANGUN HARGA DIRI ANAK ADALAH MENGENAI KONSEP DIRI YANG POSITIF

Ikmal sesekali memalingkan wajahnya seakan mencari jawaban ketika ditanya. Meski begitu, Ikmal masih bisa didekati secara personal. Ia hanya tidak ingin banyak terlihat dalam kegiatan.

Selain konsep diri, masih ada tujuh materi tema lain yang diberikan setiap minggunya, yaitu bakat minat, resep disukai teman, belajar memaafkan, aku dan keluarga, norma sosial, rencana hidup, dan motivasi diri.

Maul, Tio, Jeki, dan Kele serta anak-anak lainnya mengikuti hampir seluruh sesi psikososial setiap minggunya.

Selama kegiatan, Maul yang paling bersemangat. Ia memiliki peluang bertahan dan mengajak teman-temannya agar tetap tegak berdiri walaupun berada di LPKA. Ia memberikan contoh positif untuk temannya.

“Kalau mau disukai teman, kita harus mendengarkan teman kita cerita

dan selalu ada, kayak saya,” ujarnya, setengah mempromosikan diri.

Maul humoris dan mudah tersenyum. Ia gampang memikat teman lainnya. Meskipun terlihat tegar dan sudah baik-baik saja, tetapi ketika memasuki materi mengenai “aku dan keluarga”, Maul terdiam dan memilih untuk menatap lurus ke depan.

Maul mampu menuliskan keluarga di dalam pohon keluarga dengan baik.

Ketika ditanya siapa yang paling dekat dengannya, Maul menjawab dengan pelan, “Ayah, Kak. Dia keluarga yang terus mendukung Maul dan sekarang Maul ngecewain dia karena harus ada di sini.”

Rupanya apa yang dirasakan Maul juga serupa yang dialami Tio. Saat menjawab pertanyaan yang sama, wajahnya sedikit tegas dan menatap lurus ke depan seakan ada yang ingin disampaikan. Ia sangat rindu kepada kedua orang tuanya, terlebih ibunya.

“Iya, Kak. Kalo bisa saya pengen ketemu ibu saya. *Udah kangen banget.*”

Mereka kemudian diajak menuangkan perasaan dalam sebuah surat untuk keluarga. Surat akan disampaikan langsung kepada keluarga.

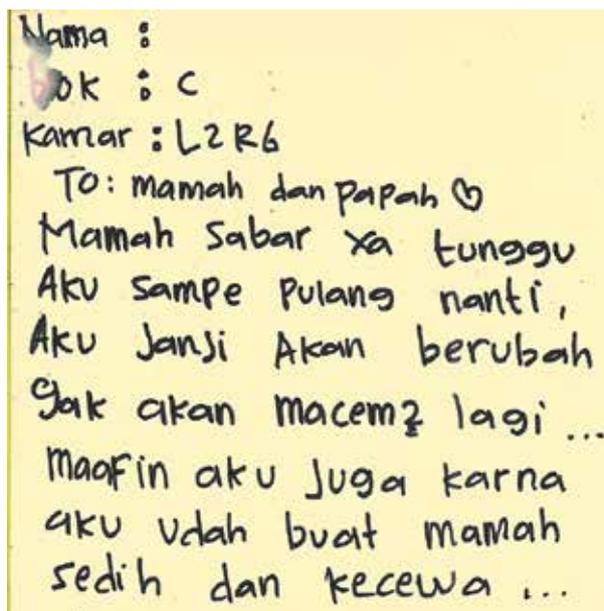
Program berikutnya adalah konseling

Konseling membantu setiap anak melihat dirinya dan menyelesaikan perasaan serta kondisi tidak baik yang dialami.

Konseling bisa membantu ketika anak mengalami tekanan. Ia bisa meluapkan dan menceritakan serta menyampaikan harapan-harapannya. Ia juga diajak memiliki pilihan-pilihan perilaku dan membangun perasaan yang lebih baik di LPKA.

Orang yang melakukan konseling disebut konselor. Seorang konselor harus memiliki lisensi pendidikan konseling.

PKBI menyiapkan konselor sebaya untuk mendengarkan perasaan anak-anak di LPKA.



Maul adalah anak pertama yang mengacungkan tangan ketika ditawarkan siapa yang ingin berkonseling.

Konselor sebaya membangun komunikasi dengan Maul sebelum memulai konseling, seperti menanyakan kabar, bagaimana perasaan hari ini, menu makanan apa baru dimakan siang tadi, dan sebagainya.

Kemudian konselor bertanya, “Maul mau cerita apa?”

Maul sedikit menunduk sembari menggeser posisi duduknya menjadi lebih tegak.

“Saya lagi sedih, Kak,” ujar Maul.

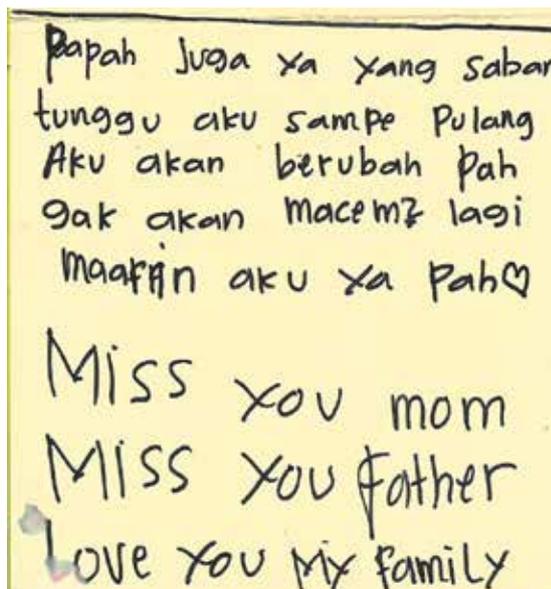
Lalu konselor bertanya, “Apa yang membuat Maul sedih?”

Maul menjawab, “Orang tua, Kak. Khawatir aja gitu jauh dari orang tua.”

“Kalau boleh tau, bentuk khawatir yang seperti apa yang Maul alami sehingga membuat Maul sedih?” tanya konselor.

Maul bercerita bahwa ia selalu merasa cemas ketika mendengar kabar ayahnya. Ia dekat dengan ayahnya dan merasa ia harus membahagiakan ayahnya.

Masalah yang dihadapi Maul tidak sederhana. Ibu dan ayahnya terancam bercerai. Meskipun penyebabnya bukan karena Maul berada di LPKA, tetapi hal itu membuatnya semakin tertekan dan khawatir. Maul merasa mengecewakan orang tuanya.



Surat untuk keluarga

Setelah selesai bercerita, Maul mengusap kedua matanya yang mulai berurai air mata.

Konselor memberikan waktu Maul untuk mendalami kesedihannya. Maul kemudian mengangkat kepalanya dan kembali tersenyum. "Maaf ya, Kak. Hehehe," ujar Maul.

Konselor menanggapi cerita Maul dengan menepuk pundaknya, "Aku memang *ga tau* persis rasanya jadi kamu, tapi dari cerita kamu aku merasakan kok."

Konselor lalu memberikan sebuah kertas dan ia diminta menuliskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Ada beberapa hal yang dituliskan Maul, yaitu takut ayah ibunya bercerai, khawatir teman-teman baik di luar menjauhinya, dan khawatir kalau ayahnya sakit karena memikirkannya.

Lantas dari bahan tersebut, konselor bertanya kembali tentang apa yang sudah dilakukannya untuk meredakan kekhawatirannya tersebut.

Maul menjawab, "Saya banyak berdoa *aja* buat kedua orang tua saya." Maul juga menambahkan bahwa dirinya juga mencoba berkomunikasi secara maksimal ketika kedua orang tuanya datang berkunjung.

Pada saat dikunjungi, Maul sempat memaksa ayah dan ibunya berjanji untuk

tidak bercerai. Ia ingin keluarganya utuh. "Saya sempat maksa mereka jangan sampai cerai dan harus berdua di rumah pas saya keluar. Coba kalau saya *gak* masuk sini, coba kalo saya buru-buru respon SMS temen saya kalo ada polisi yang mau datang ke rumah. *Ga ketangkep* saya dan *gak* bikin tambah banyak masalah *bokap nyokap*" ujar Maul menyesal.

Maul lantas menceritakan kronologis dia tinggal LPKA.

Saat itu malam Minggu pukul 8. Ia bersiap menghadiri pesta pernikahan temannya. Ia mendapat pesan singkat dari teman bahwa ada polisi yang mengintainya. Sayangnya dia tak menghiraukan pesan itu. Saat membuka pintu rumahnya, ia melihat dua orang polisi sedang mencari alamat seseorang.

Maul gemetar dan kaku. Ia berjalan cepat menuju kamar kakaknya. "Kak, kalau ada yang cari Maul, bilang Maul lagi keluar, gak ada."

Selang berapa menit, terdengar ketukan di pintu. Polisi itu mencari Maul. Kakaknya mengatakan jika Maul tak ada di rumah. Namun Polisi tidak percaya. Mereka meminta izin menggeledah rumah.

Tak lama polisi menemukan persembunyian Maul, di atap kamar mandi. Polisi memerintahkan Maul menyerah dan melepaskan tembakan peringatan. Pada peringatan ketiga Maul turun dari atap, menyerah.

Maul dibawa ke kantor Polsek, diinterogasi dan ditahan selama 14 hari, sebelum kemudian masuk proses persidangan.

Ia dan rekannya divonis 1 tahun 8 bulan dijerat pasal 114 UU tentang Narkotika. Sejak itu pikiran Maul seperti terhenti. Kehidupannya seakan gelap dan kehilangan arah.

Semua terjadi begitu cepat hingga dia kini di dalam LPKA. Maul mengakhiri ceritanya.



Di akhir cerita Maul, konselor mengajaknya mengevaluasi kejadian-kejadian dan perasaan-perasaan yang dialaminya. Ia diberi waktu untuk melakukan refleksi.

“Kak, evaluasi yang saya dapet yaitu lain kali saya *ngga* main narkoba dan sering berkomunikasi dengan orang tua meskipun keluarga saya kadang sibuk masing-masing.”

Kemudian Maul menuliskan beberapa hal yang perlu ia perbaiki seperti selalu berdoa untuk keselamatan ayah dan ibu, berusaha menjadi lebih baik selama belajar di sini, dan tidak pernah lelah untuk berubah.

Semua evaluasi tersebut menjadi pengingat Maul untuk meredakan kekhawatiran dan kesedihannya sampai dia nanti bebas dan bertemu kedua orang tuanya.

Konseling memberikan efek yang baik, tak hanya dirasakan Maul tapi juga anak lainnya.

Jeki juga pernah melakukan konseling. Jeki juga menyampaikan hal serupa, hanya bedanya Jeki memiliki kekhawatiran terhadap ibunya. Sebab yang selama ini mencari nafkah utama keluarga adalah Jeki. Kini ia tidak bisa lagi bekerja dan memiliki penghasilan untuk ibu dan adik-adiknya.

Jeki dan Maul melakukan konseling lebih dari satu kali.

“Enak *aja gitu*, Kak. Bisa dibantu sama PKBI buat *nyelesain* beban pikiran,” ujar Maul.

Pada proses konseling anak yang akan bebas, mereka harus selesai dengan dirinya terlebih dahulu. Artinya ia sudah memaafkan diri sendiri, tidak stres, dan anak bisa mengevaluasi dirinya.

Konselor membantu menggali perasaan mereka ketika akan bebas, adakah perasaan takut atau kekhawatiran untuk kembali ke masyarakat dan bagaimana menyikapi itu. Konselor juga mendiskusikan hambatan atau tantangan dalam diri dan apa yang menjadi kekuatan mereka. Proses ini diakhiri dengan mencari tahu dan mendiskusikan rencana mereka setelah bebas, baik dari segi individu, keluarga, pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Program ketiga yaitu bakat dan minat

Tio, Jeki, Kele, dan Maul tergabung dalam sebuah *band* di LPKA. Mereka bahkan berhasil menciptakan sebuah lagu, yang saat ini masih diingat oleh para penghuni LPKA. Lagu itu berjudul Melangkah Pasti.

Lagu ini dibuat dengan cukup serius hingga proses rekaman. Rekaman dilakukan di sebuah gudang kosong di dalam lingkungan LPKA. Pelatih musik mengajarkan mereka bagaimana menulis



Hasil gambar komik curhat anak LPKA

sebuah lagu.

Anak-anak diminta untuk menuliskannya ke dalam sebuah kertas. Setelah dua kali pertemuan, lirik lagu diseleksi dan dipilih yang paling bagus. Melangkah Pasti karya Jeki terpilih.

Melangkah Pasti

Hati terasa hampa tiada menentu, karena kesalahanku kuterbelunggu,
 Kini aku sadari yang telah terjadi, sehingga kumengerti arti hidupku ini...
 Kerinduan hatiku menjadi baru,
 kutinggalkan semua masa laluku,
 Kutatap hari esok, indah dan damai.
 Kuingin menggapainya tuk hidupku
 Aku melangkah pasti lewati banyak rintangan, meraih cita-cita agar hidupku berarti,
Aku melangkah pasti lewati banyak rintangan,
Demi masa depanku yang penuh pengharapan, bahagia....

Dalam bermusik, Jeki yang paling bersemangat. Ia memang suka bermain gitar.

Awalnya Jeki tidak terlalu pandai memainkan kunci yang beragam, sempat

pelatih mengarahkannya. Ia juga tak malu belajar dari Tio, sang pemegang *cajon* dan vokalis *band*.

Tio dan Jeki bisa bertukar alat musik, sementara Kele memegang gitar. Ketika mereka kehabisan nada, Kele memetik gitarnya dan mencoba menggabungkannya dengan nada yang dibuat.

Hanya Maul yang tak terlalu suka bermain musik.

“Saya lebih suka gambar *sebenarnya*. Lagi *gak mood* main musik,” ujarnya suatu kali.

Pelatih lantas memberikannya kertas dan spidol hitam. Ia diminta menggambar sesi berlatih musik. Maul pun membuat sketsa gambar teman-temannya yang sedang berlatih musik. Anggota *band* lainnya turut memberikan masukan pada Maul mengenai sudut gambar seperti apa yang menarik.

Di sinilah pentingnya kegiatan bakat minat komik *curhat*.

Komik *curhat* menjadi media alternatif di mana anak bisa menyampaikan curhatannya ke dalam sebuah gambar. Tio dan Maul pandai menggambarkan curahan isi hati mereka melalui gambar.

Komik *curhat* sudah naik cetak

Rencana Hidup	2016	2017	2018
menamatkan sekolah SMP/SLTA	✓		
membuka usaha untuk kemandirian pribadi			
meningkatkan niat untuk dekat pada Tuhan.	✓		
membahagikan ORTU dengan cara membah sikit		✓	
berajar lebih giat di bidang musik.		✓	
berbah sikit asar lebih dewasa dan mandiri.			✓
tidak akan mengecewakan orang tua lagi.			✓
ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap dan mapan.			✓
ingin membuat aktiviti agar tidak Boring/BT.	✓		
berubah sikit dan pelajaran menjadi lebih baik.	✓		
berusaha keluaran dan membuat sambilan		✓	
pernah jadi Pemain musik yang handal.			✓
membuat Bekuan suka dan menjadi sambilan		✓	

Motto =
Di tahun 2016-2018 saya mampu menjalankan Rencana hidup saya, Dan saya mampu menjadi orang Sukses! (AMIN) :D



Rencana hidup Maul

sebanyak tiga kali. Judul komiknya antara lain: Aku dan Orang Terdekat dan Hikmah di LPKA. Tema-tema dalam buku tersebut beragam seperti keluarga impian, maafin aku, ciri teman yang disukai, hikmah di LPKA, langkah baru, dan mesin waktu.

Komik curhat ditanggapi berbeda-beda oleh setiap anak. Tio tidak membutuhkan waktu lama untuk menggambar komik. Ia hanya membutuhkan spidol hitam dan kertas lalu ia mulai menggambar.

Maul lebih banyak diam dan memperhatikan bagaimana teknik menggambar, kemudian ia dengan cepat mengikuti itu. Maul lebih pandai melukis, hingga suatu waktu diberikan kesempatan untuk bisa melukis dan diajarkan bagaimana mengembangkan lukisan.

Karya Maul sempat ditampilkan di berbagai acara PKBI. Salah satunya pada Hari Anak Nasional di PKBI Pusat tahun 2016.

Semua program yang dilakukan di LPKA membawa anak ke dalam sebuah perubahan, baik perasaan, perilaku, dan komunikasi yang ada dalam diri mereka.

Anak yang baru masuk LPKA terlihat lebih siap menjalani kehidupan di LPKA. Mereka mengasah kemampuan mereka.

Sedangkan anak yang akan bebas, mereka mestinya memiliki rencana hidup yang jelas ketika kembali ke masyarakat. Hal ini terlihat dari perubahan yang dialami Maul dan teman-temannya.

Setelah bebas, Maul menjalani proses belajar di Dinas Sosial selama satu bulan. Ia belajar banyak hal dan memantapkan hidup untuk kembali ke masyarakat.

Saat dikunjungi pada 2017, Maul dan keluarganya menyampaikan bahwa sikap tetangga sekitar terhadap Maul tidak berubah. Tetangga dan keluarga menyambut baik kepulangannya.

Maul berusaha berkonsultasi kepada orang tua mengenai rencana hidupnya. Ia masuk klub sepak bola Forkab FC Gelandangan (Sayap) di daerah Depok dan berlatih setiap hari Sabtu. Ia juga melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Master.

Saat kembali dikunjungi pada April 2018, Maul sudah bekerja di sebuah kafe.

Kami bernostalgia dengan cerita-cerita di LPKA. Maul semakin merasa lebih baik. Ia bercita-cita menjadi koki.

“Sumpah! Maul merasakan *banget* pas ikutan PKBI di sana. Temen-temen jadi pada ada kegiatan, Maul jadi tahu ke depan mesti *ngapain*. Sekarang Maul *udah* tahu dan lancar menjalani kehidupan Maul. Maul diajak ikut kegiatan PKBI di luar kota, *ngerasain* lukisan Maul dipajang, dan *ngerasain manggung* sama temen-temen yang lain di acaranya PKBI bawain lagu Melangkah Pasti.”

Aku melangkah pasti lewati banyak rintangan demi masa depanku yang penuh pengharapan bahagia...



MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN PETUGAS

REKRUTMEN RELAWAN & PELATIHAN



OBSERVASI MELALUI TEMAN SEBAYA



METODA GAME, DISKUSI.

PUNYA KAPASITAS



REKRUTMEN KONSELOR

PROGRAM PSIKOSIAL & KONSELING



MINAT



PSIKOLOG



ANAK DILACU

BAGIAN 3

RYANG URRAN





DI DEPAN PINTU PUSKESMAS, TANGANNYA MENDADAK DINGIN

Oleh Bambang Y Sundayana
KAP Indonesia, Bandung

SEBUAH CERITA MEMULAI LANGKAH AWAL GERAKAN INKLUSI SOSIAL ANAK DAN REMAJA RENTAN DI KECAMATAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG

Dewi adalah seorang remaja putri yang masih berusia 15 tahun ketika tertarik mengikuti acara bikin 'seblak' di rumah Ibu Neni. Dia diajak teman-temannya yang sudah beberapa kali mengikuti 'kumpul-kumpul' bersama beberapa ibu di Kecamatan Sukajadi. Kebetulan posisi rumah Ibu Neni yang sering dijadikan tempat *ngumpul* tidak terlalu jauh dari rumah Dewi.

Sejak berusia 13 tahun, Dewi dan teman-temannya sering nongkrong di WARBU. Para remaja yang sering nongkrong di WARBU jumlahnya sekitar 10 sampai 20 orang. Rata-rata usia mereka 13-17 tahun. Sebagian besar dari mereka masih bersekolah tetapi ada sekitar tujuh orang yang sudah putus sekolah. WARBU adalah sebuah warung biasa yang menjual minuman dan makanan ringan seperti kopi, mi rebus, gorengan, rokok dan lain-lain. Lokasinya berada di wilayah kecamatan Sukajadi, tepatnya di seberang sebuah lapangan atau tanah kosong. Warung ini posisinya berada di tepi jalan perlintasan yang menghubungkan dua jalan besar, yaitu Jalan Sukajadi dan Jalan Pasteur.

Selain tempat berkumpul para remaja, WARBU sering menjadi tempat nongkrong dan persinggahan tukang ojek, *sales* barang, preman, intel polisi, anak-anak geng motor dan lain-lain. Beberapa



Suasana tempat nongkrong anak muda di Warbu Sukajadi Bandung

dari mereka mampir untuk beristirahat, sambil *ngopi* dan makan goreng *bala-bala*. Sebagian orang datang hanya untuk sekedar nongkrong sambil mengobrol dengan dibalut kepulan asap rokok.

WARBU juga menjadi salah satu tempat berkumpulnya anak-anak geng motor. XTC dan Moonraker adalah dua dari beberapa geng motor yang cukup dikenal anak muda Kota Bandung. Bisa dikatakan, hampir semua remaja yang nongkrong di WARBU menjadi anggota salah satu geng motor tersebut, termasuk Dewi yang menjadi anggota *Moonraker*.

Para anggota senior atau ‘pengurus’ dari kedua geng motor tersebut, seringkali menjadikan WARBU sebagai tempat untuk merekrut, mengumpulkan anggota muda, dan berbagai aktivitas lainnya. Bahkan mereka biasa menjadikan pojok lapangan di seberang WARBU, sebagai tempat ‘pesta’ minuman keras. Aktivitas tersebut dilakukan terutama pada malam hari.

Dewi dan teman-temannya lebih senang menghabiskan waktu di sana karena bisa bebas merokok dan pacaran, tanpa ada yang melarang. Bahkan pemilik warung, cenderung membiarkan perilaku anak-anak muda tersebut. WARBU pun menjadi tempat yang nyaman bagi mereka dibandingkan dengan di rumahnya sendiri.

Umumnya alasan mereka tidak nyaman di rumah, bisa karena rumahnya yang terlalu padat penghuni atau hubungan yang kurang harmonis dengan orang tuanya. Salah satu contohnya, disampaikan oleh Randy (17 tahun), salah seorang remaja laki-laki yang sering nongkrong di WARBU. Dia mengungkapkan bahwa rumah kontrakan keluarganya hanya memiliki dua kamar tidur. Satu dipakai oleh orang tuanya dan satu dipakai oleh dua orang adik perempuannya. Saat di rumah, Randy lebih sering tidur di kursi atau di karpet depan TV.

Adapun hubungan Randy dengan

ayahnya, yang bekerja sebagai buruh bangunan, tidak terlalu harmonis. Menurut dia, ayahnya sangat galak. “...*Hese ngomong jeung si bapa mah, can nanaon geus emosi ti heula.*” (Susah berkomunikasi dengan bapak karena belum apa-apa sudah emosi duluan), begitu diungkapkan oleh Randy ketika ditanya hubungan dia dengan orang tuanya. Ini dirasakan oleh Randy sejak ayahnya menikah lagi. Ayahnya bercerai dengan ibu kandung Randy saat dia berusia 11 tahun. Akhirnya tidak

WARBU JUGA MENJADI SALAH SATU TEMPAT BERKUMPULNYA ANAK-ANAK YANG TERIKAT PADA ORGANISASI GENG MOTOR.

mengherankan ketika Randy merasa lebih senang berada di luar rumah dan WARBU menjadi tempat yang nyaman untuk dirinya.

Hampir mirip dengan Randy, WARBU menjadi tempat untuk menghabiskan waktu Dewi sepulang sekolah. Saat ini Dewi tinggal hanya dengan ibunya dan seorang adik laki-laki di rumah petak kontrakan. Orang tuanya sudah berpisah sejak Dewi kelas 4 SD. Kini ayahnya sudah menikah lagi dan tinggal di daerah Cimahi. Walaupun jarak Cimahi dan Sukajadi tidak terlalu jauh, tapi dia sangat jarang bertemu ayahnya.

Ibu kandung Dewi bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke. Sebagai pemandu lagu, ibunya harus banyak bekerja di malam hari. “*Mamah* pergi kerja setelah asar dan pulang jam 2 pagi, bahkan kadang-kadang sampai jam 3”, ungkap Dewi tentang pekerjaan ibunya. Bertemu dengan teman-teman sebayanya di WARBU membuat rasa sepihnya hilang. Bisa mengobrol dan bercanda tawa sampai larut malam. Rokok dan kadang-kadang



Pelatihan untuk meningkatkan motivasi anak dampingan

minuman keras juga menemaninya saat nongkrong di WARBU.

Pergaulan Dewi di WARBU mengantarkannya pada perkenalan dengan seorang anggota senior geng motor yang kemudian menjadi pacarnya. Dia sudah berusia 21 tahun sementara Dewi berumur 14 tahun. Seperti umumnya remaja yang ada di situ, hubungan seksual dengan pacar merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Pengalaman hubungan seksual pertama kali pun dialami oleh Dewi, di usianya yang sangat dini.

Beberapa di antara anak remaja yang berada di situ, bahkan sudah melakukan hubungan seksual bukan saja dengan pacarnya. Hubungan seks dilakukan dengan preman, tukang ojek, sopir angkot, polisi, dan lain-lain. Mereka biasanya menerima imbalan untuk hubungan seks berupa uang jajan, pulsa telepon, dibelikan baju, atau bahkan hanya sekedar perlindungan. Seperti disampaikan oleh Ami seorang remaja putri berusia 16 tahun yang mendapat Rp500,000 setelah melakukan hubungan seks dengan seorang pria pemilik toko bangunan, “Pas kebetulan *nggak* punya uang, *Teh Susi ngasih* tahu ada yang mau itu.” Susi (32 tahun), adalah seorang perempuan dewasa yang dikenal oleh anak-anak sebagai preman dan ‘mucikari’. Dia cukup sering ikut nongkrong di WARBU dan beberapa kali menjadi ‘penghubung’ antara anak remaja dan orang-orang

dewasa pembeli jasa seks.

Dari aktivitas yang dilakukan oleh anak remaja di WARBU dapat disimpulkan bahwa Dewi dan juga anak remaja lainnya, memiliki kerentanan pada situasi eksploitasi seksual. Bahkan sebagian dari mereka sudah dapat dikategorikan sebagai korban Eksploitasi Seksual Anak (ESA). Mereka sangat rentan terinfeksi penyakit menular seksual, HIV/AIDS, mendapat kekerasan, bahkan bisa mengarah pada jebakan perdagangan manusia, serta kematian. Situasi itu pula yang menyebabkan anak-anak remaja tersebut mendapat stigma dari berbagai pihak. Dalam tatanan relasi sosial yang dilandasi norma, maka situasi diskriminatif seolah mendapatkan pembenaran.

WARBU merupakan salah satu tempat yang muncul dari proses pemetaan partisipatif masyarakat terkait persoalan ESA. Warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Anak (FKPA) memulai proses pemetaan sederhana tempat nongkrong anak dan remaja ESA setelah memiliki pemahaman atas persoalan tersebut. Tempat nongkrong ini sering diistilahkan oleh komunitas sebagai ‘hotspot’. Pemetaan ‘hotspot’ adalah bagian dari analisa situasi yang dijadikan strategi awal FKPA/ komunitas melakukan proses pendampingan pada anak.

Adanya keterlibatan dari warga untuk ikut



bertanggung jawab pada persoalan ESA, merupakan hasil dari proses yang cukup panjang. Pada awalnya, membicarakan ESA dengan masyarakat sangat sulit. Tidak terlalu banyak tanggapan dari peserta tentang ESA, ketika pertama kali melakukan pertemuan sosialisasi program di wilayah Kecamatan Sukajadi.

Peserta pertemuan yang meliputi warga masyarakat serta aparat kelurahan dan kecamatan, menganggap bahwa situasi ESA tidak terjadi di wilayahnya. Namun dalam pertemuan berikutnya, terjadi sedikit perubahan ketika diskusi diarahkan pada kasus-kasus yang sering dihadapi oleh remaja. Ada dua persoalan yang muncul dari hasil diskusi, yaitu kenakalan karena ikut geng motor dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) bagi remaja perempuan.

Pada akhirnya KTD menjadi pintu masuk untuk mengajak masyarakat mendiskusikan ESA. Hampir semua peserta yang datang dari 5 kelurahan, ternyata mengetahui sejumlah kasus tentang anak/remaja yang mengalami KTD di wilayahnya. Mereka melihat KTD adalah masalah yang sulit diselesaikan. Solusi yang umumnya diambil adalah dinikahkan, tanpa mempertimbangkan usia

**Penguatan
kapasitas
Forum
Komunikasi
Peduli Anak
(FKPA)**

korban yang masih relatif muda. Tidak jarang pernikahan pun dilakukan secara paksa hanya untuk menutupi aib. KTD juga berdampak pada putusnya pendidikan anak. Bisa dipastikan, hampir semua korban KTD dikeluarkan dari sekolah. Mendapat stigma negatif dengan dicap sebagai anak nakal dan pembuat malu keluarga adalah dampak yang muncul kemudian.

Melalui titik masuk persoalan KTD, maka berbagai topik pun menjadi materi berdiskusi dalam pertemuan-pertemuan warga selanjutnya. Topik yang menjadi isi diskusi berkala tersebut, disesuaikan dengan persoalan yang dimunculkan oleh warga masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, solusi pendidikan untuk anak putus sekolah, kebutuhan Akta Lahir, kejadian-kejadian Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada anak, dampak dari keterlibatan anak dengan geng motor, dan lain-lain. Hampir enam bulan diskusi dalam pertemuan warga dilakukan. Rata-rata pertemuan warga dilakukan sebulan dua kali.

Melalui persoalan yang muncul dalam diskusi oleh masyarakat maka informasi yang terkait dengan perlindungan anak



pun diberikan. Informasi tersebut di antaranya adalah Konvensi Hak Anak (KHA), kekerasan pada anak, pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak, hak kesehatan reproduksi, gender, konseling berbasis komunitas, dan lain-lain.

Di dalam pertemuan warga, dihadirkan beberapa narasumber. Narasumber yang sesuai dengan topik atau materi diskusi, misalnya dari Dinas Kesehatan/ Puskesmas untuk materi terkait kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk urusan identitas maupun Akta Lahir, universitas untuk teknik konseling, dan lain-lain. Pertemuan warga yang diisi dengan diskusi tentang topik-topik tersebut menjadi sebuah proses penguatan kapasitas komunitas, baik dari sisi substansi maupun membangun jejaring antara warga dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya.

Namun demikian, mendorong keterlibatan

masyarakat agar lebih memahami situasi ESA memang tidak mudah. Masyarakat memandang bahwa persoalan ESA, disebabkan kesalahan dari anaknya sendiri. Masyarakat terbiasa memberikan *label* bahwa anak itu memang nakal, malas sekolah, jarang pulang ke rumahnya, kalau pulang selalu malam, dan lain-lain. Sedikit sekali yang melihat anak dalam perspektif 'korban'. Padahal situasi yang dihadapi oleh anak-anak tersebut, hampir semuanya merupakan dampak dari persoalan-persoalan sebelumnya, misalnya disintegrasi keluarga, kekerasan anak, pengabaian orang tua, pengalaman seksual yang sangat dini, dan lain-lain.

Hal tersebut menjadi tantangan utama ketika bekerja dengan masyarakat. Bagaimana agar cara pandang masyarakat terhadap anak/remaja korban ESA ini berubah? Bagaimana mengubah situasi yang diskriminatif dan melakukan stigma menjadi



Diskusi penguatan kapasitas anak



Neni Sumiati adalah kader Forum Komunikasi Peduli Anak (FKPA) yang lebih akrab dipanggil Mamah Neni oleh anak-anak dampungan

hilang? Bagaimana menumbuhkan adanya pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga harus terpenuhi hak-haknya? Semua itu memerlukan ketekunan dan konsistensi mengupayakannya.

Rangkaian diskusi bersama warga menjadi media mencari pemahaman bersama tentang anak korban ESA. Pertemuan-pertemuan yang diisi dengan diskusi ini pun menjadi proses seleksi secara tidak langsung untuk menemukan anggota masyarakat yang konsisten berpartisipasi. Jumlah peserta yang terlibat diskusi dalam pertemuan warga semakin lama semakin menurun. Awalnya dihadiri sekitar 40-50 orang dan setelah pertemuan keenam jumlahnya tinggal 8-10 orang.

Namun pertemuan warga terus dilakukan secara konsisten.

Intensitas berdiskusi yang cukup sering dengan warga, pada akhirnya berhasil menandai orang-orang yang 'memiliki perhatian' pada persoalan ESA. Mereka memiliki gagasan-gagasan untuk mengajak anak terlibat dalam berbagai kegiatan. Sekelompok warga inilah yang kemudian mewadahi kegiatannya dalam sebuah forum yang dinamakan Forum Komunikasi Peduli Anak (FKPA) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Ibu Neni adalah salah seorang warga yang memiliki komitmen dan menjadi salah satu penggagas lahirnya FKPA. Dia adalah salah seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal bersama suami dan anak

perempuannya yang berumur sekitar 14 tahun. Suaminya bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu perusahaan, sedangkan anak perempuannya masih kelas dua SMP.

Rumah Ibu Neni berada di salah satu jalan sempit, di tengah-tengah pemukiman padat di Kelurahan Cipedes. Jalan menuju rumahnya hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau menggunakan motor. Walaupun berada di pemukiman padat, namun dari sela-sela atap rumah yang nyaris rapat di lingkungannya, masih bisa terlihat kemegahan sebuah bangunan pusat perbelanjaan modern Paris van Java (PVJ) dan beberapa bangunan bertingkat lainnya. Mal PVJ adalah pusat perbelanjaan yang cukup besar dan sangat terkenal di belahan utara Kota Bandung.

Pada pertemuan pertama, Ibu Neni hanya hadir karena formalitas saja sebagai anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diundang atas rekomendasi Pengurus PKK Kecamatan Sukajadi. Namun akhirnya, dia tertarik untuk terus mengikuti pertemuan dan aktif berdiskusi. Bu Neni mengungkapkan, bahwa dia menjadi sangat tertarik karena memiliki anak perempuan yang usianya sebaya dengan remaja korban ESA. Seperti yang dia sampaikan, “Saya punya anak hanya satu dan perempuan, takut sekali anak saya jadi korban pergaulan yang salah.”

Setelah sekitar enam bulan berproses, kegiatan ibu Neni dan kawan-kawan lainnya di FKPA sudah lebih banyak. Banyak anggota FKPA yang aktif, tetapi ada juga orang-orang baru yang ikut bergabung. Bahkan suami dari Ibu Neni pun mulai terlibat di dalam FKPA. Kegiatan yang dilakukan bukan saja pertemuan untuk berdiskusi tetapi membuat perencanaan kegiatan dan melaksanakannya. FKPA menyebutnya dengan istilah Rencana Aksi Masyarakat (RAM).

RAM disusun oleh warga di dalam FKPA, mulai dari pemetaan yang akan menjadi dasar disusunnya aktivitas bersama anak. Pemetaan bukan saja mengenali anak dan wilayah-wilayah ‘nongkrongnya’, tetapi sudah mulai berkomunikasi untuk mendapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang anak-anak minati.

Anak-anak tertarik untuk melakukan hal-hal



“SAYA PUNYA ANAK HANYA SATU DAN PEREMPUAN, TAKUT SEKALI ANAK SAYA JADI KORBAN PERGAULAN YANG SALAH”

Neni

yang sederhana saja, misalnya membuat makanan untuk berbuka puasa, jalan-jalan bersama di Taman Hutan Raya (Tahura) Juanda di area Dago Pakar, *outbound* di Punclut, ‘*ngarujak*’, bikin nasi liwet dan makan bersama, membicarakan perkembangan organisasi geng motor dan lain-lain.

Dari kegiatan-kegiatan yang sederhana tersebut, anak-anak menjadi akrab dengan anggota FKPA. Memang strategi yang dibangun adalah bagaimana membuat anak-anak merasa nyaman, percaya dan mau terus berkomunikasi dengan anggota FKPA. Menceramahi dan menyalahkan anak adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh FKPA. Seperti yang disampaikan suami dari Ibu Neni,



Konseling kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh bidan Tia di Puskesmas Sukajadi Kota Bandung

Pak Usman, “Kalau belum apa-apa sudah diceramahi pasti anak-anak *nggak* mau lagi kumpul-kumpul dengan kita, apalagi sampai dimarahi. Walaupun seringkali kelakukannya membuat jengkel.”

Melalui kegiatan bersama anak tersebut, disampaikan pemahaman-pemahaman baru misalnya risiko penyakit seksual menular, risiko kekerasan, narkoba, dan lain-lain. Anak-anak mau mendengarkan karena sudah terbangun rasa nyaman. Metode yang digunakan adalah ‘belajar dengan melakukan kegiatan secara bersama’. Misalnya untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, tidak selalu menggunakan paparan presentasi tetapi menggali pengetahuan anak melalui diskusi kelompok. Film menjadi salah satu media yang menarik untuk menjadi bahan diskusi bersama anak-anak.

Hampir satu tahun berkegiatan telah menunjukkan terbangunnya keakraban FKPA dengan anak dan remaja rentan yang didampingi. Anak-anak menjadi sering curhat pada anggota FKPA yang

memosisikan dirinya sebagai pendamping dan juga orang tua. Rasa percaya pada anggota FKPA tercermin dari panggilan mereka pada Ibu Neni dan ibu-ibu lainnya. Sekitar dua puluh anak yang didampingi memanggil ibu Neni dengan sebutan *Mamah*. Kegiatan pun seringkali dilakukan di rumah Ibu Neni. Bahkan beberapa anak menganggap rumah Ibu Neni menjadi rumah tempat nongkrong mereka yang baru. Membuat ‘*seblak*’ atau ‘*ngerujak*’ sambil mengobrol antara anak dan anggota FKPA menjadi aktivitas yang rutin.

Seringnya mengadakan kegiatan dengan anak berdampak pada berkurangnya waktu nongkrong mereka di WARBU. Memang belum bisa 100% menghilangkan kebiasaan nongkrong di WARBU, tetapi kini anak-anak memiliki alternatif lain. Sejumlah anak merasa nyaman berbicara terbuka kepada anggota forum (FKPA). Demikian halnya dengan Dewi. Dia menyampaikan keluhan terlambat datang bulan kepada Ibu Neni. Dewi merasa khawatir terjadi kehamilan karena aktivitas seksual dengan pacarnya.

Bagi FKPA, keterbukaan seperti inilah yang ditunggu dari anak. Saat itu juga Dewi diajak untuk menghubungi bidan di Puskesmas. Walaupun awalnya ragu-ragu, tetapi karena akan ditemani pergi ke Puskesmas, akhirnya Dewi mau. Dewi mengatakan, “Asalnya *nggak* mau ke Puskesmas. Takut dan malu juga kalau ketahuan hamil, tapi karena *Mamah* Neni mau *nemenin*, akhirnya pergi juga.”

Saat sampai di depan Puskesmas Sukajadi itulah tangannya terasa dingin dan semakin erat menggenggam tangan Ibu Neni. “*Asa ngadegdeg pisan pas mau masuk ke Puskesmas. Sieun petugasna garalak.*” (Terasa gemetar saat mau masuk Puskesmas, takut petugasnya galak-galak). Itulah yang diungkapkan Dewi saat pertama kali datang ke Puskesmas. Namun ketakutannya tidak beralasan ketika dia diterima oleh Bidan Tia secara terbuka dan

diajak ngobrol-ngobrol ringan sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bidan Tia adalah salah seorang petugas layanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sukajadi. Beberapa kali dia menjadi narasumber kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual, pada saat berdiskusi baik dalam pertemuan warga maupun dengan anak-anak dampingan. Bidan Tia dan hampir semua jajaran pemberi layanan di Puskesmas Sukajadi memiliki gagasan agar Puskesmas tidak dipandang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan saja.

Mereka ingin menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi bagi masyarakat terkait persoalan-persoalan kesehatan. Keberadaan petugas layanan yang memahami prinsip-prinsip pelayanan ramah anak, sangat membantu dalam proses membuka akses pada pemenuhan hak dasar layanan kesehatan bagi anak-anak dan remaja rentan. Bidan Tia pun memelopori untuk membuka komunikasi dengan anak-anak yang didampingi, melalui media sosial. Keluhan-keluhan kesehatan anak, keinginan melakukan konseling pun disampaikan melalui ponsel menggunakan aplikasi media sosial.

Pelayanan kesehatan yang ramah, pada akhirnya membuat Dewi dan teman-temannya sering memeriksakan diri ke Puskesmas. Bahkan Bidan Tia pun mejadi tempat curhat dari anak-anak dampingan. 'Mamah Tia' menjadi sebutan baru bagi sebagian anak-anak.

Dewi menjadi salah satu anak yang mengajak anak-anak lainnya untuk ikut dalam berbagai kegiatan FKPA. Dia juga beberapa kali mengajak teman-temannya untuk mengakses layanan Puskesmas. Bahkan tidak jarang, Dewi memberikan penjelasan ringan terkait kesehatan reproduksi kepada teman-teman di tempat nongkrongnya.

Kesehatan seksual dan reproduksi adalah hak yang harus dipenuhi bagi seluruh warga, tidak terkecuali anak dan remaja rentan. Pengabaian terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja yang terjebak pada situasi ESA, sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hak-hak reproduksi remaja yang nyata. Secara umum, tidak terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi remaja, pada akhirnya

akan mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam menangani seksualitasnya. Merekapun akan kesulitan menjadi *survivor* dari para pelanggar hak-hak reproduksi.

Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat adalah wujud kehadiran negara dalam memenuhi hak kesehatan bagi masyarakat. Namun keberadaan Puskesmas dengan segala kapasitasnya, tidak secara otomatis memberikan jaminan adanya pemenuhan hak dasar layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak dan remaja rentan.

Upaya mewujudkan pemenuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi anak/remaja rentan, tidak bisa hanya diselesaikan oleh layanan kesehatan dan anak/remaja rentan sendiri. Upaya ini perlu mendapat dukungan dari warga masyarakat. Bagaimanapun keterlibatan masyarakat sangat strategis untuk berperan menjadi 'penyambung' antara Puskesmas dengan anak/remaja rentan yang membutuhkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Bagi kami, semua yang dilakukan oleh masyarakat di atas adalah contoh praktik cerdas dalam mewujudkan gerakan inklusi sosial untuk anak dan remaja rentan. Berbagai aktivitas yang telah dilakukan FKPA, berdampak pada keluarnya Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk menetapkan tujuh Puskesmas ramah anak pada awal 2018. Pada saat yang sama, Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah menetapkan dan mengeluarkan anggaran untuk kegiatan penguatan anak dan remaja rentan secara rutin setiap tahun.

Satu langkah awal untuk sebuah perspektif baru dalam memosisikan masyarakat sipil, anak dan remaja rentan sebagai subjek inklusi. Dua kebijakan yang dicapai di atas, mungkin bukan merupakan 'kebijakan yang *bombastis*' tetapi menjadi capaian konkret dengan implementasi yang lebih mudah diawasi oleh masyarakat.



PERTEMUAN DENGAN WARGA

PUNYA KOMITMEN

SELEKSI KADER

PENGUATAN MATERI



PERTEMUAN REGULER

KORDINASI DINAS TERKAIT



PEMETAAN & RENCANA AKSI

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK



SK 7 PUSKESMAS RAMAH ANAK

IMPLEMENTASI

PENDEKATAN DI HOTSPOT



PENJANGKAUAN PENDAMPINGAN

PELEMBAGAAN RUANG MEDIA MAIN BERSAMA



SEKOLAH SIOMAY

SK KECA-MATAN

JEJARING LAYANAN

MOU FORUM & PUSKESMAS

HUBUNGAN RASA PERCAYA



PELAYANAN KESEHATAN



A white truck is parked in front of a building at night. The building has a corrugated metal roof and a window with blue curtains. The truck has 'KING 3000' and 'FMS 171' written on its front. The scene is illuminated by a light source from the building, creating a strong contrast with the dark night.

BERDAYA BERSAMA DANA DESA

Oleh Tatang
SEMAK, Garut

LEBIH DARI 20 PEREMPUAN MUDA BEKERJA DI WAREM DI SEPANJANG JALUR LIMBANGAN. SELAIN MENJAJAKAN MINUMAN KERAS, PARA GADIS JUGA DILACURKAN.

Minum di sini saja, Mas!” ajak Ina, 16 tahun, kepada sopir-sopir truk yang baru turun di parkirannya warung-warung yang berderet sepanjang jalur Limbangan-Malangbong. Jalur ini tempat yang ideal untuk beristirahat bagi sopir-sopir truk yang membawa barang dari Jakarta menuju Jawa Tengah.

Ina berdandan dengan bedak tebal, lipstik menyala, guratan alis buatan yang mencolok, dan berbusana ketat dan mini. Ia bekerja di warung yang menjual bir dan minuman keras. Warung-warung itu gaduh dengan lagu-lagu dangdut koplo.

Tak jarang ketika melayani pesanan minuman, Ina dicolek, dipeluk, kadang sambil dipangku pelanggan ketika menuangkan minuman. Semakin betah pelanggan minum, maka semakin banyak pula pesanan bir. Artinya semakin banyak pula uang persentase yang Ina dapatkan. Beberapa pelanggan yang tertarik bahkan biasa mem-*booking* Ina untuk dibawa ke suatu tempat.

Orang-orang menyebut tempat itu warung remang-remang atau lebih dikenal dengan sebutan “Warem”. Ada juga warem yang menyediakan satu atau dua bilik untuk disewakan melakukan hubungan seksual.



Salah satu anak dampungan yang sudah bisa mandiri

Namun bagi Ina, cerita di atas hanyalah masa lalu. Sejak tiga tahun lalu ia memilih menjadi penjahit yang menerima pesanan baju dari warga di sekitar rumahnya.

Warem banyak dijumpai di jalur selatan Jawa, tepatnya jalur yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kabupaten Tasikmalaya hingga Jawa Tengah. Di sinilah truk-truk besar pengangkut logistik, tambang pasir, dan bus antar kota lalu-lalang di antara Jakarta dan Bandung menuju Jawa Tengah bagian selatan atau sebaliknya.

Meski berdampak positif bagi perekonomian warga, keberadaan jalur ini justru berdampak negatif terhadap anak-anak bersama munculnya warem. Warung-warung inilah yang memanfaatkan jasa anak-anak sebagai pelayan warung yang juga menjual minuman keras.

Di Limbangan dan sekitarnya, sebagian remaja memanfaatkan atmosfer pesantren dengan mengikuti banyaknya pengajian untuk mengisi waktu luang. Sebagian lainnya lebih senang mengisi waktu luang dengan bersenang-senang dengan teman-temannya, nongkrong di alun-alun, menjadi anggota teman berkumpul, berhubungan seks dengan pacarnya, dan sering berganti pacar. Sebagian anak dari kelompok ini yang *drop out* bekerja menjadi penjual minuman di warem.

Kondisi ini tentu membuat anak-anak yang berada di sepanjang jalur ini menjadi rentan, termasuk anak-anak dengan orang tua yang perekonomiannya kurang mampu dan anak-anak *drop out*, kemudian bekerja sekolah. Mereka berpotensi menjadi pelayan warung remang-remang.

Lebih dari 20 perempuan muda bekerja di warem di sepanjang jalur Limbangan. Selain menjajakan minuman keras, para gadis juga dilacurkan. Inilah masalah pelik yang menarik sekelompok ibu-ibu di sebuah desa di sekitar Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk melindungi para

gadis ini dari tindakan eksploitasi seksual.

Ibu-ibu ini merasa harus mulai melakukan perlindungan terhadap anak-anak korban eksploitasi seksual di Limbangan dan sekitarnya.

Sayangnya isu perlindungan anak bukan isu prioritas Kabupaten Garut. Belum ditemukan ada Perda tentang perlindungan anak hingga 2015, apalagi pengalokasian dana untuk perlindungan anak di desa-desa.

ANAK YANG DILACURKAN (AYLA) MERUPAKAN KELOMPOK YANG PALING TERBAIKAN

Anak yang dilacurkan (AYLA) merupakan kelompok yang paling terabaikan. Tidak ada program penanganan atau pencegahan AYLA. Bahkan tak satu pun badan pemerintah atau dinas di Garut yang memiliki data AYLA. Jika ada penertiban wanita pekerja seks (WPS), maka AYLA yang turut tergaruk akan diperlakukan sama dengan WPS dewasa.

Baru pada 2016, terbit Perda No 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut. Namun setahun kemudian, Garut hanya memperoleh 225 poin pada evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2017. Padahal untuk mencapai Kabupaten Layak Anak dibutuhkan setidaknya 500 poin. Artinya Perda ini belum dilaksanakan sama sekali.

Namun Kabupaten Garut masih punya harapan. Limbangan memiliki perempuan-perempuan tangguh penggerak Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) yang memberi perhatian khusus pada anak-anak di desa.

Harapan ini bermula dari ibu-ibu di Limbangan yang prihatin terhadap banyak anak yang putus sekolah, baik yang keluar di tengah tahun ajaran atau tidak berhasil



Siti Maryam
Ketua pertama
KPMD

melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Temuan itu membuat kelompok ibu-ibu resah. Mereka pun semakin sering mendiskusikan keresahan mereka terhadap AYL. Ada keinginan untuk berbuat bagi anak-anak dan remaja rentan ini, apalagi melihat anak-anak itu sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan teman-teman sebayanya.

Setelah ibu-ibu mengungkapkan keresahannya, Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK) bersama ibu-ibu, membentuk Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) pada 2016. KPMD bertujuan menjadi wadah pembahasan dan solusi untuk setiap permasalahan anak di desa.

KPMD beranggotakan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari salah satu desa di Limbangan. Siti Maryam, 60 tahun, menjadi ketua pertama. Ia seorang perempuan paruh baya yang gesit dan berkomitmen tinggi.

Selepas diangkat menjadi ketua, Siti Maryam langsung bergerak mengunjungi warem-warem di sepanjang jalur Limbangan-Malangbong. Hasilnya, dua pemilik warem bergabung menjadi anggota KPMD.

Yayasan SEMAK membawa Program Peduli melalui isu Inklusi Sosial bagi Anak dan Remaja Rentan di Kabupaten Garut pada awal 2015.

Pemilihan Kabupaten Garut sebagai sasaran program awalnya berdasarkan pada diskusi-diskusi informal dengan staf Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Mereka mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Garut mulai bangkit sebagai kota wisata, dan mereka mulai sering menemukan AYL saat melakukan razia.

SEMAK melakukan diskusi serial secara informal dengan perwakilan forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Garut. Dari diskusi informal tersebut, diketahui bahwa menurut para TKSK, asal anak-anak tersebut adalah dari wilayah Garut Utara, tepatnya di seputar wilayah Limbangan dan Selaawi.

SEMAK memutuskan bekerja di tiga desa di wilayah tersebut dengan fokus kerja satu desa yang dekat dengan jalur selatan Pulau Jawa, antara Limbangan-Malangbong sebagai pusat aktivitas AYL.

Sayangnya, sambutan pemerintah desa berbeda dengan yang diharapkan. Mereka bahkan mengingkari kenyataan di desa mereka banyak anak dan remaja rentan menjadi korban kekerasan, narkoba, atau eksploitasi seksual. Program SEMAK dianggap mengada-ada. "Ini daerah pesantren. Di sini banyaknya remaja santri, bukan anak nakal.



Sebaiknya program ini dilaksanakan di desa lain saja!” ujar salah satu tokoh di desa.

Beruntung ada kelompok ibu-ibu yang sebagian besar anggota PKK justru menanggapi kehadiran Program Peduli. “Apa yang Ibu katakan memang benar,” kata seorang Ibu peserta pertemuan sosialisasi program pada salah satu staf lapangan SEMAK. “Saya sering melihat remaja desa sini seperti yang Ibu katakan di rapat tadi. Saya dan teman-teman akan bantu Ibu dan teman-teman,” tambahnya.

Bersama kelompok ibu-ibu ini kemudian SEMAK melakukan penggalian kembali dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Hasilnya terpetakanlah permasalahan-permasalahan anak dan remaja rentan di desa.

Hasil penggalian masalah ini dijadikan rujukan langkah selanjutnya. KPMD membuat sebuah rencana aksi yang mereka sebut Rencana Aksi Masyarakat. Rencana aksi tersebut kemudian dituangkan dalam

**Otong
Suryana,
Sekretaris
Desa
Limbangan**

berbagai kegiatan.

KPMD mulai memperlihatkan keberadaannya dengan melakukan kegiatan pendataan anak dan remaja yang dianggap rentan dan berdomisili di desa. Pendataan dimulai dengan memetakan posisi anak putus sekolah dengan kajian peta desa yang disesuaikan dengan data PKK.

Selanjutnya, setelah diketahui posisinya, KPMD mengunjungi keluarga tersebut untuk memastikan kebenaran bahwa anak tersebut putus sekolah, lalu dipastikan apakah anak tersebut menganggur atau bekerja.

Kemudian anak-anak yang telah didata, diajak berkegiatan bersama di sanggar anak. Kegiatan yang dilakukan mendapat dukungan sepenuhnya dari Program Peduli. Semakin hari semakin banyak anak yang ikut dalam kegiatan KPMD, termasuk di dalamnya adalah anak yang dianggap tidak rentan dan anak-anak yang masih sekolah.

Setiap hari KPMD berkegiatan dengan anak-anak di sanggar mulai dari berlatih

menggunakan komputer, memasak, menjahit, bermain bersama, atau memberikan les pelajaran bagi anak yang masih sekolah. Dalam sehari, anak yang sudah tidak sekolah bisa menghabiskan waktu sampai 6 jam di sanggar.

Kegiatan utama mereka hanya 1 atau 2 jam, sisanya dihabiskan untuk bercengkrama, saling curhat, saling mendekat. Hingga akhirnya di sanggar sudah tidak terlihat lagi mana AYLA dan mana yang bukan AYLA.

Hiruk pikuk sanggar kemudian mulai mendapat perhatian dari pihak pemerintah desa. Mereka mulai datang ke sanggar dan bertanya tentang kegiatan yang dilakukan serta kelompok sasarannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh KPMD sebagai momen penting untuk meraih kepedulian pemerintah desa.

KPMD bersama SEMAK kemudian memberikan penjelasan lebih rinci tentang Program Peduli dan pemahaman tentang hak anak kepada pemerintah desa.

Sejak saat itu, pihak desa mempermudah birokrasinya. Kemudian KPMD dan SEMAK mendorong lebih lanjut pemerintah desa untuk menyisihkan anggaran dana desa untuk kegiatan KPMD bersama anak.

Awalnya pemerintah desa mengelak dengan mengatakan kesulitan mengalokasikan anggaran dari dana desa. SEMAK dan KPMD mengajak sebuah lembaga peduli anggaran bernama Perkumpulan Inisiatif untuk memberikan pelatihan tentang undang-undang desa dan anggaran dana desa kepada pemerintah desa dan KPMD.

Pelatihan yang dilaksanakan secara serial ini diselingi dengan pelatihan hak anak oleh SEMAK untuk memberikan pengetahuan tentang hak anak, pentingnya pemenuhan hak anak, dan mencoba menimbulkan empati kepada anak.

Akhirnya KPMD untuk pertama kalinya diajak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di tiga desa di wilayah Limbangan dan Selaawi pada tahun 2016 sebagai kelompok pemerhati anak di desa. Salah satu desa bahkan memperbolehkan anak untuk terlibat langsung dalam Musrenbang desa.

KPMD mendapatkan alokasi dana desa sebesar



SEMAK HANYA SEBAGAI PEMICU SAJA KARENA KEGELISAHAN YANG SAMA SEBETULNYA SUDAH ADA JAUH SEBELUM SEMAK MENGINTERVENSI.

8 juta rupiah setiap desa untuk kegiatan tahun 2017.

Dana tersebut digunakan untuk kegiatan rutin KPMD bersama anak seperti les pelajaran sekolah dan latihan komputer, untuk pelatihan-pelatihan kepada orang tua seperti pelatihan pengasuhan yang baik dan pemahaman tentang hak anak, serta untuk kegiatan insidental seperti Hari Anak, Hari Kemerdekaan, dan Sumpah Pemuda yang biasanya bekerja sama dengan Karang Taruna Desa. Dana juga digunakan oleh KPMD untuk biaya operasional seperti pendekatan kepada anak-anak di warung remang-remang.

Kegiatan KPMD yang didukung dana desa



tersebut dirasakan secara langsung manfaatnya oleh anak-anak. Mereka bisa berkegiatan di sanggar dan mengisi kekosongan waktunya yang sebelumnya digunakan sekedar nongkrong di pinggir jalan atau di alun-alun Limbangan.

Salah satu manfaat dirasakan Dini. Anak *drop out* sekolah yang usianya 17 tahun. Ia kini memilih berlatih menjahit serta memasak bersama di sanggar daripada menghabiskan waktunya nongkrong di pinggir jalan seperti kebiasaan lamanya.

Lani, teman Dini juga memilih menunda niatnya untuk segera menikah setelah mengetahui risiko pernikahan dini, yang kerap jadi bahan diskusi di sanggar.

Ina yang sempat menikah dini dan bercerai ketika usianya masih anak, memilih tidak pergi ke warem. Ia kini menerima jahitan pakaian dan selalu mengajak kawan-kawannya untuk belajar menjahit di rumahnya.

Proses identifikasi masalah bersama masyarakat desa

Situasi Musrenbangdes di salah satu desa

“*Sok* aja yuk, belajar menjahit di rumah aku. Biar aku yang ngajarin. Siapa aja yang mau, hayu lah!” katanya mengajak temannya dari berbagai macam kalangan untuk belajar bersamanya.

“Mereka semua adalah teman kita. Kita harus merangkul mereka (AYLA), bukan menjauhinya, agar tidak lebih jauh terjerumus,” kata Muna, 20 tahun, mantan anak sanggar generasi pertama. Seorang anak pesantren yang menjadi peduli pada anak-anak sejak bergabung di sanggar.

Dampak lainnya, pemerintah desa menjadi tahu bahwa isu anak adalah isu yang penting. Hak anak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan pemenuhannya. Bukan hanya anak AYLA yang menjadi perhatian pemerintah desa, mereka juga ingin Balai Desa menjadi kantor yang ramah anak. Harapannya agar desa-desa di Limbangan adalah Desa yang Layak Anak.

Otong Suryana, Sekretaris Desa Limbangan, adalah orang di balik



**Lia
Mulyanawati,
Ketua Forum
KPMD**

dukungan penuh desa untuk Program Peduli. Ia mampu mempengaruhi bawahan dan atasannya mendukung kegiatan KPMD. Pemerintah desa bahkan menyumbangkan tanah milik desa untuk dijadikan sanggar. Hal itu disambut baik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut yang memberikan dukungan bagi pembangunan sanggar.

Peran SEMAK di Kabupaten Garut sebenarnya tidak terlalu besar. Jauh tertutupi oleh peran besar KPMD, pemerintah desa, dan individu-individu yang peduli anak. SEMAK hanya sebagai pemicu saja karena kegelisahan yang sama sebetulnya sudah ada jauh sebelum SEMAK mengintervensi.

Ketika SEMAK datang ke Limbangan, tinggal mengorganisir dan memberi sedikit pengetahuan tentang hak anak serta membangun kepedulian KPMD dan aparat desa. Selebihnya merekalah yang lebih banyak bekerja bersama masyarakat dan anak-anak. SEMAK berhasil menjangkau anak-anak di warem melalui sosialisasi kepada masyarakat desa. Kerja bersama ini berupaya memanusiaikan AYLA sebagai manusia.

KPMD mulai mengembangkan jaringannya ke tingkat kabupaten. Lobi KPMD berhasil meyakinkan Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari yang juga istri Bupati Garut, bersedia datang ke sanggar kegiatan anak.

Diah tertarik dengan kegiatan KPMD. Menurutnya kegiatan seperti itu banyak di Garut, tapi baru pertama kali sasarannya adalah anak-anak korban eksploitasi seksual komersial anak. Diah melalui pengaruh dan jaringannya mulai mendukung kegiatan KPMD, seperti misalnya mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendukung kegiatan KPMD.

Diah juga berhasil mendapatkan bantuan 2 mesin jahit dan 2 komputer untuk KPMD dari salah satu bank swasta di Garut. Peresmian bangunan sanggar dilakukan oleh Bupati Garut. Bupati bahkan menyumbang dana pribadi untuk kegiatan anak-anak di Limbangan.

SKPD di Garut menjadi lebih bersemangat menjalankan Perda No.13 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut. Berbagai sarana dan prasarana kabupaten layak anak terus dilengkapi.

Akhirnya Kabupaten Garut berhasil memperoleh nilai lebih dari 710 poin saat evaluasi Kabupaten Layak Anak, sebelum dilakukan verifikasi. Saat ini, Kabupaten Garut sedang menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika angka tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada verifikator, Garut akan mencapai tingkat Madya atau Nindya untuk Kabupaten Layak Anak.

MEMBANGUN DUKUNGAN WARGA



PENGGALIAN INFORMASI DENGAN IPU?



PELATIHAN & PENDAMPINGAN KADER



PEMETAAN U/ IDENTIFIKASI ESKA

KEGIATAN BERSAMA ANAK



MENGEMBANGKAN MINAT & BAKAT

PEMDES MEN-DUKUNG



KPMD MENJADI LEMBARA DESA

KOLABORASI DENGAN INISIATIF LAIN



PELATIHAN UU Desa DAN DANA DESA

ADVOKASI



MEMASTIKAN ANGGARAN

TIM II

A photograph of a man in a patterned shirt speaking into a microphone in a classroom setting. The room has a whiteboard, a desk with a blue cloth, and a window with green curtains. The text 'PENDAMPINGAN ANAK RENTAN DAN KORBAN BERBASIS SEKOLAH' is overlaid in large white letters.

PENDAMPINGAN ANAK RENTAN DAN KORBAN BERBASIS SEKOLAH

Oleh Machrus
YHS, Surabaya



Circle of (Lingkaran Setan)
antara Stigma dan Burn Out, serta
Manajemen Stress untuk Guru

MEMBANGUN SISTEM DETEKSI DINI MELALUI SEKOLAH DI TINGKAT SMP SERTA MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH ANAK DILAKUKAN YAYASAN HOTLINE SURABAYA (YHS)

Surabaya sangat terik pada saat Prili dan Keke mengunjungi sekolah Melani. Suasana begitu ramai karena bersamaan dengan bel pulang sekolah. Ada yang berlarian, ada juga siswa yang masuk ke ruang guru membawa buku, ada banyak siswa yang bergerombol sambil bergurau.

Sekolah dengan luas kurang lebih 5 ribu meter persegi itu menampung sekitar 850 orang.

Mereka berdua adalah pendamping anak dari Yayasan Hotline Surabaya (YHS) yang hari itu sengaja bertemu dengan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk menanyakan perkembangan Melani di sekolah.

Prili sudah membuat janji sebelumnya, dia langsung naik ke lantai dua di mana ruang BK terletak.

Melani adalah murid kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sebuah sekolah swasta di Surabaya. Usianya masih 14 tahun. Tubuhnya agak bongor sehingga membuatnya terlihat lebih dewasa dari umurnya.

Ayahnya menikah lagi setelah ibunya meninggal saat usia Melani baru 10 tahun. Ia mengikuti ayahnya yang tinggal di rumah ibu tirinya. Ayahnya membuka warung kopi di depan rumah.



Diskusi studi kasus penanganan masalah anak di sekolah yang melibatkan guru BK

Sayangnya hubungan Melani dan ibu tirinya tidak harmonis. Ia merasa ibu tirinya tidak mampu menggantikan sosok ibu kandungnya. Ia dan kakaknya, Safira, sering mendapatkan kekerasan psikis seperti dibentak dan dimarahi tanpa tahu kesalahan apa yang mereka lakukan.

Melani mulai tidak betah di rumah. Ia lebih suka nongkrong bersama teman-temannya. Di situlah dia bertemu dengan Robby, laki-laki berusia 24 tahun yang kemudian menjadi pacarnya. Sayangnya sang pacar seringkali memaksanya melakukan hubungan seksual.

Melani tidak berani menolak, karena menurutnya, Robby adalah sosok yang selama ini mengerti perasaannya. Ia menganggap pacarnya itu pengganti sosok ayahnya. Belakangan, diketahui pacarnya ternyata seorang pecandu narkoba jenis sabu-sabu. Saat dia mabuk, seringkali ia memaksa Melani melayani hasrat seksualnya. Mereka biasanya melakukan hubungan seksual di rumah Robby saat tak ada orang di rumah atau menyewa hotel. Pernah juga mereka kabur berdua ke Madura selama dua minggu.

Dalam sistem sekolah, peran wali kelas untuk melakukan deteksi dini anak-anak yang bermasalah aktif dilakukan. Wali kelas melakukan pendekatan kepada siswa dan melakukan konseling awal. Jika kasusnya agak berat, wali kelas kemudian merujuk siswa kepada guru BK untuk melakukan konseling lanjutan.

Perjumpaan para pendamping lapang YHS dengan Melani adalah berkat Dyah, guru Bimbingan Konseling (BK). Ia yang merujuk agar Prilli membantu Melani.

Dyah selama ini aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan YHS seperti pelatihan guru tentang hak anak, terminologi anak yang dilacurkan, pelatihan deteksi dini gejala tingkah laku, deteksi dini tingkat adiksi obat, dan pertemuan studi kasus guna membahas persoalan-persoalan



Proses konseling dan layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas Dupak

yang dihadapi di sekolah. Pelatihan-pelatihan itu juga diikuti oleh guru BK dari 8 sekolah di Kota Surabaya.

Dari proses tersebut, 32 anak terdeteksi sudah menjadi korban, baik yang ditemukan di pelatihan anak rentan maupun rujukan dari guru BK, dengan kasus yang kurang lebih sama seperti kasus yang dialami oleh Melani.

Hubungan kerja sama YHS dengan sekolah dimulai lewat diskusi dengan pihak sekolah. YHS masuk ke sekolah dalam rangka pencegahan agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual, korban kehamilan tidak diinginkan, serta korban eksploitasi seksual dan komersial. Ini membuat sekolah dengan mudah menerima kehadiran YHS.

Para guru BK yang mendapat pelatihan telah berperan sebagai sahabat siswa. Mereka tak hanya mengurus siswa yang berkasus saja, tapi juga melakukan deteksi dini terhadap siswa. Deteksi dini dilakukan jika ada siswa yang murung, sering menyendiri, atau seringkali tidak masuk kelas.



Interaksi pendamping anak YHS di sekolah

Kemudian mereka akan didekati, bahkan jika diperlukan, mereka juga melakukan kunjungan ke rumah siswa. Berbekal keterampilan dari pelatihan inilah Dyah mampu memahami situasi yang dihadapi Melani.

Dyah melihat Melani sering murung dan menyendiri. Ia mencoba mendekati Melani dan melakukan konseling, menanyakan kenapa muridnya itu sering murung dan menyendiri.

Proses konseling tidak bisa dilakukan hanya sekali. Perlu beberapa kali agar Melani tidak merasa diinterogasi.

Konseling awal dengan Melani berlangsung kurang lebih dua minggu. Akhirnya Melani menceritakan masalah yang dihadapinya. Ia mengeluh kelaminnya sakit saat buang air kecil dan ia kerap menderita keputihan dengan bau tidak sedap. Dia juga mengakui jika dia sering melakukan hubungan seksual dengan pacarnya yang kini sudah ditangkap polisi bersama empat orang temannya karena kasus narkoba.

Dyah akhirnya meminta YHS melakukan pendampingan. Inilah yang mengantarkan Prilli melakukan konseling terhadap Melani. Konseling tahap kedua ini dilakukan lebih mendalam.

Prilli menggali permasalahan yang dihadapi si anak, mulai dari latar belakang keluarga, komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada

anak, serta kebiasaan atau perilaku anak. Tak hanya menggali informasi, dalam proses konseling juga diberikan edukasi kepada anak tentang *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan kesehatan reproduksi mulai dari penularan hingga pencegahan yang harus dilakukan.

Melani kelihatan bingung. Dalam keadaan bingung Melani hanya bisa pasrah kepada Kak Prilli, panggilan akrabnya kepada Prilli. “Saya hanya ingin masalah saya selesai dan hubungan dengan ayah kembali baik,” kata Melani.

Sambil menangis, Melani berharap dapat dibantu menyelesaikan masalahnya, termasuk gangguan kesehatan reproduksinya. Prilli bersedia membantu asalkan Melani sungguh-sungguh mau mengikuti proses konseling.

Dua hari kemudian, keduanya melakukan pemeriksaan di Puskesmas Dupak. Puskesmas ini menyediakan layanan kesehatan yang sudah ramah layanan kesehatan reproduksi terhadap anak.

Mereka bertemu dengan Ningsih, dokter Puskesmas di poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Hasil pemeriksaan ternyata Melani positif mengidap Infeksi Menular Seksual (IMS) jenis *Gonorrhoe* (GO) atau kencing nanah. Dokter menduga hal itu diakibatkan perilaku seksual Melani dengan pacarnya. Untunglah saat dilakukan tes darah



untuk mengetahui kandungan HIV serta tes kehamilan, hasilnya negatif.

Setelah pemeriksaan, konseling tak berhenti, masih ada konseling lanjutan oleh pendamping YHS. Kali ini berfokus pada perubahan perilaku Melani.

Prilli meminta komitmen agar Melani mengubah perilakunya. Ia diminta mengurangi aktivitas seksualnya, bahkan menghentikannya jika memungkinkan. Ia juga diajarkan bagaimana melakukan negosiasi dengan pasangannya untuk menggunakan kondom agar terhindar dari risiko menderita IMS, HIV, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Tak hanya berproses dengan Melani, Prilli juga melakukan kunjungan ke rumah orang tua Melani dan bertemu dengan ayahnya. Melani memutuskan untuk sementara, selama enam bulan, tinggal bersama dengan kakaknya di rumah ibu mereka. Langkah ini merupakan bagian komitmen bersama untuk mengubah perilaku yang sudah disepakati bersama pendamping.

Interaksi guru BK bersama siswa disekolah

Sore itu, Basri, ayah Melani, sedang duduk di teras rumahnya ketika Prilli berkunjung. Mereka berdua sepakat bertemu dan mendiskusikan masalah Melani. Prilli memulai perbincangan dengan menanyakan pekerjaan, umur, jumlah anak, dan kegiatan keseharian sang ayah.

“Saya kecewa, Mbak, dengan Melani. Dia itu tidak mau nurut,” ujar Bas tentang anaknya.

Meskipun begitu, Bas juga menyesal tidak bisa mengawasi anaknya semenjak ia menikah lagi. Dia mengakui anaknya itu sejak kecil memang sangat dekat dengan almarhum ibunya. Ia sendiri tidak begitu dekat dengan Melani semenjak istri pertamanya meninggal. Ia menyadari bahwa anaknya kehilangan sosok ibunya, sementara dia sebagai ayah jarang komunikasi dengan Melani.

“Pak, mau tidak Melani kembali menjadi anak yang seperti dulu waktu ibunya masih ada?” tanya Prilli.

“Mau, Mbak,” jawab Pak Bas.

“Pernah tidak, Pak Bas tanya kenapa Melani seperti itu?” lanjut Prilli. Bas hanya terdiam.

“Mau tidak, Pak Bas sedikit perhatian kepada Melani? Saya ingin Bapak mendukung Melani untuk berubah,” tambah Prilli.

“Masa depan Melani masih panjang. Pak Bas pasti tidak mau anaknya tidak *nurut* kepada orang tua. Melani cuma butuh perhatian dari Bapak. Nanti sedikit-sedikit anak akan berubah. Jika ingin anak berubah, maka Bapak yang harus berubah dulu karena anak akan melihat perubahan Bapak,” pungkas prilli.

Ayah Melani menyanggupi ajakan Prilli.

Sejak itu, setiap dua minggu, Prilli memantau perkembangan Melani untuk mengetahui perubahan apa yang telah terjadi. Selain perubahan perilaku seksualnya, ia juga memperhatikan perubahan perilaku kesehariannya. Melani sudah berhenti dari kegiatan seks bebasnya.

“Saya ingin sembuh dari penyakit saya,” ujarnya.

“Ok, aku akan berusaha bantu, tapi kuncinya ada di kamu sendiri. Kamu yang memutuskan perubahannya,” jawab Prilli.

Selain mendampingi sang anak, Prilli juga terus menjalin komunikasi dengan Bas dan Dyah untuk melihat perkembangan Melani, baik di rumah maupun sekolah.

Selain mendiskusikan Melani, Dyah juga sering mengajak diskusi tentang permasalahan anak didiknya yang lain. Tindakannya ini didukung penuh oleh Rohim selaku kepala sekolah. Ia juga menjadikan program deteksi dini gejala tingkah laku pada anak sebagai program di sekolah yang dipimpinnya.

“Anak sudah menjadi korban. Jangan lagi dikorbankan,” itu kata yang sering didengar dari Rohim.

Program konseling yang dilakukan YHS pada dasarnya menggunakan daur waktu yang digunakan oleh seorang anak. Umumnya anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dan di keluarga.

Oleh karenanya, jika ingin membantu menyelesaikan masalah anak maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara guru dan orang tua

dengan cara komunikasi yang baik. Jadi, ketika anak mendapatkan masalah, ia bisa bercerita pada guru dan orang tua, dan bisa diarahkan menjadi hal yang positif.

Biasanya para guru cenderung memiliki stigma kepada siswa yang mengalami permasalahan serupa Melani. Mungkin juga karena mereka mengalami *burn out* atau mengalami kejenuhan karena mereka tidak tahu cara mengatasi masalah siswa tersebut. Contoh kasusnya, ada siswa yang selalu bikin ulah di sekolah dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Guru sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi perilaku anak masih tetap sama. Jika ada kasus berulang, para guru memilih melakukan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.

Melani cukup beruntung karena memiliki guru seperti Dyah yang memiliki kemampuan memahami masalah anak seperti Melani. Ia juga beruntung dipertemukan dengan Prilli, pendamping YHS yang dengan sabar mendampinginya lepas dari masalahnya.

Semakin banyak sekolah yang bisa membuat sistem deteksi dini dan penanganan anak, akan semakin banyak anak tercegah menjadi korban dan anak-anak yang memiliki masalah dapat tertangani dengan cepat.

Penanganan di sekolah sangat efektif karena anak dan orang tua terikat dengan aturan sekolah dalam waktu yang relatif lama. Jika sistem ini bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lain, dampaknya akan luar biasa bagi masa depan anak-anak kita.

Peran guru BK sangat strategis dalam upaya melakukan deteksi dini. Hal itu dimungkinkan karena guru BK adalah penghubung antara anak dengan sekolah. Guru BK menjadi motor penggerak dalam proses deteksi dini.

Keharmonisan terjadi karena terbinanya hubungan baik antara pihak sekolah dan YHS. YHS mencoba memahami kebutuhan sekolah untuk menjaga nama baiknya, sekaligus tidak mengorbankan anak untuk menjaga nama baik sekolah.

Dengan kata lain, masalah anak tertangani dan nama baik sekolah tetap terjaga sehingga penerimaan murid baru tetap sesuai dengan target.



PELATIHAN





KPM DAN HARAPAN PERLINDUNGAN ANAK

Oleh Dewi Astri Sudirman
Children Crisis Centre, Lampung

Sanggar Muda Ceria Panjang Selatan



Ar, masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia tinggal di bekas lokalisasi Pemandangan, Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Lokasi yang kerap ditanggapi dengan “Oooo...” panjang dan nada merendahkan oleh lawan bicara jika memperkenalkan diri dari wilayah tersebut.

Namun Ar tak mau rendah diri. Dengan suara lantang ia menceritakan kondisi masyarakat, khususnya problem anak di tempat tinggalnya, dalam Forum Anak Kota Bandar Lampung. Tentu saja tak serta merta Ar berani tampil mewakili anak yang dilacurkan (AYLA) di wilayahnya. Ia harus melalui proses belajar bersama Komite Pendidikan Masyarakat (KPM).

Ar adalah anak sulung dari dua bersaudara. Ibunya merupakan mantan pekerja seks komersial (PSK). Ayahnya pecandu narkoba yang bekerja sebagai penjaga keamanan di kafe-kafe di bekas lokalisasi. Ar sering berselisih paham dengan mereka. Ar sering tidak pulang ke rumah karena merasa tidak nyaman.

“Dimarahin terus sama *mamak*. Aku sering



Anak-anak membaca buku di perpustakaan Sanggar Pelangi

“BANYAK ANAK DIEKSPLOITASI DAN MENGALAMI KEKERASAN DI KAMPUNG SAYA. ANAK-ANAK DIPAKSA BEKERJA. MEREKA TERPAKSA PUTUS SEKOLAH. MEREKA TAK BETAH DI SEKOLAH KARENA MEREKA BANYAK DIEJEK. KAMI JUGA SULIT MENGURUS AKTA KELAHIRAN, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), DAN BANTUAN PEMERINTAH LAINNYA KARENA ORANG TUA KAMI TAK MEMILIKI SURAT NIKAH. SUASANA KAMPUNG KAMI PADAT DAN KUMUH. TAK ADA RUANG TERBUKA UNTUK BERMAIN. ALIH-ALIH, ANAK-ANAK MUDAH TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN SEKS BEBAS.”

Ar, 16 tahun, pada Pertemuan Forum Anak Kota Lampung di Gedung Tapis, Kota Bandar Lampung, 17 April 2018.



jadi sasaran kemarahan *mamak* kalau habis berantem sama bapak karena bapak gak pernah kasih uang ke *mamak*. Uang bapak selalu habis buat narkoba dan main perempuan. Aku juga suka emosi kalau tetangga *ngomongin* keluarga aku. Aku sama *mamak* suka *berantem* sama tetangga yang suka *ngomongin* keluarga aku,” ujar Ar.

Ibu Ar bekerja serabutan jadi buruh cuci, kadang-kadang jadi kurir narkoba. Karena kondisi ekonomi yang minim dan sering mendapatkan kekerasan dari orang tua, Ar tidak betah di rumah jadi ia sering mencari nyaman dan perhatian dari orang tuanya. Ia sering tidak pulang dan menginap di rumah teman-temannya. Ia hampir saja putus sekolah karena orang tua tidak ada biaya.

Ar sering keluar malam bersama teman-temannya, bahkan bolos sekolah. “Biasanya aku *nemenin* temanku kerja sama om-om. *Kitaorang* *nemenin* om-om nyanyi sama jalan-jalan. *Abis* itu tidur, *abis* itu baru *kitaorang* dikasih uang. Duitnya yang bagi *temen* aku, Mbak. Kalau *dapet* 700 ribu, aku dikasih 200 ribu. Kalau dapat 500

Rapat Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) Kelurahan Way Lunik

ribu, aku dapat 100 ribu. Tugasku hanya *nemenin ngobrol* sekaligus ngerayu sama ngelus-ngelus pahanya om, Mbak. Kadang-kadang aku suka dicium-cium juga dan payudaraku dipegang-pegang sama om-om. Kalau omnya sudah kepengen, aku suka *ngeles*, ‘sama temenku aja, Om’. Aku *mah* cuma *nemenin* aja,” ujar Ar.

Sempat terbesit di pikiran Ar menjadi seperti temannya. “Enak kali ya jadi kamu, Put. Bisa beli HP bagus, *ngasih* uang jajan ke *adek-adek*, *ngasih* uang ke *mamak*, beliin *mamak* baju baru,” ujar Ar. Namun pikiran itu hilang ketika ia sering diajak Ning, panggilan Iin Indarwati (38), salah satu pengurus KPM di Kelurahan Way Lunik, untuk ikut kegiatan di Sanggar Pelangi.

“Aku sering diajak jalan-jalan sambil diskusi sama CCC. Di sanggar, aku sering diajak diskusi, marawis, mengaji, menari, dan pelatihan serta kursus-kursus keterampilan. CCC juga pernah *dateng* ke sekolah *ngasih* sosialisasi ke teman-teman di sekolah. Aku jadi *nggak* merasa sendiri. Aku juga punya banyak teman yang baik dan perhatian sama aku. Kalau ada tetangga

“MEREKA ITU SERING MINTA CARIIN ‘CENNEL’, MBAK, SAMA AKU. KALAU DAPET ‘CENNEL’, AKU DIKASIH UANG 100 RIBU DARI SI OM. KADANG-KADANG SAMPE 300 RIBU. TERGANTUNG OM-OMNYA JUGA.”

yang jahat sama keluargaku, temen-temen aku selalu *ngasih support*. Kadang kalau aku berantem sama *mamak*, Ning selalu ada *dengerin* cerita aku dan nasehatin *mamak*,” ujar Ar. CCC adalah singkatan dari Children Crisis Centre.

Pengalaman dan cerita Rano (15) berbeda. Rano adalah seorang anak laki-laki yang sering diminta teman sebayanya untuk menjajakan AYLA kepada sopir-sopir *Fuso*, pekerja kapal, dan orang dewasa lainnya. Rano pernah diminta menemani temannya ke “jalan lintas” di Kabupaten Mesuji dan Sumatera Selatan.

Sekali menemani dan mengantar AYLA ke “jalan lintas”, RA mendapatkan upah 1 - 1,5 juta rupiah. Biaya transportasi dan makan selama perjalanan ditanggung oleh pemilik rumah makan sekaligus kafe remang-remang. Rano juga kerap mendapatkan kiriman uang dari temannya yang sudah “sukses” karena mendapatkan banyak konsumen atau mendapatkan uang lebih, “bonus” dari *user*.

Selain itu, ia kerap diminta membantu menjajakan dan menemani temannya mencari *user* hingga bertransaksi langsung. Dalam sekali transaksi, ia bisa mendapatkan uang 200 hingga 300 ribu rupiah dari *user* dan AYLA.

“Mereka itu sering minta cariin ‘cennel’, Mbak, sama aku. Kalau dapet ‘cennel’, aku dikasih uang 100 ribu dari si om. Kadang-kadang sampe 300 ribu. Tergantung om-omnya juga. Selain dapet dari si om, aku juga minta ke temenku yang aku kasih



‘cennel’,” ujarnya.

Ar dan Rano adalah sedikit dari sekelumit kisah anak-anak yang tinggal di daerah bekas lokalisasi. Tingginya minat *user* yang menginginkan PSK muda/remaja, wilayah padat penduduk yang dekat dengan pusat bisnis, dan budaya kekerasan terhadap anak-anak di eks lokalisasi, memicu seringnya anak mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain Ar dan Rano, ada juga anak yang awalnya menjadi biduan organ tunggal, kemudian menjadi pemandu lagu di kafe remang-remang sekaligus menjual minuman. Lalu lambat laun menjadi PSK.

Ada juga anak dari seorang PSK, dititipkan ke warga yang memiliki profesi menjadi mucikari, ataupun mantan mucikari. Mereka kemudian ditelantarkan atau ditinggalkan tanpa kabar oleh PSK tersebut. Ia kemudian menjadi anak angkat sang pengasuh. Setelah remaja, anak perempuan



Anak-anak belajar tari daerah Lampung bersama relawan dari Sanggar Taman Budaya

tersebut diminta bekerja, membantu ekonomi keluarga dengan menjadi PSK.

KPM merupakan hasil inisiasi warga yang tinggal di dua bekas lokalisasi Pemandangan (Kelurahan Waylunik)-daerah yang juga kerap disebut Kampung Sawah, dan eks lokalisasi Pantai Harapan (Kelurahan Panjang Selatan) yang berada di Kecamatan Panjang. Kedua lokasi ini sangat berdekatan dengan pelabuhan kapal peti kemas milik Pelabuhan Indonesia (PELINDO) II.

Di pelabuhan, orang keluar masuk dan memudahkan PSK melakukan transaksi seksual, baik dengan para pendatang maupun dengan masyarakat sekitar karena lokasi mereka berada di dalam perkampungan.

Berpuluh tahun sudah kedua lokalisasi

ini membaaur dengan masyarakat sekitar saat transaksi seksual terjadi. Situasi ini sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakat di kampung karena mereka berdekatan dengan kegiatan seks bebas, narkoba, kejahatan perdagangan orang, dan sangat rawan kriminalitas. Hal ini memungkinkan anak-anak, khususnya perempuan muda seperti Ar, terjebak dalam situasi menjadi AYLA.

Keprihatinan masyarakat terhadap situasi ini mengantarkan mereka bekerja sama dengan CCC untuk membantu anak-anak seperti Ar.

Namun ternyata tak semudah yang dibayangkan. Saat CCC pertama kali datang dan bertemu dengan masyarakat di dua eks lokalisasi tersebut, mereka sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. CCC dianggap seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) umumnya yang kerjanya cuma mencari data.

Saat memperkenalkan Program Peduli, mereka juga berhadapan dengan premanisme yang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di lingkungan bekas lokalisasi. Belum lagi menghadapi masyarakat yang menganggap CCC seperti “malaikat penolong” yang datang dengan berbagai macam bantuan.

Namun situasi ini tak menyurutkan langkah.

Langkah penting Program Peduli di dua lokasi tersebut adalah saat bertemu dan mengenal orang-orang kunci yang memiliki pengaruh dan mau bertindak mengubah situasi, seperti keluarga Nur Salim (58) di Kelurahan Way Lunik dan Keluarga Herman Nasir (56) di Panjang Selatan. Keduanya tokoh utama KPM.

Nur Salim adalah pendatang dari Banten yang lama bermukim di perkampungan Kampung Sawah. Awalnya Nur Salim menentang keberadaan CCC. Ia menganggap CCC mendukung keberadaan eks lokalisasi karena melindungi anak-anak

yang terjebak situasi AYLA.

Saat audiensi dengan Walikota Bandar Lampung, CCC dianggap mau melegalkan praktik prostitusi di Bandar Lampung.

Tantangan di atas dijawab CCC dengan strategi melakukan pendekatan serta menggandeng pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKKB dan PP) Kota Bandar Lampung. Bersama dengan Dinas Sosial dan PPPA, CCC melakukan sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan AYLA di dua eks lokalisasi agar dapat diterima oleh masyarakat.

Setelah berhasil masuk dan mengenal beberapa tokoh di sana, CCC mencari tokoh kunci yang berpengaruh dan memiliki komitmen serta konsisten untuk merubah situasi AYLA. Selama 5 tahun lebih terbentuknya KPM, KPM mengalami jatuh bangun dalam perjalanannya. Kesadaran masyarakat yang beranggapan CCC hadir untuk memberikan bantuan membuat CCC sulit mencari tokoh kunci yang memiliki niat tulus melakukan perubahan terhadap situasi AYLA.

KPM pernah mengalami vakum selama beberapa tahun pada kepengurusan pertama karena salah menempatkan kader di kepengurusan KPM. Hal ini dipicu adanya anggapan masyarakat dengan dibentuknya KPM akan ada bantuan dana dan modal usaha dari CCC atau pihak lain. Akibatnya ada beberapa kelompok masyarakat yang berebut dan saling intrik untuk menjadi Ketua KPM. Adanya korupsi dana program KPM oleh pengurus juga membuat program tidak berjalan di komunitas.

Pentingnya investigasi tokoh kunci dan upaya melahirkan kader-kader baru, serta ditunjang edukasi yang intensif dan peningkatan kapasitas kader, menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk kader organik yang lahir dari komunitas.

Pembentukan Kelompok Kerja dan Gugus Tugas penanganan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan dan perdagangan orang di Bandar Lampung menjadi forum yang efektif untuk mempertemukan KPM dengan Organisasi



Nur Salim dan Herman Nasir, tokoh masyarakat penggerak perubahan terhadap kondisi AYLA di Kelurahan Way Lunik dan Panjang Selatan

Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga lainnya karena KPM sering mengalami penolakan jika mendatangi OPD satu per satu.

Berhasil mendinamisir dinas-dinas pemerintah, lewat forum tersebut CCC memfasilitasi KPM berinteraksi dengan OPD dan lembaga lainnya. Komunikasi yang baik di antara mereka membuat kader-kader KPM mendapatkan pembinaan lebih lanjut oleh Dinas PPPA dan lembaga sosial masyarakat lainnya.

Kader KPM pun menjadi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kapasitas KPM meningkat karena dibekali dengan pelatihan-peningkatan kapasitas seperti pelatihan hak anak, pola asuh, paralegal, dan analisa anggaran berbasis anak sebagai modal KPM melakukan advokasi di masyarakat.

Salah satu kemajuan dari kerja sama ini adalah diangkatnya Iin Indrawati, salah satu anggota KPM, sebagai Ketua PATBM Bandar Lampung dan Ketua Forum Orang tua Asuh (FOtA). Ia aktif melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Panjang dengan memanfaatkan jaringan



PATBM dan FotA. Cara ini lebih efektif dalam mendapatkan tanggapan segera dari pihak kepolisian dan dinas dalam pendampingan kasus.

Setelah melihat apa yang dilakukan CCC, Nur Salim yang sebelumnya menentang keberadaan CCC menjadi berubah haluan. Tidak mudah mendapatkan simpati darinya. Butuh lebih dari dua tahun untuk menggugah hatinya untuk menjadi lebih peduli dan melakukan advokasi kasus-kasus anak di komunitas.

Melihat jatuh bangun dan kegigihan CCC dalam membangun KPM, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan CCC bersama anak dan memberikan perubahan yang baik terhadap anak, Nur Salim tergugah untuk lebih peduli terhadap KPM dan anak di komunitas. Ia bahkan menghibahkan tanahnya yang berdekatan dengan musala miliknya menjadi sanggar untuk anak-anak di Kelurahan Way Lunik.

Cerita Herman Nasir (56) sebagai penggerak KPM di Kelurahan Panjang Selatan lain lagi. Ia sebenarnya pendatang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang

Herman Nasir

sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Sebelum aktif di KPM, dia aktif di berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan. Ia pernah tercatat sebagai relawan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung dan LSM Lingkungan Mitra Bentala.

Tangan dingin keduanya dan kerja-kerja untuk meyakinkan masyarakat membuat Program Peduli diterima dan didukung masyarakat dua kelurahan tersebut.

Setelah pembentukan KPM, CCC bersama warga di dua eks lokalisasi melakukan pemetaan masalah-masalah warga. Hal ini menjadi bahan diskusi di antara masyarakat. Pemetaan ikut membuka wacana tentang tanggung jawab warga eks lokalisasi terhadap lingkungan sosial untuk bersama-sama melakukan perlindungan dan pemenuhan hak AYLA, serta menghapus stigma wilayah itu dianggap tempat maksiat.

Pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan berbagai persoalan warga

dilakukan. Persoalan yang mengemuka adalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah menjadi persoalan krusial yang harus ditangani.

Diskusi lanjutan dengan masyarakat, setelah pemetaan masalah, melahirkan usulan untuk membentuk satu wadah sebagai alat mempersatukan kehendak warga. Pada forum dialog warga, disepakati aktor penggerak dan nama alat pemersatunya yaitu Komite Pendidikan Masyarakat. KPM diharapkan menjadi tempat warga berdiskusi dan membangun cita-cita bersama mewujudkan dunia yang lebih baik untuk kepentingan anak.

Hingga saat ini, KPM telah dua kali berganti kepengurusan di Kelurahan Way Lunik dan tiga kali pergantian kepengurusan di Kelurahan Panjang Selatan.

KPM menjadi ujung tombak kegiatan seperti pelatihan hak anak, pelatihan pola pengasuhan yang baik, konseling anak dan orang tua, advokasi hak dasar anak di komunitas, dan menjadi wadah menyusun Rencana Aksi Masyarakat (RAM). Melalui RAM, warga menyusun bersama langkah-langkah dan strategi kegiatan KPM dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain melakukan pendampingan kasus dan pemenuhan hak anak terutama AYLA, KPM juga dipercaya masyarakat untuk membantu kasus-kasus lainnya seperti membantu masyarakat yang sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, hingga membantu masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran. Tidak jarang juga kader KPM menjadi tempat curhat masalah keluarga oleh beberapa masyarakat.

Lagi-lagi konsolidasi dengan pemerintah menjadi langkah jitu dalam mendapatkan solusi pembuatan identitas (akta) anak titipan PSK di eks lokalisasi. Strategi diawali dengan audiensi dan lobi kepada Kelurahan Way Lunik, Panjang Selatan, dan Kecamatan Panjang serta Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Jurnalis lokal lalu dilibatkan sehingga persoalan terangkat ke publik. Akhirnya, Camat Kecamatan Panjang bersedia mengkoordinir pembuatan akta kelahiran.

Selain kegiatan tersebut, CCC bersama KPM membuat sanggar di dua kelurahan tersebut.



Sanggar menjadi tempat berbaurnya AYLA dengan anak lainnya di komunitas. Selain itu, sanggar juga menjadi wadah anak-anak berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Belakangan ini, sanggar juga menjadi pusat kegiatan kesenian dan Taman Pendidikan Agama (TPA).

Selain membuat sanggar, CCC bersama KPM juga membentuk Forum Anak di dua kelurahan tersebut. Forum Anak melibatkan AYLA sebagai pengurus forumnya. Sama seperti kepengurusan KPM memiliki program kegiatan yang diberi nama Rencana Aksi Masyarakat (RAM), Forum Anak juga memiliki program kegiatan tahunan yang diberi nama Rencana Aksi Forum Anak (RAFA).

Salah satu kegiatan RAFA adalah Gebyar



Inklusi pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kecamatan Panjang sebagai upaya penghapusan stigma masyarakat terhadap anak-anak yang tinggal di wilayah Panjang.

Belakangan ini, KPM mampu melakukan advokasi dan upaya perlindungan di eks lokalisasi lewat “Kesepakatan Warga” yang dibuat warga dan para pemangku kepentingan lainnya di dua kelurahan, Panjang Selatan dan Way Lunik.

Kerja-kerja KPM dirasakan Ana Mariana (59). “Saat ini sudah tidak ada lagi anak yang bermain di lokalisasi

**KPM sedang
berbincang-
bincang di
Sanggar
Muda Ceria**

pada malam hari. Apabila ada anak yang masih nongkrong malam di seputaran eks lokalisasi, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) langsung menegur anak dan mendatangi atau menghubungi Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menegur anak dan orang tuanya.”

“Saya sering melihat Pak Made berkunjung dan keliling di area eks lokalisasi. Pak Lurah juga sering datang ke sini, mengontrol TPA yang ada di Balai Pertemuan Umum (BPU),” ujar Ana Mariana. Made adalah anggota Bhabinkamtibmas.



Bhabinkamtibmas sedang melakukan patroli jam malam anak di bekas lokalisasi

“DULU BPU SUKA JADI TEMPAT *MOJOK* DAN *NGELEM* ANAK-ANAK. NAMUN, SEKARANG BPU DISULAP MENJADI TPA OLEH LURAH PANJANG SELATAN DAN INI BARU PERTAMA KALI TERJADI SEPANJANG SAYA TINGGAL DI SINI,”

Ana Mariana

Sebelumnya, BPU yang berada di tengah-tengah eks lokalisasi Kelurahan Panjang Selatan sering dijadikan tempat maksiat oleh para PSK dan anak-anak.

“Dulu BPU suka jadi tempat *mojok* dan *ngelem* anak-anak. Namun, sekarang BPU disulap menjadi TPA oleh Lurah Panjang Selatan dan ini baru pertama kali terjadi sepanjang saya tinggal di sini,” ujar Ana Mariana, salah satu warga yang sudah cukup lama tinggal di eks lokalisasi.

Kini KPM mampu melahirkan kader-kader baru dan handal. Mereka tak hanya jago kandang, para kader mampu menjadi pelaku utama PATBM.

Konsep yang dikembangkan KPM menjadi percontohan gerak PATBM. Peran kader-kader KPM menjadi penentu dinamika PATBM di Kota Bandar Lampung. Mereka juga terlibat aktif membantu Dinas PPPA dalam upaya memenuhi persyaratan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Layak Anak (KLA).

SOSIALISASI
TENTANG SITUASI
ESKA



IDENTIFIKASI
TOKOH

BERSAMA DINAS



KOMITE PENDIDIKAN
MASYARAKAT

PEMETAAN &
PENDATAAN



ADVOKASI



SANGGAR



WORKING
GROUP

PEMENUHAN
HAK ANAK &
PELAYANAN



MEMUNCUL-
KAN RELA-
WAN



PENERIMAAN
SOSIAL



BERTRANSFORMASI

A photograph of a narrow alleyway in a community. The walls are made of corrugated metal and are decorated with colorful murals. Several people are walking away from the camera. In the foreground, a woman in a yellow and white sweater and blue jeans is walking. To her right, a woman in a black top and patterned pants is walking. Further right, a woman in a blue hijab and patterned skirt is walking. The alleyway is paved with bricks and has a blue-painted curb on the right side. The sky is overcast.

MELINTASI LORONG, MEMANUSIAKAN AYLA

Oleh **Edi Ariadi**
YKPM, Makasar

STOP.

WARKOBA

LORONG-LORONG DI KOTA MAKASSAR TAK HANYA MENJADI SAKSI TERJADINYA BERAGAM BENTUK KEKERASAN PADA ANAK. IA JUGA SAKSI TUMBUHNYA PARA KADER PEDULI ANAK.

Rukiyah (41) tinggal di Kaloku Bodoa, kelurahan paling padat penduduknya di Kecamatan Tala, Kota Makassar. Rumahnya yang kuning terang, berdesakan dengan rumah-rumah lainnya di salah satu lorong di jalan kapal dek. Anakanya, Yuli, tinggal di lantai dua.

Lima saudara Yuli laki-laki. Keluarga besar dengan banyak anak sudah biasa di Kaloku Bodoa. Khususnya di Rukun Tetangga (RT) tempat Rukiyah tinggal, RT 3 yang populasinya mencapai hampir 200 keluarga. Jika malam hari datang, jalan-jalan kampung terasa sesak dengan motor, anak kecil berlari-lari di tengah jalan, sementara yang remaja nongkrong di pinggir jalan, orang dewasa duduk di depan rumah dengan keluarga yang lain.

Belum lagi pedagang yang menjajakan dagangannya. Jalan-jalan kampung yang lebarnya hanya 1,5 - 2,5 meter inilah yang disebut lorong. Lorong-lorong ini menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, kelurahan hingga kecamatan. Jika di Pulau Jawa, lorong itu mirip dengan gang.



“Lorong-lorong di sini sudah tak seangker dulu,” kata Rukiyah. Dulu orang tidak berani datang ke kampung-kampung sepanjang lorong. Di samping jalan menuju rumahnya rusak dan gelap tak berlampu, kawasan ini dikenal rawan kejahatan.

Menurut data, ada sekitar 7 dari 5 kecamatan di Kota Makassar yang memiliki situasi serupa dengan Kelurahan Kaluku Bodoa. Semuanya terhubung oleh lorong-lorong seperti digambarkan di atas.

“Biasanya kawasan-kawasan ini memiliki kesamaan. Penduduknya padat, banyak pengangguran, pendidikan dan layanan kesehatan rendah. Lorong-lorong ini sebenarnya rata-rata merupakan kantong-kantong orang miskin di Makassar. Penduduknya padat, hampir tiap rumah bisa dihuni oleh dua sampai empat keluarga. Rumah Rukiyah yang luasnya sekitar 50 meter persegi, ditinggali dua keluarga. “Totalnya sembilan orang,” kata Rukiyah.

Sebagian besar laki-laki di sana bekerja di bidang informal, rata-rata buruh bangunan. Mabuk karena minuman keras pemandangan biasa. Tak sedikit anak remaja yang putus sekolah, menganggur, dan terlibat kenakalan remaja serta obat-obatan terlarang. Belakangan, tak sedikit anak-anak kecil *mengelem*, mengisap aroma lem agar bisa merasakan sensasi memabukkan. Inilah yang membuat kawasan lorong dikenal rawan. Dulunya juga sering ada perang busur yang penyebabnya sepele saja. Kadang karena perempuan, kadang karena tersenggol saat naik motor,” tambah Rukiyah.

Anak-anak remaja, laki-laki dan perempuan, nongkrong tengah malam adalah hal biasa.

Ada istilah untuk anak remaja perempuan yang nongkrong hingga tengah malam. Mereka dijuluki “*Kambing Potele*”. Sebenarnya istilah ini asalnya sebutan untuk pedagang bakwan mini berisi

udang yang makin malam makin laris pembeli. *Kambing* artinya bakwan. Artinya masyarakat memandang buruk perempuan yang nongkrong hingga tengah malam tapi tak mampu berbuat sesuatu.

Ada juga istilah “Ajuri”, anak jual diri. Istilah ini dipakai oleh kelompok-kelompok waria.

“SEBAGIAN BESAR LAKI-LAKI DI SANA BEKERJA DI BIDANG INFORMAL, RATA-RATA BURUH BANGUNAN. MABUK KARENA MINUMAN KERAS Pemandangan BIASA.”

Istilah-istilah serupa juga dipakai untuk menunjukkan identitas kelompok. GGS salah satunya, atau Gila-Gila Sendiri. Mereka adalah sekelompok remaja perempuan yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka saling bersahabat karena merasakan nasib yang sama, tak puas dengan situasi ekonomi keluarga dan kerap dimarahi orang tuanya di rumah.

Tahun lalu, Rukiyah dan teman-temannya berhasil membebaskan anak saat hampir ditahan polisi.

“Ibunya Rizki datang pada saya. Dia minta tolong karena anaknya hilang. Dia juga sudah lapor polisi. Kami akhirnya masuk kampung keluar kampung untuk mencari anak-anak GGS itu. Akhirnya ditemukan. Ternyata mereka merencanakan akan melarikan diri ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami lakukan mediasi, baik dengan keluarga ketiga anak itu, juga dengan kelurahan dan polisi. Akhirnya mereka setuju tiga anak itu dikirim ke rumah aman Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak (DPPA) untuk

mendapat penyadaran. Tentu saja tak semua kasus bisa diselesaikan dengan baik seperti GGS. Ada juga anak remaja yang memutuskan meninggalkan rumah dan bekerja sebagai penghibur di kafe dan warung-warung pangkalan truk.”

Kabar baiknya, orang-orang seperti Rukiyah kini makin banyak di Kelurahan Kaluku Bodoa. Bahkan ada juga yang berprofesi sebagai perantara perdagangan anak, kini berhenti dan bergabung untuk memperbaiki kondisi anak di sekitar rumahnya.

“Saya sekarang punya 10 kader di kelurahan sini,” kata Ruki, panggilan Rukiyah. Ia adalah kader Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) yang mendampingi anak-anak yang dilacurkan, atau AYLA.

Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat melibatkan Rukiyah menjadi pendamping karena pengalamannya menjadi penggerak warga di kampungnya sendiri. Dia juga merupakan warga setempat dengan pengalaman sebagai anak, istri, maupun ibu.

Keterlibatannya menjadi pendamping YKPM memberikannya keleluasaan untuk membuat lingkungan tempatnya tinggal menjadi kawasan yang tak lagi dianggap rawan. “Kami buat mereka punya kesibukan yang bermanfaat. Anak-anak, laki-laki, juga ibu-ibu,” ujar Rukiyah tentang resep membuat kampungnya lebih nyaman.

Bersama Program Peduli, dia merancang berbagai kegiatan yang melibatkan dan bermanfaat buat warga. Di masjid kini ada Tempat Pendidikan Alquran (TPA) yang aktif tiap hari. Masjid menjadi salah satu pusat kegiatan warga. AYLA juga mengaji di tempat ini. Salah satu korban AYLA kini menjadi pengajar dan imam masjid.

Ada pula Forum Warga yang dihadiri laki-laki dan perempuan, diadakan tiap bulan atau sesuai kebutuhan untuk mendiskusikan masalah-masalah mendesak kampung.

Ada juga Forum Anak yang memberikan keleluasaan anak-anak berkumpul, menuangkan ide-ide dan mewujudkan kegiatannya melalui seni seperti teater, olahraga, dan menari. Selain itu, ada majelis taklim untuk perempuan yang ingin belajar mengaji tiap hari Sabtu dan Minggu.



“Tapi itu semua bukan sekedar kegiatan. Majelis taklim misalnya, kadang dihadiri 7 hingga 30 orang perempuan. Mereka tak hanya datang mengaji, kami juga berdiskusi masalah-masalah di kampung,” tambah Rukiyah.

Cara tersebut ternyata efektif untuk mengurangi ketegangan-ketegangan antar tetangga karena bisa mendeteksi masalah sejak awal. Selain itu, anak yang dilacurkan (AYLA) juga berbaur dengan masyarakat lainnya sehingga terbangun kesadaran untuk berubah.

“Kami juga berusaha membuat mereka berprestasi dan bangga. Tiga tahun berturut-turut anak-anak muda di sini menjadi panitia Pesta Rakyat,” cerita Rukiyah. Pesta Rakyat sebenarnya adalah perayaan 17 Agustusan yang tidak pernah dilakukan oleh anak-anak secara umum, apalagi



AYLA. Mereka bergembira pada malam peringatan 17-an.

Lorong-lorong penuh sesak. Sebagian bahkan ditutup untuk panggung dan lapangan penonton yang mencapai ratusan. Sebagian anak-anak muda menjadi panitia. Sebagian lagi tampil main teater dan menari. Banyak orang penting diundang, termasuk Kapolres Makassar. Pemerintah kota sengaja melibatkan anak dan memberi ruang kreativitas bagi anak rentan dan AYLA.

Manfaat kegiatan ini berdampak langsung terhadap rasa percaya diri anak atau *self confidence*. Dulunya anak di wilayah ini adalah anak yang minder dan tidak memiliki kepercayaan diri sehingga

membuat mereka mudah terpengaruh hal-hal negatif seperti *ngelem* dan obat-obatan. Karena harus tampil, mereka harus siap secara mental dan maju ke depan dengan rasa percaya diri. Itulah yang dirasakan anak. Lebih jauh lagi, mereka mulai dapat berpikir agar waktu mereka dapat bermanfaat.

Rupanya kegiatan-kegiatan ini memberikan efek positif yang membuat warga terpicu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul pada Forum Warga. Salah satunya masalah pendidikan anak-anak putus sekolah.

Anak yang kehilangan percaya diri untuk bersekolah karena stigma negatif, memilih tidak mau sekolah. Mereka sudah bermukim di kawasan yang kurang baik, di kampung yang mendapatkan stigma anak nakal. Kemudian mereka juga diketahui di sekolah sebagai anak yang mudah diajak oleh laki-laki. Karena kondisi inilah, penting untuk memikirkan masa depan anak.

Kader memberikan dukungan melalui pendidikan non formal dan kejar paket anak-anak yang diurus oleh warga agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara demi masa depan.

Mestinya Sumarni (52) gembira sebab laporan tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Tamamaung menurun drastis tahun lalu. Dari 30 kejadian kasus KDRT pada 2016, menurun hingga tersisa 11 kasus KDRT pada 2017. Ia yakin itu merupakan dampak kerja-kerja yang dia dan teman-temannya lakukan dalam mendampingi korban KDRT sejak 2014. Namun sebagai kader Peduli, dia prihatin karena angka kasus kekerasan terhadap anak justru naik.

“Tahun lalu, ada 11 kasus KDRT dan 22 kasus kekerasan terhadap anak. Sampai

Mei 2017, kami mencatat ada 5 kasus kekerasan terhadap anak,” ujar Sumarni.

Kasus kekerasan terhadap anak ini beragam bentuknya. Yang paling banyak adalah kasus kekerasan fisik dan verbal. Disusul kasus pencurian dan “ngelem”. Terakhir, kekerasan seksual.

“SAYA LEBIH BAIK DIPUKUL BERKALI-KALI DARIPADA DIMAKI-MAKI SEBAGAI PELACUR. PADAHAL SAYA TAK MELAKUKAN ITU. SAYA INGIN PERGI SAJA DARI RUMAH.”

Ade

Peningkatan ini bisa jadi berkaitan dengan makin terbukanya kesadaran warga Tamamaung terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, seperti yang diperlihatkan oleh Ade, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dampingan Program Peduli.

“Saya lebih baik dipukul berkali-kali daripada dimaki-maki sebagai pelacur. Padahal saya tak melakukan itu. Saya ingin pergi saja dari rumah,” ujar Ade suatu kali mendatangi Sumarni di *shelter* warga Tamamaung.

Sumarni berhasil menenangkan Ade sehingga ia mengurungkan niatnya kabur dari rumah. Tak hanya itu, ia juga membekalinya dengan pengetahuan tentang hak-hak anak menurut undang-undang. Hal ini membuat Ade lebih percaya diri menghadapi situasi di rumahnya. Ini juga membuatnya makin peka melihat potensi kekerasan yang terjadi di lingkungannya, termasuk yang dialami Rina, temannya.

Ade bertemu Rina di satu kesempatan nongkrong bersama di sebuah sudut lorong yang remang. Nongkrong di lorong adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut untuk bertemu dan mengobrol dengan teman-temannya. Sebab Tamamaung,

kelurahan yang paling padat di Kecamatan Panakukang, tak memiliki ruang-ruang publik seperti taman yang bisa membuat para remaja ini berkegiatan dan melepaskan ketegangan di rumah mereka yang sempit. Sumarni mengatakan tiap rumah di Tamamaung bisa ditinggali oleh 2 hingga 4 keluarga.

Sejak orang tuanya berpisah, Rina tinggal berdua dengan ayahnya yang bekerja sebagai tukang sapu di sebuah Sekolah Dasar (SD). Belakangan Rina merasakan sikap ayahnya yang aneh. Ayahnya suka mengeringkan badannya sehabis mandi, sambil menyentuh bagian-bagian tubuh Rina yang intim. Padahal Rina bukan anak kecil lagi. Dia gadis sepantaran Ade.

Ade kaget mendengar cerita itu. Ia lantas mengajak Rina bertemu Sumarni di *shelter* untuk berkonsultasi.

“Saya bilang itu tidak boleh dilakukan oleh ayahnya. Itu bentuk kekerasan seksual. Saya sampaikan tentang hak-hak dia sebagai anak. Saya juga menyarankan Rina tidak tinggal dengan ayahnya, tapi saya bingung saat itu karena dia tak mungkin tinggal di rumah saya. Saya punya 6 orang anak, 4 di antaranya laki-laki. Untunglah Ade justru berani mengambil inisiatif. Ia mengajak Rina tinggal sementara di rumahnya sehingga untuk sementara Rina aman,” ujar Sumarni.

Tak lama, sang ayah datang mencari Rina. Ia sampai juga ke *shelter* Peduli di rumah Sumarni. Ia mendesak Sumarni mengembalikan anaknya. Setelah perdebatan yang alot, Sumarni akhirnya berhasil meyakinkan sang ayah. Sumarni menjelaskan bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan bisa dipolisikan. Sang ayah ketakutan.

Tak berhenti di situ, Sumarni dan kader Peduli berupaya menemukan tempat tinggal ibu Rina. “Ia tinggal di Kota Makassar menjadi buruh cuci. Setelah diceritakan tentang perbuatan suaminya, ia bersedia tinggal dengan Rina,” ujar Sumarni.

Tentu saja tak semua kasus kekerasan terhadap anak sederhana dan berakhir tenang seperti ini. Ada juga yang kompleks, seperti kasus mucikari yang dipanggil Bunda.

“Sasaran Bunda adalah pelajar-pelajar perempuan SMP dan Sekolah Menengah Atas



(SMA) yang orang tuanya miskin, tapi ingin tampil seperti pelajar-pelajar yang dilihatnya di TV dan internet. Pegang HP dan jalan-jalan di mal. Awalnya, Bunda mengajaknya jalan-jalan ke mal, membelikannya makan. Berikutnya mereka dikasih pegang HP. Senanglah mereka, *toh*. Tak lama ada laki-laki yang menelepon mereka dan mengajak bertemu di satu tempat. Di sana, ia diajak makan dan diperkenalkan dengan minuman keras. Si anak menjadi mabuk dan tak ingat apa-apa. Bangun-bangun dia sudah telanjang. Rupanya laki-laki itu adalah langganan Bunda,” tuturnya. Sumarni semula tak percaya jika ada perempuan seperti Bunda, yang tega mendapatkan uang dengan memperdagangkan anak-anak perempuan seusia SMP.

Belakangan terbongkar, ada sekitar 8 anak perempuan yang jadi korban Bunda. Sebagian mereka meneruskannya sebagai jalan mendapatkan uang. “Mereka bilang satu kali *main* dapat 100 ribu rupiah,” kata Sumarni.

Untuk Sumarni, kasus ini tergolong

Suasana pertemuan

berat dan butuh tindakan pemerintah. Untunglah Program Peduli telah membekalinya berjejaring kuat dengan lembaga-lembaga pemerintah, seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial di tingkat kota.

Dalam waktu tak terlalu lama, melalui koordinasi dengan FKPM, Bunda akhirnya ditangkap polisi. Dinas Kesehatan memberikan layanan kesehatan bagi anak-anak tersebut sementara DPPA dan Dinas Sosial memberikan pembinaan kepada anak-anak tersebut.

Kini Tamamaung memiliki tim yang cukup kuat untuk menangani kekerasan terhadap anak. Forum Anak Peduli Panakukang (FAPP) yang dibentuk pada 2014, bersamaan dengan dimulainya Program Peduli, kini anggotanya meningkat 3 kali lipat menjadi 60 anak. Tiap bulan mereka bertemu mendiskusikan masalah dan kegiatan positif anak-anak muda.

Mereka juga sudah terhubung dengan Forum Anak Kota Makassar (FAKM). Dua



anggota FAPP kini pengurus di FAKM.

Sejak tahun lalu, beranda rumah Sumarni menjadi *shelter* yang menerima resmi pengaduan-pengaduan berkaitan dengan kekerasan terhadap anak ataupun anak yang dilacurkan. Mereka juga memiliki 8 rumah aman yang tersebar di tiap Rukun Warga (RW). Sumarni memiliki 20 orang kader, 7 di antaranya kader aktif.

“Tapi ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi. Saya mengusulkan ada taman-taman publik dan ada psikolog di tiap desa. Tak hanya korban yang membutuhkan layanan, para pendamping juga membutuhkan *healing* sehingga bisa melakukan perannya dengan optimal,” jelas Sumarni tentang tantangan ke depan bagi para pendamping.

Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa teknologi informasi penting dilihat karena memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perilaku anak, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang baru, seperti pelacuran online dan *phone-sex*.

Problem dan tantangan selama menjadi pendamping disampaikan Sumarni kepada Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada sebuah dengar pendapat (*hearing*) yang difasilitasi oleh Ketua DPRD, Faraouk M.Beta. Saat itu, dia dan 6 orang kader Peduli lainnya sedang melakukan advokasi agar DPRD dan Pemkot Makassar segera mengeluarkan perda untuk perlindungan anak.

Lebih jauh, Sumarni melihat kemiskinan menjadi salah satu akar masalah kekerasan terhadap anak. Itulah sebabnya, timnya secara swadaya mencoba mengembangkan dukungan ekonomi bagi orang-orang yang mereka dampingi, misalnya dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan modal untuk memproduksi makanan kecil untuk dititipkan ke warung-warung di sekitar rumah mereka.

Kini, anak-anak korban (AYLA) memiliki kemampuan memproteksi diri dan memiliki kemampuan membantu sesama remaja. Ada yang sudah cukup matang dan malah berani menggagalkan proses transaksi perdagangan seksual anak di wilayahnya sendiri.

Lorong-lorong di Kota Makassar, tak hanya menjadi saksi terjadinya beragam bentuk kekerasan



pada anak. Ia juga saksi upaya membawa berbagai pihak untuk menautkan kepentingannya pada perlindungan anak. Sebab dengan begitu, Makassar akan terus menggeliat menuju Kota Ramah Anak dan bebas eksploitasi seksual anak.

Mendorong Perda Anak

Pada 9 April 2018, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak Kota Makassar yang didorong YKPM dan bersama koalisi organisasi masyarakat sipil lainnya di Makassar dinyatakan selesai dibahas pada sidang pleno DPRD Kota Makassar, tinggal menunggu pengesahan.

Perda ini akan menjadi Perda pertama di Pulau Sulawesi yang mengatur perlindungan anak. Waktu yang cukup lama mengingat UU Perlindungan Anak sudah ada sejak 2002, yang kemudian menjadi UU

No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Draft awal Raperda ini disusun koalisi organisasi masyarakat sipil dan individu yang memberikan perhatian terhadap isu anak dan partisipasi masyarakat, seperti YKPM, Lembaga Pembinaan Anak (LPA), dan Kupas. Mereka menggandeng beberapa individu termasuk Prof. Andi Pangerang, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, yang punya perhatian besar pada partisipasi hukum warga.

Rancangan awal ini kemudian diadopsi oleh DPRD dan diajukan sebagai Raperda inisiatif DPRD Kota Makassar. Raperda ini salah satunya mengatur pendampingan anak berbasis masyarakat.

Raperda ini sangat mendesak bagi kota-kota besar seperti Makassar. Pembangunan kota-kota besar selalu menyisakan kantong-kantong kemiskinan yang rawan dengan kekerasan. Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Tenri A. Palallo



“JIKA INI DISAHKAN, PENDANAAN PEMKOT UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK AKAN MENINGKAT HINGGA 200 PERSEN.”

Edi

menyebutkan tingginya kasus-kasus anak, seperti anak jalanan, begal, pekerja anak, pekerja rumah tangga anak, dan kasus eksploitasi seksual anak.

Pada 2016, kasus kekerasan anak sebanyak 276 kasus, sedangkan kasus anak yang dilacurkan (AYLA) menurut data YKPM pada 4 kecamatan mencapai 69 anak. Meski memprihatinkan, tetapi tingginya angka ini menurutnya merupakan pertanda masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami.

“Selama pembahasan Raperda, diselenggarakan beberapa kali pertemuan informal dengan anggota DPRD, dan satu kali dengar pendapat resmi,” ujar Edi menceritakan bagaimana YKPM berperan

penting mengkonsolidasi dan mendinamisir koalisi masyarakat sipil. Pada salah satu dengar pendapat dengan DPRD, YKPM meminta Sumarni dan dua pendamping lapang lainnya memberikan kesaksian tentang kebutuhan mendesak perlindungan bagi anak-anak lorong.

Jika sudah terbit, menurut Edi, Perda ini menjadi angin segar bagi perbaikan upaya perlindungan anak di Makassar. “Ada beberapa isu yang sangat penting dalam Perda ini, termasuk kota akan memiliki perlindungan anak berbasis lorong, mewajibkan partisipasi masyarakat, larangan melakukan stigmatisasi kepada korban kekerasan, serta koordinasi antara 14 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dalam upaya melindungi anak.”

Perda juga akan berimplikasi terhadap kepastian pendanaan program perlindungan anak.

“Jika ini disahkan, pendanaan Pemkot untuk program perlindungan anak akan meningkat hingga 200 persen,” tambah Edi.

Selama Perda belum terbit, YKPM melalui Program Peduli mendorong koordinasi pemerintah untuk perlindungan anak dilakukan dalam kerangka mendorong Makassar sebagai Kota Layak Anak, yang dideklarasikan Pemkot Makassar pada 22 September 2014.



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN ANAK



REKRUT KADER UNTUK LORONG



MEMFASILITASI TEMPAT AMAN UNTUK AYLA



DATA
PENDIDIKAN
SANGGAR
KESEHATAN



EKSPRESI BUDAYA

ANAK DILIBATKAN DALAM KEGIATAN/ GERAKAN SOSIAL



ALIANSI SEKOTA



PERDA

ADVOKASI
DIPERIKUAT
DATA



Daftar Organisasi yang menyumbangkan pengalaman dan tulisan :

1. Children Crisis Centre (CCC)
2. Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia (KAP Indonesia)
3. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP)
4. Lembaga Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3TP2A)
5. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim)
6. Solidaritas Masyarakat Anak (Semak)
7. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI - Pusat, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat)
8. Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai)
9. Yayasan Pengembangan Kemanusiaan (YPK) Donders
10. Yayasan Akses Indonesia (Yakin)
11. Yayasan Tanoker
12. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin)
13. Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
14. Yayasan Hotline Surabaya (YHS)
15. Yayasan Wali Ati, Sumba

Informasi Lebih Lanjut

Anak yang Dilacurkan

Yayasan SAMIN

Jl. Perintis 1, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp: (0271) 530 620

<http://yayasan-samin.org>

Anak Pekerja Migran

Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan

Perumahan Karanglo Indah Blok I/4, Tanjungtirto, Singosari, Malang, Jawa Timur 65126

Telp: (0341) 472 557

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Jl. Hang Jebat III Blk F. No. 3 RT 4/ RW8, Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 12120

Telp: (021) 720 7372

<http://pkbi.or.id/>

 www.programpeduli.org  info@programpeduli.org

 Program Peduli  @programpeduli  @programpeduli  Program Peduli #IDInklusif



Australian Government



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM
peduli



The Asia Foundation